

PENGANTAR EKONOMI MAKRO (KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)

PENULIS :

- Saut Maruli Tua Pandiangan
- Muhammad Syaiful
- Eranus Yoga Kundhani
- Roosganda Elizabeth
- Unang Atmaja
- Muhammad Hatta
- Wiljan Atfentia Kotngoran
- Febrian



PENGANTAR EKONOMI MAKRO (KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)

**Saut Maruli Tua Pandiangan
Muhammad Syaiful
Eranus Yoga Kundhani
Roosganda Elizabeth
Unang Atmaja
Muhammad Hatta
Wiljan Atfentia Kotngoran
Febrian**



GET PRESS INDONESIA

PENGANTAR EKONOMI MAKRO (KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)

Penulis :

Saut Maruli Tua Pandiangan
Muhammad Syaiful
Eranus Yoga Kundhani
Roosganda Elizabeth
Unang Atmaja
Muhammad Hatta
Wiljan Atfentia Kotngoran
Febrian

ISBN : 978-634-255-105-9

Editor : DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T.,
S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.

Penyunting : Tri Puti Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pengantar Ekonomi Makro (Konsepsi Dan Implementasinya) ini.

Buku Ini Membahas Pendahuluan Ekonomi Makro, Uang dan Lembaga Keuangan, Siklus Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Keseimbangan Pasar Uang dan Barang, Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat, Pendapatan Nasional, Inflasi dan Pengangguran.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO	1
1.1 Pengertian Ekonomi Makro.....	1
1.2 Permasalahan Ekonomi Makro	2
1.2.1 Pengangguran.....	2
1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	3
1.2.3 Inflasi.....	3
1.2.4 Neraca Pembayaran.....	4
1.3 Ruang Lingkup Ekonomi Makro	5
1.3.1 Tingkat Output Agregat.....	5
1.3.2 Tingkat Harga Agregat.....	5
1.3.4 Siklus Bisnis	6
1.3.5 Nilai Tukar	6
1.4 Tujuan Ekonomi Makro	7
1.4.1 Meningkatkan Pendapatan Nasional	7
1.4.2 Membuka Lapangan Pekerjaan	7
1.4.3 Meningkatkan Produksi Nasional	7
1.4.4 Mampu Mengendalikan Inflasi	7
1.4.5 Menyeimbangkan Neraca Pembayaran	8
1.5 Kebijakan Ekonomi Makro.....	8
1.5.1 Kebijakan Fiskal.....	8
1.5.2 Kebijakan Moneter.....	8
1.5.3 Kebijakan Penawaran	8
DAFTAR PUSTAKA	10
BAB 2 UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN.....	11
2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Definisi dan Fungsi Uang.....	12
2.3 Jenis-jenis Uang.....	15
2.4 Lembaga Keuangan	16
2.5 Jenis Lembaga Keuangan	18
2.6 Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB 3 SIKLUS EKONOMI	23
3.1 Pendahuluan	23
3.2 Konsep Siklus Ekonomi	23
3.3 Teori Siklus Ekonomi.....	26
3.4 Tahapan Siklus Ekonomi	28
3.5 Siklus Ekonomi di Indonesia.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
BAB 4 PERTUMBUHAN EKONOMI.....	35
4.1 Pendahuluan	35
4.1.1 Latar Belakang Konseptual.....	36
4.1.2 Sejarah dan Konteks Global.....	36
4.1.4 Konteks Indonesia	37
4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan	37
4.2 Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	38
4.2.1 Definisi dan Pengertian Pertumbuhan Ekonomi..	39
4.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	39
4.2.3 Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	40
4.2.4 Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi.....	41
4.2.5 Jenis Pertumbuhan Ekonomi.....	41
4.2.6 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Historis	41
4.2.7 Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi.....	42
4.3 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi	42
4.3.1 Teori Pertumbuhan Klasik.....	43
4.3.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan Model).....	44
4.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen.....	44
4.3.4 Teori Schumpeterian dan Inovasi.....	45
4.3.5 Teori Pertumbuhan Strukturalis.....	45
4.3.6 Relevansi Teori dalam Konteks Indonesia	46
4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	47
4.4.1 Sumber Daya Alam	47
4.4.2 Akumulasi Modal.....	48
4.4.3 Sumber Daya Manusia.....	48
4.4.4 Kemajuan Teknologi.....	48

4.4.5 Stabilitas Politik dan Kelembagaan	49
4.4.6 Perdagangan Internasional.....	49
4.4.7 Faktor Sosial dan Budaya.....	49
4.4.8 Faktor Lingkungan dan Keberlanjutan	50
4.5 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi	50
4.6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	51
4.6.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	52
4.6.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Reformasi	52
4.6.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	53
4.6.4 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	53
4.6.5 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	54
4.6.6 Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	54
4.7 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern.....	55
4.7.1 Model Harrod-Domar.....	55
4.7.2 Model Solow-Swan (Neoklasik)	56
4.7.3 Teori Pertumbuhan Endogen	56
4.7.4 Teori Schumpeterian (Inovasi dan Kewirausahaan)	57
4.7.5 Teori Kelembagaan (<i>Institutional Economics</i>).....	57
4.7.6 Implikasi Teori Modern bagi Indonesia.....	58
4.8 Dampak Pertumbuhan Ekonomi.....	59
4.8.1 Dampak Positif Pertumbuhan Ekonomi.....	59
4.8.2 Dampak Negatif Pertumbuhan Ekonomi.....	60
4.8.3 Implikasi Kebijakan.....	61
4.9 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan.....	62
4.9.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.....	63
4.9.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan.....	63
4.9.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.....	64
4.9.4 Tantangan dan Peluang bagi Indonesia.....	64
4.9.5 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.....	65
4.10 Penutup	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB 5 KESEIMBANGAN PASAR UANG DAN BARANG..... 69

5.1 Pendahuluan	69
5.2 Konsep Dasar Pasar Uang	69
5.2.1 Pengertian dan Karakteristik Pasar Uang.....	69
5.2.2 Kurva Permintaan dan Penawaran Uang.....	70
5.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan Pasar Uang	71
5.3 Konsep Dasar Pasar Barang.....	72
5.3.1 Keseimbangan Pasar Barang dalam Model IS	72
5.3.2 Kurva IS (<i>Investment-Saving</i>)	73
5.3.3 Pergeseran Kurva IS	74
5.4 Model IS-LM: Keseimbangan Simultan.....	75
5.4.1 Integrasi Pasar Uang dan Pasar Barang	75
5.4.2 Mekanisme Penyesuaian	76
5.4.3 Stabilitas Keseimbangan	76
5.5 Dampak Kebijakan Ekonomi Makro	76
5.5.1 Kebijakan Moneter	76
5.5.2 Kebijakan Fiskal	78
5.5.3 Koordinasi Kebijakan dan <i>Policy Mix</i>	79
5.6 Dinamika Jangka Pendek dan Jangka Panjang	81
5.6.1 Penyesuaian Jangka Pendek	81
5.6.2 Transisi ke Jangka Panjang	82
5.6.3 Peran Ekspektasi dan Adaptive Learning.....	83
5.7 Keterbatasan Model IS-LM dan Pengembangan Kontemporer	84
5.7.1 Asumsi yang Restriktif dalam Konteks Agribisnis	84
5.7.2 Pengembangan Model untuk Mengatasi Keterbatasan.....	85
5.7.3 Relevansi Berkelanjutan untuk <i>Policy Making</i>	86
5.8 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan	87
5.8.1 Relevansi Model IS-LM untuk Sektor Agribisnis..	87
5.8.2 Koordinasi Kebijakan Makroekonomi	88
5.8.3 Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan	88
5.8.4 Tantangan dan Peluang Masa Depan.....	89
5.8.5 Rekomendasi Kebijakan.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB 6 PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN

AGREGAT	94
6.1 Pendahuluan.....	94
6.2 Permintaan Agregat (AD)	94
6.2.1 Faktor yang Menggeser Kurva AD (Perubahan Permintaan Agregat):	96
6.3 Penawaran Agregat (AS)	97
6.3.1 Penawaran Agregat Jangka Pendek (SRAS)	97
6.3.2 Cara upah kaku mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek.....	99
6.3.3 Faktor-Faktor Penggeser Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek:	100
6.3.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pergeseran Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek ke Kanan.....	101
6.3.5 Penyebab kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri.....	102
6.3.2 Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS).....	103
6.3.6 Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang?	107
6.3.7 Penyebab kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan	108
6.3.8 Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS).....	108
6.3.9 Penyebab kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kiri	110
6.3.10 Faktor-Faktor Penggeser Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (Perubahan Output Potensial).....	111
6.4 Keseimbangan AD-AS.....	112
6.4.1 Keseimbangan Jangka Panjang AD dan AS	115
6.4.2 Keseimbangan Makroekonomi Jangka Pendek dan Jangka Panjang.....	116
6.4.3 Keseimbangan Jangka Pendek.....	118
6.4.4 Dinamika Ketidakseimbangan Harga dan Penyesuaian Menuju Ekuilibrium.....	119

6.4.5 Sifat Kurva Penawaran Agregat dalam Kerangka Waktu yang Berbeda	120
6.4.6 Determinan Pergeseran Kurva Penawaran Agregat	120
6.5 Analisis Dinamis: Menuju Keseimbangan Jangka Panjang.....	121
6.5.1 Analisis Dinamis: Menuju Keseimbangan Jangka Panjang.....	121
6.5.2 Analisis mendalam konsep keseimbangan jangka panjang meliputi :.....	121
6.6 Kesimpulan	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL	128
7.1 Pendahuluan	128
7.2 Sejarah dan Perkembangan Teori Pendapatan Nasional	128
7.3 Manfaat Pendapatan Nasional.....	130
7.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional	132
7.5 Konsep Pendapatan Nasional	133
7.6 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional	135
7.6.1 Pendekatan Produksi.....	135
7.6.2 Pendekatan Pendapatan	136
7.6.3 Pendekatan Pengeluaran.....	137
7.7 Perkembangan Pendapatan Nasional Di Indonesia.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BAB 8 INFLASI DAN PENGANGGURAN	144
8.1 Pendahuluan	144
8.1.1 Kerangka Konseptual: Definisi Operasional dan Konsistensi Terminologi	146
8.2 Kerangka Teoritis: Relasi Inflasi dan Pengangguran...	147
8.2.1 Teori Klasik dan Monetaris	147
8.2.2 Pandangan <i>Keynesian</i> dan Kurva Phillips	148
8.2.3 Pandangan Monetaris.....	150
8.2.4 Pandangan Kritis terhadap <i>Trade-Off</i> Inflasi dan Pengangguran.....	152
8.3 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan	154

DAFTAR PUSTAKA 157

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Contoh Uang Kertas.....	16
Gambar 3.1. Tahapan Siklus Ekonomi.....	29
Gambar 3.2. Siklus Ekonomi di Indonesia (2015 – 2024)...	32
Gambar 5.1. Keseimbangan Pasar Uang.....	70
Gambar 5.2. Kurva IS.....	73
Gambar 5.3. Pergeseran kurva IS.....	75
Gambar 5.4. Model IS-LM	75
Gambar 6.1. Kurva Permintaan Agregat.....	94
Gambar 6.2. Pergeseran Kurva Permintaan Agregat	96
Gambar 6.3. Penawaran Agregat Jangka Pendek (SRAS)....	97
Gambar 6.4. Pergeseran Kurva SARS.....	102
Gambar 6.5. Penawaran Agregat Jangka Panjang	103
Gambar 6.6. Pergeseran Kurva LRAS	111
Gambar 6.7. Keseimbangan AD dan AS.....	112
Gambar 6.8. Keseimbangan Jangka Panjang AS dan AD.....	114
Gambar 6.9. Keseimbangan Jangka Pendek	118
Gambar 8.1. Grafik Tren Inflasi dan Pengangguran di ASEAN	114
Gambar 8.2. Grafik Kurva Phillips	148

BAB 1

PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO

Oleh Saut Maruli Tua Pandiangan

1.1 Pengertian Ekonomi Makro

Dari tahun 1929 hingga 1932, terjadi kemerosotan ekonomi global yang besar yang dimulai dengan krisis ekonomi di Amerika Serikat, yang disebut depresi hebat. Seperempat angkatan kerja Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasional anjlok. Krisis ekonomi ini menyadarkan para ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak bisa melakukan hal tersebut secara alamiah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seorang ahli ekonomi Inggris hadir di permukaan pada masa krisis ekonomi tersebut yang bernama John Maynard Keynes, beliau menyampaikan pandangan serta solusi dari krisis ekonomi tersebut, dan menulis buku yang berjudul, "*The General Theory of Employment, Interest and Money*", buku ini menjadi cikal bakal lahirnya ekonomi makro.

Pada umumnya ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang membahas perilaku suatu perekonomian secara kolektif atau komprehensif (Hasyim, 2016). Selain itu, ekonomi makro mengambil fokus pada pembahasan *economic policy action* yang dapat berefek pada kondisi konsumen dan investor, tindakan penetapan harga dan upah, serta tindakan kebijakan fiskal. Ekonomi makro terutama berkaitan dengan interaksi antara tenaga kerja, distribusi komoditas, dan barang-barang ekonomi yang mengarah pada aktivitas perdagangan setiap individu atau kelompok. Situasi ekonomi makro negara ialah salah satu faktor berharga yang membuat efek pada kinerja perusahaan dalam suatu negara. Ekonomi mikro adalah ilmu yang menelaah *behavior* dalam perekonomian secara sebagian atau secara individu. Ekonomi mikro mempengaruhi keputusan *owner* usaha mengenai alokasi sumber daya atau modal.

Perbedaan penting antara ekonomi makro dan ekonomi mikro mencakup hal berikut (Karim, 2011):

1. Uang disebut harga nominal dalam ekonomi makro dan merupakan elemen penelitian yang penting. Hal terpenting dalam ekonomi mikro adalah harga relatif. Keberadaan uang nantinya akan memunculkan bidang ekonomi moneter.
2. Pembeli dan penjual raksasa disebut pemerintah dalam ekonomi makro, namun tidak dalam ekonomi mikro. Kemampuan dan perilaku pemerintah untuk membelanjakan dan menyimpan sejumlah besar uang merupakan studi lain yang memunculkan bidang ekonomi keuangan.
3. Ekonomi makro adalah pendekatan atas-bawah sedangkan ekonomi mikro adalah pendekatan bawah-atas.
4. Ekonomi makro berfokus pada sudut pandang umum pada tingkat nasional, sedangkan ekonomi mikro berfokus pada sudut pandang individual pada konsumen.

Kebijakan ekonomi makro akan mempengaruhi kebijakan ekonomi mikro, yang menyebabkan fluktuasi perekonomian pada setiap tingkat perekonomian. Munculnya fenomena baru pada ekonomi mikro, pemerintahan akan menentukan kebijakan ekonomi makro yang efektif dan efisien atau menyesuaikannya agar situasi perekonomian negara stabil dalam menghadapi dinamika ekonomi.

1.2 Permasalahan Ekonomi Makro

Ekonomi makro pada umumnya adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kondisi perekonomian secara rinci dan komprehensif, tentunya mempunyai permasalahan sebagai berikut (Falianty, 2019):

1.2.1 Pengangguran

Pengangguran timbul karena adanya celah antara ketersediaan kesempatan kerja dengan total kerja yang membutuhkan pekerjaan. Pengangguran juga difaktorkan melalui kurangnya informasi teknologi dan keterampilan.

Pengangguran kuncinya adalah dengan melatih angkatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memberikan informasi lowongan kerja secepatnya, dan memulai proyek pemerintah seperti pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik.

1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum permasalahan ekonomi makro yang terbesar adalah ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Produk domestik bruto (PDB) tidak bisa dijadikan tolak ukur apakah suatu negara maju atau tidak maju.

Cara mengentaskan masalah mengenai pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi berfokus pada tingkatan produksi barang dan jasa dalam suatu ekosistem, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan teknologi tepat guna, peningkatan produksi barang dan jasa perusahaan itu saja. Tidak stabilnya kegiatan perekonomian, terutama dalam hal kegiatan produksi dapat menyebabkan bermacam permasalahan. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan aktivitas konsumsi kelompok masyarakat. Implikasi ketidakstabilan kebutuhan ini maka pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Cara lain untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian yaitu melalui peningkatan produksi barang dan jasa, menjamin persediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan konsumsi kelompok masyarakat.

1.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dihadapi hampir setiap negara setiap saat. Harga merupakan indikator yang menentukan inflasi, sehingga persoalan inflasi selalu dikaitkan mengenai kenaikan harga. Inflasi mengacu pada kecenderungan pada kenaikan harga secara general dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jika mengalami kenaikan satu atau bahkan lebih satu barang dalam suatu masyarakat dan bersifat temporal, maka keadaan tersebut tidak disebut sebagai inflasi. Atas dasar itu, situasi seperti ini tidak dikategorikan sebagai suatu masalah dan

tidak dibutuhkan sebagai tindakan khusus yang perlu untuk diatasi.

1.2.4 Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran merupakan suatu neraca yang mencantumkan kesimpulan semua transaksi penduduk dan penduduk lain selama jangka waktu tertentu (umumnya satu tahun). Transaksi yang termasuk dalam neraca pembayaran meliputi barang dan jasa, bisa dalam bentuk ekspor dan impor, transaksi keuangan seperti peminjaman dan penerimaan pinjaman yang berasal dari negara lain, penanaman dana di luar negeri, dan pengiriman uang dari dan dari penduduk luar negeri. Termasuk transaksi unilateral seperti bantuan luar negeri.

Apabila tingkat pembayaran untuk pelunasan ke luar negeri tidak sesuai dengan tingkat penerimaan dari luar negeri, perbedaan tersebut apakah dapat mencerminkan kondisi surplus atau kondisi defisit dalam suatu neraca pembayaran.

Ketidakseimbangan neraca pembayaran oleh negara dapat dikategorikan sebuah masalah apabila ketimpangan semakin menjadi membesar. Ketika kenyataan tersebut muncul, dibutuhkan sebuah kebijakan publik yang berpihak untuk mengatasinya.

Permasalahan ekonomi makro *long-term* meliputi permasalahan pertumbuhan sektor ekonomi. Permasalahannya pada hakikatnya adalah bagaimana mengatur ekonomi agar terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, peningkatan kapasitas produktif, dan ketersediaan modal investasi. Ketika keselarasan ini tercapai, kondisi optimal akan tercipta bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Cara mengatasi permasalahan ekonomi makro ini adalah dengan menjaga keseimbangan antara nilai hasil ekspor dan hasil impor. Nilai ekspor tidak boleh melebihi nilai impor. Begitu pula dengan nilai impor yang wajib dikendalikan dan tidak boleh melebihi nilai ekspor.

1.3 Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Ruang lingkup ekonomi makro adalah bagian faktor perilaku, institusi, dan struktural adalah sebagai berikut (Rosyidi, 2005):

1.3.1 Tingkat Output Agregat

Ukuran kesehatan perekonomian suatu negara adalah tingkat produk bruto, atau jumlah total barang dan jasa yang diproduksi perekonomian dalam periode waktu tertentu. Periode ketika output perekonomian menurun disebut resesi. Penurunan produksi yang berkepanjangan disebut depresi.

Pada kondisi tingkat produksi turun, kondisi kuantitas barang dan jasa yang beredar menurun, pada tingkat harga naik, dan terakhir taraf hidup masyarakat turun. Sebab, ketika perusahaan memutuskan untuk mengurangi produksi, maka banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sehingga mengurangi pendapatan masyarakat dan meningkatkan pengangguran. Pemerintah selalu memperhatikan tingkat produksi negaranya pada waktu yang berbeda-beda. Bukan hanya nilai total barang dan jasa yang dibuat setiap tahun yang penting bagi pemerintah, namun juga total pertumbuhan output tahunan. Total pertumbuhan yang besar berarti standar hidup yang lebih tinggi dan capaian kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat.

1.3.2 Tingkat Harga Agregat

Kenaikan harga secara umum dan inflasi merupakan masalah besar bagi pemerintahan suatu negara. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi selama periode tersebut bisa rendah, tinggi, atau sangat tinggi.

Inflasi akan memperburuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Inflasi memperlambat pertumbuhan ekonomi karena cenderung menyebabkan berkurangnya konsumsi, berkurangnya produktivitas, berkurangnya ekspor, dan lebih banyak impor sehingga pengendalian inflasi menjadi tujuan

utama pemerintah, terutama saat negara sedang kondisi inflasi dalam bentuk hiperinflasi.

1.3.3 Pengangguran

Pengangguran adalah situasi dan kondisi di mana seseorang yang sudah punya pengalaman bekerja dan berupaya mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan tingkat produksi. Faktor utama penyebab pengangguran adalah penurunan permintaan produksi agregat. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, maka rasa keinginan pelaku usaha untuk memproduksinya pun menurun. Penurunan produksi ini akan berimplikasi pada perusahaan untuk mengurangi *production cost*, khususnya biaya tenaga kerja, karena pembayaran upah menjadi biaya terbesar yang dikeluarkan perusahaan.

1.3.4 Siklus Bisnis

Ekonomi makro meyakini bahwa siklus bisnis perlu mendapat perhatian yang cermat karena dampaknya bisa macam perekonomian suatu negara. Dampak umum yang bisa terjadi adalah resesi ekonomi berkepanjangan menyebabkan kemunduran ekonomi suatu negara. Sebaliknya, ekspansi yang berkelanjutan akan menyebabkan inflasi dan akhirnya resesi.

1.3.5 Nilai Tukar

Stabilitas nilai tukar memegang peran yang sangat penting kepada kegiatan perdagangan internasional dan keterbukaan perekonomian antar negara. Stabilitas nilai tukar berefek pada stabilitas harga dan inflasi, stabilitas nilai tukar kemudian mendorong ekspor, stabilitas nilai tukar menciptakan *economic security*, dan pelaku ekonomi memperkirakan serta mengharapkan stabilitas nilai tukar yang baik menciptakan kondisi perekonomian yang menguntungkan.

1.4 Tujuan Ekonomi Makro

Dari pengertian, permasalahan dan ruang lingkup ekonomi makro di atas, maka muncullah tujuan dari ilmu ekonomi makro itu sendiri (Boediono, 1989):

1.4.1 Meningkatkan Pendapatan Nasional

Tujuan peningkatan pendapatan nasional merupakan tanda terjadinya pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara tidak menghasilkan pendapatan nasional yang signifikan, maka hal tersebut harus dipertanyakan dan dikaji. Ketika pendapatan nasional meningkat, masyarakat juga menjadi lebih kaya.

1.4.2 Membuka Lapangan Pekerjaan

Tujuan utama ekonomi makro ialah penciptaan lapangan kerja. Semakin banyak pekerjaan yang dibutuhkan, semakin banyak orang yang akan diterima. Jika hal ini diserap, kesenjangan ekonomi yang tajam akan hilang, pertumbuhan sosial akan stabil, dan tingkat pengangguran akan menurun.

1.4.3 Meningkatkan Produksi Nasional

Peningkatan produksi suatu negara membantu meningkatkan kapasitas produktif negara tersebut. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas produksi yang harus diupayakan secara nasional dan memerlukan evaluasi secara berkala. Semakin sering evaluasi dilakukan, maka semakin banyak cacat yang terkena dampaknya dan berdampak positif pada peningkatan kapasitas produksi.

1.4.4 Mampu Mengendalikan Inflasi

Tugas atau tujuan ekonomi makro tidak lain adalah mengendalikan permintaan barang dan jasa yang disebut dengan inflasi. Mengendalikan inflasi akan membantu dalam mengambil tindakan yang tepat. Misalnya ketika inflasi terjadi, pertumbuhan ekonomi menyebabkan harga-harga naik, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran dan penurunan nilai mata uang. Dengan kata lain, ekonomi makro juga menjamin stabilitas perekonomian tetap terjaga.

1.4.5 Menyeimbangkan Neraca Pembayaran

Keseimbangan neraca pembayaran adalah tujuan ekonomi makro yang mendasar. Tanpa adanya keseimbangan dengan luar negeri, pasti akan sulit terbaca. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar atau ikhtisar transaksi. Misalnya transaksi keuangan yang dilakukan ekspatriat, jual beli barang dan jasa yang dijual antar negara.

1.5 Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro merupakan tindakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut (Sukirno, 2000):

1.5.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran dan pengoperasian perekonomian negara secara keseluruhan melalui cara mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, dan distribusi pendapatan nasional.

1.5.2 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Kebijakan moneter mencakup tindakan pemerintah yang mempengaruhi pengeluaran secara keseluruhan, mulai dari mempengaruhi jumlah uang beredar dan sirkulasi di masyarakat hingga perubahan suku bunga selama periode ini. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengukur jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara, karena jumlah uang yang beredar di bank sentral mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi.

1.5.3 Kebijakan Penawaran

Kebijakan penawaran berfokus pada penyeimbangan keseimbangan keuangan negara dan perusahaan. Kebijakan

penawaran membantu perusahaan meningkatkan kemandirian kegiatan produksi dan meningkatkan insentif bekerja dengan pengurangan pajak pendapatan rumah tangga. Pada umumnya pemerintah menerapkan kebijakan penawaran dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang terus berinovasi, menggunakan teknologi terkini, dan mengembangkan kualitas produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 1989. *Makro Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Falianty, Aulia Telisa. 2019. *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman, A. 2011. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyidi, S. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

BAB 2

UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN

Oleh Muhammad Syaiful

2.1 Pendahuluan

Uang merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Dalam sistem ekonomi modern, uang berperan sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi, menggantikan sistem barter yang tidak efisien. Tanpa adanya uang, proses pertukaran barang dan jasa akan sangat rumit karena harus menemukan pihak yang memiliki kebutuhan yang saling sesuai (*Double coincidence of wants*).

Lebih dari sekadar alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) yang memungkinkan kita menetapkan harga dan membandingkan nilai berbagai barang dan jasa (Harsono *et al.*, 2024). Selain itu, uang juga digunakan sebagai penyimpan nilai (*Store of value*) yang memungkinkan masyarakat menabung dan menyimpan kekayaan. Dalam era modern, uang juga menjadi standar pembayaran yang ditunda (*Standard of deferred payment*), yang memungkinkan adanya kontrak hutang-piutang.

Dengan demikian, uang bukan hanya pelumas dalam roda perekonomian, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional.

Seiring berkembangnya perekonomian, dibutuhkan sistem yang mampu mengelola aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi sangat vital.

Lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara penabung dan pihak yang memerlukan pembiayaan, seperti pelaku usaha atau pemerintah. Dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Peran lembaga keuangan tidak hanya terbatas pada penyaluran dana. Mereka juga menyediakan berbagai layanan seperti sistem pembayaran, asuransi, investasi, serta pengelolaan risiko. Dalam sistem keuangan modern, lembaga keuangan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi karena mereka mendukung kelancaran arus uang, efisiensi pembiayaan, serta stabilitas keuangan nasional.

Uang dan lembaga keuangan memiliki keterkaitan erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi, sementara lembaga keuangan mengatur distribusi dan penggunaan uang tersebut agar lebih produktif.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh efisiensi sistem keuangan, terutama dalam hal pengalokasian dana. Ketika lembaga keuangan berfungsi dengan baik, mereka mampu menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan peningkatan pendapatan nasional.

Sebaliknya, jika sistem keuangan tidak efisien atau mengalami gangguan seperti krisis perbankan atau ketidakstabilan mata uang maka akan timbul dampak negatif yang luas terhadap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melalui bank sentral memainkan peran penting dalam mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan kata lain, uang dan lembaga keuangan adalah fondasi dari sistem perekonomian modern. Mereka tidak hanya mendukung transaksi sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.

2.2 Definisi dan Fungsi Uang

Dalam buku yang ditulis oleh Supriyanto *et al.*, (2024) Berikut ini adalah beberapa definisi utama uang yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan:

1. Definisi Uang dalam Konteks Ekonomi:

- a. **Menurut Milton Friedman:** Uang merupakan medium pertukaran yang diakui dalam suatu masyarakat, baik oleh pemerintah maupun hukum.
- b. **Menurut John Maynard Keynes:** Uang berfungsi sebagai sarana yang memudahkan terjadinya transaksi dalam kegiatan ekonomi sekaligus menjaga nilai secara relatif stabil dalam jangka waktu tertentu.

2. Definisi Uang dari Perspektif Fungsional:

- a. **Sebagai Media Pertukaran:** Uang adalah alat yang diakui secara umum sebagai pembayaran untuk barang dan jasa, sekaligus mempermudah pelaksanaan transaksi ekonomi.
- b. **Sebagai Satuan Hitung:** Uang berfungsi sebagai tolok ukur nilai yang memudahkan perbandingan harga atau nilai dari beragam barang dan jasa.
- c. **Sebagai Penyimpan Nilai:** Uang dapat berfungsi sebagai media penyimpan nilai untuk digunakan di masa mendatang, sehingga individu dapat mempertahankan kekayaan atau daya beli dengan cara yang praktis dan mudah diakses.

3. Definisi Uang dalam Konteks Fisik:

- a. **Uang Tunai:** Bentuk fisik dari nilai uang, berupa koin dan uang kertas yang diterbitkan oleh otoritas moneter suatu negara serta diakui secara resmi sebagai alat pembayaran yang sah.
- b. **Uang Giral:** Bentuk uang yang tidak memiliki wujud fisik, tersimpan sebagai saldo di rekening bank, dan dapat digunakan atau diakses melalui transfer elektronik maupun cek.

4. Definisi Uang dalam Teori Moneter:

Dalam pandangan teori moneter modern, uang dianggap sebagai kewajiban lembaga keuangan seperti bank, yang tercipta melalui proses penciptaan uang, misalnya lewat penyaluran pinjaman.

5. Definisi Uang dalam Konteks *Cryptocurrency*:

***Cryptocurrency*,** Sebagai inovasi baru dalam bentuk uang digital, seperti *Bitcoin*, *cryptocurrency* merupakan aset digital

yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan transaksi dan mengatur pembentukan unit baru. Mata uang digital ini beroperasi secara terdesentralisasi dan tidak berada di bawah pengawasan bank sentral.

Seluruh definisi tersebut menjelaskan peran dan karakteristik uang dalam perekonomian, beserta beragam bentuk dan fungsi yang memungkinkannya berperan sebagai alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan nilai dalam sistem ekonomi. Uang, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, memiliki peran khusus yang mencerminkan tujuan utamanya dalam perekonomian. Beberapa fungsi utama dari uang yaitu sebagai berikut:

1. **Media Pertukaran:** Fungsi utama uang adalah sebagai sarana yang mempermudah proses pertukaran barang dan jasa. Tanpa keberadaan uang, perekonomian akan bergantung pada sistem barter, di mana barang ditukar secara langsung dengan barang lain. Kehadiran uang membuat transaksi menjadi lebih efisien karena nilainya diakui dan diterima secara luas dalam setiap pertukaran.
2. **Satuan Hitung:** Uang berfungsi sebagai tolok ukur nilai yang memudahkan seseorang membandingkan harga atau nilai relatif berbagai barang dan jasa.
3. **Penyimpan Nilai:** Uang berperan penting sebagai sarana penyimpan nilai. Kemampuannya mempertahankan nilai relatif dari waktu ke waktu membuat seseorang dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk uang.
4. **Alat Pembayaran Utang:** Selain untuk transaksi umum, uang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran utang, baik dalam pelunasan pinjaman maupun kewajiban finansial lainnya.

Fungsi-fungsi tersebut menempatkan uang sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi modern. Tanpa perannya dalam mempermudah perdagangan dan menjadi acuan nilai, jalannya perekonomian akan terhambat dan kurang efisien. Kehadiran uang mempercepat peredaran barang dan jasa, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengalokasian sumber daya di suatu masyarakat atau sistem ekonomi. (Sudarmanto *et al.*, 2021).

2.3 Jenis-jenis Uang

Dalam sistem keuangan, ada banyak jenis uang. Berikut adalah penjelasan singkat tentang jenis uang yang biasa digunakan:

1. **Uang tunai** merupakan bentuk uang fisik, baik kertas maupun logam, yang nilainya diakui secara resmi oleh pemerintah suatu negara dan digunakan langsung dalam transaksi sehari-hari. Contohnya meliputi uang koin dan uang kertas yang dipakai untuk membayar barang dan jasa.
2. **Uang giral** merupakan bentuk uang non-fisik yang umumnya berbentuk elektronik dan tersimpan di rekening bank, seperti tabungan atau giro. Penggunaannya dapat dilakukan melalui kartu debit, transfer antar rekening, cek, atau layanan perbankan online, sehingga memungkinkan transaksi berlangsung praktis tanpa melibatkan uang tunai secara langsung.
3. **Uang Elektronik:** Uang elektronik adalah bentuk uang digital yang tersimpan pada kartu atau perangkat elektronik tertentu. Biasanya penggunaannya terbatas di area atau jaringan tertentu, seperti kartu prabayar atau alat pembayaran khusus yang dapat diisi ulang dan digunakan untuk bertransaksi di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
4. **Cryptocurrency** adalah jenis uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan transaksi sekaligus mengatur penciptaan unit mata uang. Contoh *cryptocurrency* antara lain Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Mata uang digital ini beroperasi secara independen dari bank sentral dan umumnya memanfaatkan teknologi blockchain sebagai dasar sistem transaksinya.
5. **Uang Komoditas:** Uang komoditas merupakan jenis uang yang nilainya bergantung pada nilai intrinsik bahan pembuatnya. Contohnya, uang logam mulia seperti emas atau perak memiliki nilai yang berasal dari sifat fisik dan kandungan logamnya.

Masing-masing jenis uang memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Pemilihan bentuk uang umumnya disesuaikan dengan kebutuhan, kemudahan penggunaan, serta

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan di suatu negara. Seiring waktu, kemajuan teknologi dan inovasi terus memengaruhi serta mengubah variasi uang yang digunakan dalam sistem keuangan dunia. (Supriyanto *et al.*, 2024).



Gambar 2.1. Contoh Uang Kertas
(Sumber: <https://finance.detik.com>)

2.4 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus memberikan layanan keuangan (Kusumaningrum *et al.*, 2021). Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lembaga non-bank seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, hingga platform keuangan berbasis teknologi (*fintech*) (Raymond *et al.*, 2023). Keberadaan lembaga keuangan sangat penting karena mereka menjadi perantara antara pihak yang memiliki surplus dana (penabung atau investor) dan pihak yang memerlukan dana (pengusaha, pemerintah, maupun individu). Dengan adanya perantara ini, aliran dana dalam perekonomian menjadi lebih efisien dan terarah.

Dalam perekonomian modern, lembaga keuangan memegang peranan yang strategis, antara lain:

1. Menyalurkan Dana ke Sektor Produktif

Lembaga keuangan mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya ke berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, perdagangan, dan jasa. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

2. Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Melalui pengelolaan dana yang baik dan pengawasan ketat dari otoritas, lembaga keuangan membantu menjaga stabilitas moneter dan mencegah gejolak yang dapat mengganggu perekonomian.

3. Memfasilitasi Transaksi Ekonomi

Lembaga keuangan menyediakan layanan sistem pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

4. Mengelola Risiko Keuangan

Melalui produk-produk seperti asuransi, lindung nilai (*hedging*), dan diversifikasi portofolio investasi, lembaga keuangan membantu masyarakat dan pelaku usaha meminimalkan risiko kerugian.

5. Mendorong Inklusi Keuangan

Dengan memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah terpencil, lembaga keuangan mendukung pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan.

Sistem keuangan merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai pelaku ekonomi melalui arus dana, instrumen keuangan, dan mekanisme pasar. Di dalamnya, lembaga keuangan menjadi simpul utama yang mengatur dan mengalirkan dana agar dapat digunakan secara optimal.

Hubungan antara lembaga keuangan dan pembangunan ekonomi sangat erat. Lembaga keuangan yang sehat dan efisien akan memudahkan pembiayaan proyek-proyek produktif, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, lemahnya sistem lembaga keuangan dapat menghambat penyaluran modal, memicu ketidakstabilan, bahkan menimbulkan krisis yang berdampak luas terhadap perekonomian.

Keberadaan lembaga keuangan bukan hanya soal bisnis dan keuntungan, tetapi juga bagian dari infrastruktur penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka adalah jembatan antara potensi dana yang ada di masyarakat dengan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bersama.

2.5 Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Firmansyah *et al.*, 2022).

1. **Bank Sentral** – Contohnya di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank sentral berfungsi mengatur jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran.
2. **Bank Umum** – Bank yang memberikan layanan perbankan lengkap, seperti tabungan, giro, deposito, kredit, dan transfer dana.
3. **Bank Syariah** – Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa bunga, dan menggunakan akad seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah.
4. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** – Bank yang fokus melayani masyarakat di tingkat lokal, terutama untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank tidak menerima simpanan dalam bentuk giro atau tabungan seperti bank, tetapi tetap berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

1. **Koperasi Simpan Pinjam** – Menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif (Syaiful, 2021).

2. **Perusahaan Asuransi**–Mengelola risiko dengan memberikan perlindungan finansial atas kerugian atau kejadian tak terduga.
3. **Lembaga Pembiayaan (*Leasing/Multifinance*)**– Memberikan pembiayaan untuk pembelian barang modal atau konsumsi secara angsuran.
4. **Pasar Modal** – Tempat bertemunya investor dan perusahaan melalui perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.
5. **Dana Pensiun** – Mengelola dana untuk memberikan manfaat pensiun bagi pesertanya.
6. **Pegadaian** – Memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga.
7. **Fintech (*Financial Technology*)** – Platform digital yang menyediakan layanan keuangan, seperti *peer-to-peer lending*, e-wallet, dan pembayaran online.

2.6 Kesimpulan

Uang dan lembaga keuangan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam perekonomian modern. Uang berperan sebagai media pertukaran yang mempermudah transaksi, menghilangkan hambatan sistem barter, dan menjadi tolok ukur nilai dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, lembaga keuangan menjadi saluran utama yang mengatur peredaran uang dan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Melalui fungsi intermediasi, penyediaan sistem pembayaran, pengelolaan risiko, dan peningkatan inklusi keuangan, lembaga keuangan memastikan bahwa aliran dana dalam perekonomian berjalan lancar, efisien, dan produktif. Peran mereka tidak hanya sebatas bisnis, tetapi juga bagian dari infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan teknologi membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi dunia keuangan. Digitalisasi, munculnya fintech, dan inovasi sistem pembayaran mendorong lembaga keuangan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Namun di sisi lain, risiko seperti keamanan siber, ketidakstabilan nilai tukar,

dan potensi krisis keuangan juga perlu diantisipasi dengan pengaturan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Dengan memahami konsep uang, peran lembaga keuangan, dan keterkaitan keduanya, kita dapat melihat bahwa stabilitas dan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kesehatan sistem keuangannya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, H. *et al.* (2022) *Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi, dan Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Harsono, I. *et al.* (2024) *Pengantar Ekonomi Makro*. Padang: GET Press Indonesia.
- Kusumaningrum, R. *et al.* (2021) *Mengelola Lembaga Keuangan*. Media Sains Indonesia.
- Raymond, R. *et al.* (2023) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Sudarmanto, E. *et al.* (2021) *Teori Ekonomi: Mikro dan Makro*. Yayasan Kita Menulis.
- Supriyanto, E. *et al.* (2024) 'EKONOMI DASAR: PEMAHAMAN KONSEP', *GET Press Indonesia* [Preprint].
- Syaiful, M. (2021) *Mengelola Koperasi: Sebuah Strategi Meningkatkan Kesejahteraan*. Palu: Penerbit Magama.

BAB 3

SIKLUS EKONOMI

Oleh Eranus Yoga Kundhani

3.1 Pendahuluan

Siklus ekonomi (*economic cycle/ business cycle*) merupakan fluktuasi kegiatan ekonomi secara periodik yang ditandai dengan perubahan tingkat output (Produk Domestik Bruto), pendapatan, kesempatan kerja, investasi, dan konsumsi dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu.

Siklus ini menunjukkan adanya masa naik (ekspansi) dan masa turun (resesi/ depresi) yang berlangsung berulang-ulang. Oleh karenanya, aktivitas ekonomi suatu negara siklus ekonomi digambarkan dengan pola *boom and bust*.

Siklus ekonomi juga dipahami sebagai pola berulang dari pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan adanya perubahan pendapatan nasional, output, kesempatan kerja, dan harga dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini menggambarkan dinamika ekonomi yang bergerak tidak linier, melainkan fluktuatif.

3.2 Konsep Siklus Ekonomi

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari siklus ekonomi (atau juga dikenal sebagai siklus bisnis – *business cycle*) menurut ekonom.

Siklus bisnis merupakan fluktuasi ekonomi baik total output nasional, pendapatan, maupun ketenagakerjaan, pada umumnya terjadi sepanjang 2 sampai dengan 10 tahun, ditandai dengan adanya ekspansi maupun kontraksi yang terjadi pada keseluruhan sektor ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Siklus bisnis adalah pola berulang dari ekspansi dan resesi dalam aktivitas ekonomi, yang mencerminkan fluktuasi di sekitar tren pertumbuhan jangka panjang (Dornbusch, Fischer & Startz, 2014).

Siklus ekonomi adalah fluktuasi aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Siklus ini terdiri dari empat fase utama, yaitu: ekspansi (pertumbuhan), puncak (klimaks), kontraksi (penurunan), dan palung (titik terendah). Fase-fase ini saling berkaitan dan membentuk pola naik turun dalam perekonomian (Case, Fair & Oster, 2016)

Siklus ekonomi (*business cycle*) dimaknai sebagai sebagai fluktuasi jangka pendek pada aktivitas ekonomi suatu negara, yang ditandai oleh perubahan dalam pertumbuhan output, lapangan kerja, dan inflasi. Oleh sebab itu siklus ekonomi dipahami sebagai pergerakan naik turunnya kegiatan ekonomi, normalnya terjadi dalam beberapa tahun (Blanchard, 2017).

Menurut Blanchard (2017) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus ekonomi, diantaranya:

1. Permintaan Agregat.

Perubahan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto.

2. Penawaran Agregat.

Perubahan dalam teknologi, produktivitas, dan biaya produksi.

3. Kebijakan Moneter dan Fiskal.

Tindakan pemerintah untuk mempengaruhi siklus ekonomi melalui suku bunga, pajak, dan pengeluaran pemerintah.

Siklus bisnis mengacu pada fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi, diukur dengan PDB riil dan indikator ekonomi makro lainnya, bergerak melalui fase ekspansi dan kontraksi (Mankiw, 2019). Fluktuasi dalam perekonomian sering disebut siklus bisnis. Sebagai siklus bisnis, naik turunnya perekonomian berkaitan dengan berubahnya keadaan bisnis. Saat PDB riil bertumbuh dengan cepat, maka bisnis akan berjalan baik. Sepanjang masa ekspansi ekonomi tersebut, kebanyakan perusahaan akan menemukan bahwa jumlah pelanggan bertambah banyak dan laba mengalami peningkatan. Saat PDB riil turun di masa resesi, bisnis akan menghadapi kesulitan. Maka sepanjang masa kontraksi ekonomi tersebut, tidak sedikit perusahaan yang akan merasakan turunnya

penjualan maupun laba yang semakin sedikit (Mankiw, 2019). Kata "siklus bisnis" kadang mengaburkan karena tersirat bahwa perubahan perekonomian memiliki bentuk yang teratur dan dapat diduga. Namun pada kenyataannya, fluktuasi ekonomi tidaklah teratur sama sekali, dan sulit untuk diprediksi secara tepat dan akurat (Mankiw, 2019).

Menurut Mankiw (2019), fluktuasi ekonomi atau siklus bisnis disebabkan oleh perubahan penawaran agregat dan permintaan agregat, serta variasi dalam produktivitas dan tingkat ketenagakerjaan. Perubahan ini bisa memicu resesi (penurunan pendapatan dan peningkatan pengangguran) atau depresi (kondisi yang lebih parah). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penawaran Agregat dan Permintaan Agregat.

Perubahan penawaran agregat dan permintaan agregat (total dari penawaran maupun permintaan barang dan jasa pada suatu perekonomian) adalah penyebab utama fluktuasi ekonomi. Misalnya, peningkatan permintaan (misalnya, karena optimisme konsumen) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan permintaan (misalnya, karena ketidakpastian ekonomi) dapat menyebabkan resesi.

2. Produktivitas.

Perubahan produktivitas (seberapa efisien suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa) juga mempengaruhi fluktuasi ekonomi. Peningkatan produktivitas biasanya mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan produktivitas dapat memperlambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan resesi.

3. Tingkat Ketenagakerjaan.

Perubahan dalam tingkat ketenagakerjaan (jumlah orang yang bekerja) juga berperan penting. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menandakan resesi, sementara tingkat pengangguran yang rendah dapat menandakan ekspansi ekonomi.

Fluktuasi laju ekspansi PDB riil juga disebut sebagai siklus bisnis. Siklus bisnis adalah pergerakan naik-turun yang periodik

namun tidak teratur, dari total produksi dan ukuran aktivitas ekonomi lainnya. Siklus bisnis bukanlah siklus teratur yang dapat diprediksi seperti fase-fase bulan, tetapi setiap siklus memiliki dua fase, yaitu ekspansi dan resesi, dan dua titik balik, yaitu puncak dan palung (Parkin, 2019). Ekspansi berakhir dan resesi dimulai pada puncak siklus bisnis, yang merupakan level tertinggi, yang dicapai PDB riil hingga saat itu. Resesi berakhir pada palung, ketika PDB riil mencapai titik rendah sementara dan dari sanalah ekspansi berikutnya dimulai.

Siklus bisnis dipahami sebagai kenaikan dan penurunan tingkat aktivitas ekonomi yang bergantian, terkadang selama beberapa tahun. Setiap siklus (satu "naik" diikuti oleh satu "turun") bervariasi secara substansial dalam durasi dan intensitasnya (McConnell, Brue & Flynn, 2021).

Menurut McConnell, Brue & Flynn (2021), ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus bisnis, termasuk fluktuasi dalam permintaan agregat, perubahan dalam investasi, dan perubahan dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, faktor eksternal seperti inovasi teknologi dan peristiwa global juga dapat memicu perubahan dalam siklus bisnis.

3.3 Teori Siklus Ekonomi

Sejak lama, para ekonom makroekonomi berdebat mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi/ siklus ekonomi. Beberapa faktor yang diduga kuat menyebabkan fluktuasi ekonomi diantaranya, karena fluktuasi moneter, guncangan produktivitas, maupun perubahan pengeluaran eksogen.

Berbagai teori mengenai siklus ekonomi dapat digolongkan ke dalam dua kategori: eksogen dan internal. Teori eksogen menemukan bahwa sumber siklus bisnis berasal dari fluktuasi faktor di luar perekonomian – pemilu, revolusi, perang; migrasi penduduk; nilai minyak; penemuan emas, penemuan lahan dan sumber daya baru; terobosan ilmiah dan penemuan baru dalam teknologi; perubahan iklim dan cuaca (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Di sisi yang lain, teori internal mengupayakan mekanisme sistem perekonomian itu sendiri. Pada teori internal, fase ekspansi akan menghasilkan fase resesi dan kontraksi, begitu pula sebaliknya

fase resesi akan menghasilkan fase ekspansi. Banyak siklus bisnis dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat merupakan siklus internal yang berawal dari sektor keuangan (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Arus utama pada teori siklus bisnis menyatakan bahwa ada pertumbuhan yang stabil pada PDB potensial, namun terdapat fluktuasi pada pertumbuhan permintaan agregat. Karena tingkat upah uang bersifat kaku, jika permintaan agregat tumbuh lebih cepat daripada PDB potensial, PDB riil bergerak di atas PDB potensial dan muncul kesenjangan inflasi. Jika permintaan agregat tumbuh lebih lambat daripada PDB potensial, PDB riil bergerak di bawah PDB potensial dan muncul kesenjangan resesi. Jika permintaan agregat menurun, PDB riil juga menurun dalam resesi (Parkin, 2019).

Menurut Parkin (2019), teori arus utama siklus ekonomi hadir dalam sejumlah bentuk khusus yang berbeda terkait sumber fluktuasi dalam pertumbuhan permintaan agregat dan sumber kekakuan upah uang. Berikut teori arus utama yang dimaksud, yakni:

1. Teori Siklus Keynesian.

Teori Siklus Keynesian menyatakan bahwa, perubahan investasi yang disebabkan oleh berubahnya keyakinan bisnis, merupakan faktor utama perubahan pada permintaan agregat.

2. Teori Siklus Moneteris

Teori Siklus Moneteris menjelaskan bahwa, perubahan investasi sektor bisnis dan konsumsi rumah tangga, yang disebabkan oleh perubahan laju pertumbuhan jumlah uang, merupakan faktor utama perubahan pada permintaan agregat. Teori Siklus Keynesian maupun Teori Siklus Moneteris mengasumsikan bahwa tingkat upah uang bersifat rigid namun tidak ada penjelasannya.

3. Teori Siklus Klasik Baru

Teori Siklus Klasik Baru menjelaskan bahwa harapan rasional atas tingkat harga, yang dipengaruhi oleh harapan atas permintaan agregat dan PDB potensial, akan mempengaruhi tingkat upah moneter dan letak dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Dijelaskan pula bahwa, perubahan tak terduga pada permintaan agregat akan menyebabkan perubahan PDB riil di seputar PDB potensial.

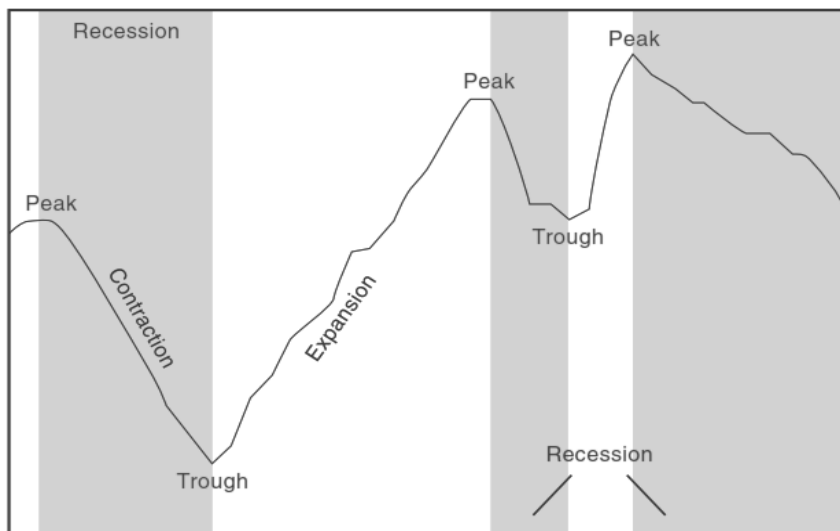
4. Teori Siklus Keynesian Baru

Teori Siklus Keynesian Baru menjelaskan fakta bahwa tingkat upah uang sekarang ini telah dirundingkan di waktu lampau, hal ini berarti bahwa, tingkat upah uang dan letak kurva penawaran agregat jangka pendek dipengaruhi oleh harapan rasional di waktu lalu terhadap tingkat harga sekarang ini. Dijelaskan pula bahwa perubahan PDB riil di seputar PDB potensial dipengaruhi oleh perubahan permintaan agregat, baik yang diperkirakan sekarang ini maupun yang tidak diduga.

Teori Siklus Bisnis Riil (*Real Bussiness Cycle/ RBC theory*), merupakan teori siklus bisnis yang terbaru, menganggap bahwa fluktuasi acak dalam produktivitas sebagai sumber utama fluktuasi ekonomi. Asumsi yang digunakan untuk menjelaskan perubahan produktivitas yakni adanya perubahan laju perubahan teknologi. Namun fluktuasi produktivitas juga dapat terjadi karena faktor lain, seperti perubahan iklim dan bencana alam maupun situasi dan kondisi internasional, (Parkin 2019). Teori Siklus Bisnis Riil menjelaskan siklus bisnis sebagai fluktuasi PDB potensial, yang muncul dari fluktuasi pengaruh perubahan teknologi terhadap pertumbuhan produktivitas.

3.4 Tahapan Siklus Ekonomi

Pada umumnya siklus bisnis dibagi menjadi dua fase utama, yakni fase resesi (*recession/ contraction*) dan fase ekspansi (*expansion*). Titik balik kedua fase tersebut ditandai dengan titik puncak (*peak*) dan palung (*trough*). Gambar 4.1 menunjukkan fase-fase siklus bisnis yang berurutan. Penurunan pada siklus bisnis disebut sebagai resesi. Resesi merupakan masa menurunnya output total, pendapatan maupun lapangan kerja, umumnya terjadi selama 6 hingga 12 bulan, di banyak sektor ekonomi terjadi kontraksi. Resesi yang skala besar dan durasinya lama disebut sebagai depresi (Samuelson & Nordhaus, 2010).



Gambar 3.1. Tahapan Siklus Ekonomi
(Sumber : Samuelson & Nordhaus, 2010)

Berikut ini penjelasan mengenai siklus ekonomi menurut teori ekonomi makro. Siklus ekonomi terdiri atas dua fase utama, yakni:

1. Ekspansi (*Expansion/ Recovery*)

Ekspansi adalah periode di mana PDB riil meningkat. Pada tahap awal ekspansi, PDB riil kembali ke PDB potensial dan seiring perkembangan ekspansi, PDB riil tumbuh dan akhirnya melebihi PDB potensial (Parkin, 2019).

Menurut McConnell, Brue & Flynn (2021), resesi biasanya diikuti oleh pemulihan dan ekspansi, periode di mana PDB riil, pendapatan, dan lapangan kerja meningkat. Pada titik tertentu, perekonomian kembali mendekati lapangan kerja penuh. Jika pengeluaran kemudian berekspansi lebih cepat daripada kapasitas produksi, harga hampir semua barang dan jasa akan naik. Hal ini akan mendorong naiknya harga-harga secara umum, dan pada akhirnya akan terjadi inflasi.

Oleh karenanya, pada fase ini ditandai dengan:

- a. Meningkatnya kegiatan ekonomi baik produksi barang maupun jasa.
- b. Adanya pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang positif.

- c. Meningkatnya konsumsi rumah tangga.
- d. Bertambahnya investasi pada semua sektor.
- e. Bertambahnya kesempatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

2. Resesi (*Recession/ Contraction*)

Definisi umum resesi adalah periode di mana PDB riil menurun - tingkat pertumbuhannya negatif - selama setidaknya dua kuartal berturut-turut. Definisi yang digunakan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional, yang mencatat fase-fase siklus bisnis Amerika Serikat dan titik baliknya, adalah "periode penurunan signifikan dalam output total, pendapatan, lapangan kerja maupun perdagangan, umumnya terjadi 6 bulan hingga 1 tahun, dan ditandai oleh kontraksi di banyak sektor ekonomi" (Samuelson & Nordhaus, 2010; Parkin, 2019).

Resesi merupakan periode penurunan output total, pendapatan maupun lapangan kerja. Penurunan ini, yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih, ditandai dengan kontraksi aktivitas bisnis yang meluas di berbagai sektor ekonomi. Seiring dengan penurunan PDB riil, terjadi peningkatan pengangguran yang signifikan (McConnell, Brue & Flynn, 2021).

Menurut Samuelson & Nordhaus (2010) pada masa resesi, terjadi,

- a. Investasi biasanya turun tajam. Umumnya, yang pertama menurun adalah sektor perumahan, baik karena Bank Sentral telah menaikkan suku bunga untuk memperlambat inflasi maupun karena krisis keuangan. Pembelian konsumen menurun tajam. Ketika bisnis memperlambat lini produksi, PDB riil turun.
- b. Tingkat ketenagakerjaan biasanya menurun tajam pada tahap awal resesi. Terkadang pemulihannya lambat, oleh karenanya sering disebut "pemulihan tanpa pekerjaan".
- c. Ketika output menurun, inflasi mengalami perlambatan, begitu pula terjadi penurunan pada permintaan bahan mentah, yang diikuti dengan turunnya harga bahan mentah. Upah dan harga jasa kemungkinan besar tidak akan

mengalami penurunan serupa, tetapi cenderung naik lebih lambat dalam masa resesi ekonomi.

- d. Keuntungan bisnis turun tajam selama fase resesi. Untuk mengantisipasi hal ini, harga saham akan diturunkan karena investor menduga tanda-tanda kemerosotan bisnis.
- e. Umumnya, ketika kondisi bisnis memburuk dan ketenagakerjaan menurun, Bank Sentral mulai menurunkan suku bunga jangka pendek untuk merangsang investasi, dan suku bunga bank umum pun ikut menurun.

Selain kedua fase dalam siklus ekonomi, terdapat dua titik balik dari kedua fase tersebut, yaitu:

1. Puncak (*Peak/ Boom*)

Pada titik puncak, aktivitas bisnis telah mencapai titik maksimum sementara. Pada titik ini, perekonomian mendekati atau berada pada tingkat kesempatan kerja penuh dan tingkat output riil berada pada atau sangat dekat dengan kapasitas perekonomian. Tingkat harga kemungkinan akan naik selama fase ini (McConnell, Brue & Flynn, 2021).

Pada titik puncak, perekonomian ditandai dengan kondisi:

- a. Produksi mencapai kapasitas maksimum.
- b. Aktivitas ekonomi berada pada titik tertinggi.
- c. Inflasi cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena permintaan agregat bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penawaran agregat.

2. Depresi (*Depression/ Trough*)

Pada titik terendah resesi atau yang dikenal dengan depresi, output dan lapangan kerja mencapai titik terendahnya. Titik palung ini dapat berlangsung singkat atau cukup panjang (McConnell, Brue & Flynn, 2021).

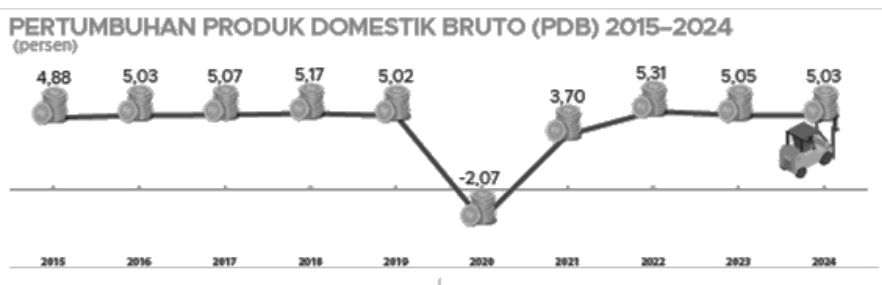
Pada titik depresi, perekonomian ditandai dengan kondisi:

- a. Aktivitas ekonomi berada di titik terendah.
- b. Inflasi sangat rendah atau bahkan terjadi deflasi.
- c. Tingginya tingkat pengangguran.

Titik depresi akan menjadi dasar bagi fase pemulihan/ ekspansi berikutnya.

3.5 Siklus Ekonomi di Indonesia

Gambar 4.2 menunjukkan siklus ekonomi di Indonesia periode 2015–2024, yang diukur dengan menggunakan data pertumbuhan Produk Domestik Bruto selama periode 2015 sampai dengan 2024 (c-to-c).



Gambar 3.2. Siklus Ekonomi di Indonesia (2015 – 2024)
(Sumber : www.bps.go.id, 2025)

Mencermati Gambar 3.2, maka terlihat bahwa mulai tahun 2015 sampai dengan 2018, perekonomian Indonesia mengalami fase ekspansi (*expansion*), dimana pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, berturut-turut sebesar 4,88 persen, 5,03 persen, 5,07 persen, dan mencapai titik puncak (*peak*) pada tahun 2018, yakni sebesar 5,17 persen. Fase resesi (*recession*) terjadi sepanjang tahun 2019 hingga 2020, ketika pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 5,02 persen dan mencapai titik terendah (*trough*) pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Selepas itu, perekonomian Indonesia mengalami masa pemulihan, fase ekspansi (*expansion*) terjadi pada periode 2021 sampai dengan 2022, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, berturut-turut sebesar 3,70 persen dan 5,31 persen pada tahun 2022, yang adalah titik puncaknya (*peak*). Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan (fase resesi) yakni sebesar 5,05 persen dan 5,03 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi siklus ekonomi di Indonesia, diantaranya:

1. Kebijakan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter maupun interaksi antar dua kebijakan

tersebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia.

2. Kondisi global.

Perekonomian di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi global, baik itu kondisi perekonomian, sosial politik, keamanan maupun kesehatan di negara-negara mitra dagang.

3. Harga Komoditas Sumber Daya Alam.

Indonesia yang diberkati dengan melimpahnya sumber daya alam, maka perekonomiannya akan didominasi dan bergantung pada harga komoditas sumber daya alamnya. Perubahan yang terjadi pada harga komoditas sumber daya alam akan berpengaruh pada kondisi ekonomi di Indonesia.

4. Bencana Alam.

Bencana alam dan pandemi dapat memberikan dampak yang signifikan pada siklus ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O. 2017. *Macroeconomics*. Pearson Education.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. 2016. *Principles of Economics*. Pearson.
- Dornbusch, R.; Fischer, S.; & Startz, R. 2014. *Macroeconomics*. 12th Edition. McGraw-Hill.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html> diakses pada 12 Agustus 2025.
- Mankiw, N. G. 2019. *Macroeconomics*. 10th Edition. New York, NY: Worth Publishers/ Macmillan Learning.
- Mankiw, N. G. 2021. *Principles of Economics*. 9th Edition. Cengage Learning.
- McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. 2009. *Economics: Principles, Problems, and Policies*. 18th Edition. McGraw-Hill/ Irwin.
- McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. 2021. *Macroeconomics*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Parkin, M. 2019. *Macroeconomics*. 13th Edition. Pearson.
- Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. 2010. *Economics*. 19th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.

BAB 4

PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh Roosganda Elizabeth

4.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan kenaikan output nasional semata, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas produksi yang berkelanjutan melalui akumulasi modal, perkembangan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi yang tepat (Todaro & Smith, 2020).

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2015–2019 relatif stabil di kisaran 5% per tahun, namun menurun drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi sebesar -2,07% (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik maupun global.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu sentral dalam analisis ekonomi makro, karena menjadi cerminan dari kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan sering dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun, persoalan yang lebih mendalam tidak hanya berhenti pada tingginya angka pertumbuhan, melainkan juga pada kualitasnya: apakah pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

4.1.1 Latar Belakang Konseptual

Konsep pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengacu pada kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Output diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, secara teoritis berarti ada peningkatan kapasitas produktif dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Akan tetapi, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan paradoks: pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Menurut Kuznets (1971), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya, yang didorong oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologis. Sementara itu, Todaro dan Smith (2020) menekankan bahwa pertumbuhan harus dipahami sebagai bagian dari proses transformasi struktural—yakni pergeseran dari ekonomi tradisional berbasis agraris menuju ekonomi modern berbasis industri dan jasa. Dengan demikian, pertumbuhan tidak sekadar fenomena statistik, melainkan proses perubahan mendasar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

4.1.2 Sejarah dan Konteks Global

Secara historis, perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat setelah Revolusi Industri di Inggris pada abad ke-18, ketika kemajuan teknologi menghasilkan lonjakan produktivitas. Pertumbuhan kemudian menjadi indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan bangsa-bangsa, khususnya setelah Perang Dunia II. Di Eropa Barat, Marshall Plan membantu pemulihan ekonomi dengan fokus pada industrialisasi dan perdagangan bebas. Sementara di Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, dan kemudian Tiongkok menjadi contoh bagaimana strategi pembangunan ekonomi yang terencana dapat mengantarkan negara pada pertumbuhan spektakuler.

Pertumbuhan ekonomi global dewasa ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi, revolusi digital, dan dinamika geopolitik. Negara-negara maju cenderung mengalami pertumbuhan moderat (sekitar 2–3% per tahun), sedangkan negara berkembang dapat tumbuh lebih cepat (5–7%) karena masih dalam tahap industrialisasi. Namun, ketidakstabilan global—seperti krisis finansial, pandemi, dan perubahan iklim—menjadi tantangan baru bagi keberlanjutan pertumbuhan.

4.1.4 Konteks Indonesia

Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi memiliki dimensi yang khas. Sejak awal Orde Baru, pemerintah menempatkan pertumbuhan sebagai prioritas pembangunan. Pertumbuhan rata-rata 7% per tahun pada era 1970–1990-an membawa transformasi ekonomi yang signifikan. Akan tetapi, krisis moneter 1997/1998 menunjukkan kerentanan sistem ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 4–6% per tahun, didorong oleh konsumsi domestik, ekspor komoditas, dan investasi. Namun demikian, tantangan masih besar: ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta keterbatasan infrastruktur. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan dengan kontraksi pertumbuhan hingga -2,07% pada 2020. Pemulihan pasca-pandemi menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia, tetapi juga menegaskan pentingnya strategi jangka panjang yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Perlu dibedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan berfokus pada **kuantitas**—peningkatan output total. Pembangunan menekankan **kualitas**—perubahan struktural, pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan tanpa pembangunan berisiko menciptakan *jobless growth*, *ruthless growth*, atau *unsustainable growth*. Oleh karena itu, dalam kajian ekonomi makro modern,

pertumbuhan harus selalu dipandang dalam kerangka pembangunan yang lebih luas.

Bab ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep dasar pertumbuhan ekonomi serta indikator yang digunakan.
2. Menguraikan teori-teori pertumbuhan dari klasik, neoklasik, hingga modern.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan.
4. Menelaah dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perbandingan global.
5. Mengidentifikasi tantangan serta strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memahami pertumbuhan ekonomi secara konseptual dan praktis, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan mengenai bagaimana suatu negara membangun fondasi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memahami kompleksitas yang menyertainya.

4.2 Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output per kapita suatu negara dalam jangka panjang (Mankiw, 2019). Beberapa definisi penting antara lain:

1. Schumpeter (1934): pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan dalam perekonomian yang ditandai dengan inovasi, perkembangan teknologi, dan dinamika kewirausahaan.
2. Kuznets (1971): pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya.
3. Todaro & Smith (2020): pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi secara terus-menerus yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional riil.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu terkait dengan output riil, jangka panjang, dan peningkatan kapasitas produksi.

4.2.1 Definisi dan Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Dalam literatur ekonomi, terdapat beberapa definisi yang sering dijadikan rujukan:

1. Kuznets (1971): pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kapasitas tersebut ditentukan oleh kemajuan teknologi, institusi, serta kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan.
2. Sukirno (2019): pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat.
3. Todaro & Smith (2020): pertumbuhan ekonomi tidak hanya peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga proses transformasi struktural, yaitu perubahan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern.

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan suatu proses dinamis jangka panjang yang mencerminkan perubahan mendasar dalam kapasitas produksi, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom dan pembuat kebijakan menggunakan beberapa indikator utama:

- 1. Produk Domestik Bruto (PDB/GDP)**
 - a. PDB adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. PDB dapat dihitung dari sisi produksi, pengeluaran, maupun pendapatan.
 - b. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dari persentase kenaikan PDB riil (yaitu PDB yang telah disesuaikan dengan inflasi).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- a. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
- b. Penting dalam menganalisis kesenjangan antarwilayah.

3. Pendapatan per Kapita

- a. Dihitung dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
- b. Menjadi indikator rata-rata kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- Bukan indikator langsung, tetapi penting untuk melihat kualitas pertumbuhan. IPM mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

5. Indeks Gini

- Mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya disertai penurunan ketimpangan.

4.2.3 Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering kali disamakan dengan pembangunan ekonomi, padahal keduanya berbeda.

1. Pertumbuhan Ekonomi:

Fokus pada peningkatan output barang dan jasa (kuantitatif).
→ Contoh: PDB Indonesia tumbuh 5% per tahun.

2. Pembangunan Ekonomi:

Menekankan pada perubahan struktural dan perbaikan kualitas hidup masyarakat (kualitatif).

→ Contoh: peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, akses layanan kesehatan, serta kesetaraan gender.

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan tanpa pembangunan hanya akan melahirkan *jobless growth* (pertumbuhan tanpa lapangan kerja), *ruthless growth* (pertumbuhan tanpa pemerataan), dan *unsustainable growth* (pertumbuhan yang merusak lingkungan).

4.2.4 Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan:

- Jika PDB Indonesia tahun 2022 sebesar Rp19.588 triliun, dan PDB tahun 2021 sebesar Rp18.366 triliun, maka:

$$\frac{19.588 - 18.366}{18.366} \times 100\% = 6,65\%$$

Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sekitar 6,65% (angka ini berbeda dengan data BPS yang menyatakan 5,3% karena perbedaan basis perhitungan).

4.2.5 Jenis Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekstensif

- Dicapai melalui penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal.
- Biasanya terjadi pada tahap awal pembangunan.

2. Pertumbuhan Intensif

- Dicapai melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan teknologi.
- Lebih berkelanjutan karena tidak hanya bergantung pada penambahan input, tetapi pada peningkatan kualitas produksi.

4.2.6 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Historis

Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami beberapa fase penting:

1. *Revolusi Industri (abad ke-18)*: lonjakan pertumbuhan akibat mesin uap dan industrialisasi.
2. *Era Pasca Perang Dunia II*: pertumbuhan pesat di negara-negara maju dengan bantuan program rekonstruksi.
3. *East Asian Miracle (1960–1990)*: pertumbuhan tinggi di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan kemudian Tiongkok.
4. *Era Globalisasi (2000–sekarang)*: pertumbuhan dipengaruhi oleh teknologi digital, perdagangan bebas, dan integrasi pasar keuangan global.

Indonesia sendiri telah melalui dinamika pasang surut:

- 1) Masa Orde Baru: pertumbuhan tinggi namun bergantung pada minyak dan utang luar negeri.
- 2) Krisis 1997/1998: kontraksi besar.
- 3) Reformasi hingga kini: pertumbuhan relatif stabil, namun menghadapi tantangan struktural.

4.2.7 Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi penting karena:

1. Meningkatkan Pendapatan Nasional – memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik.
2. Menyediakan Lapangan Kerja – mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup.
3. Mengurangi Kemiskinan – melalui efek trickle down, meskipun tidak otomatis.
4. Meningkatkan Daya Saing Global – negara dengan pertumbuhan tinggi lebih mampu menarik investasi.
5. Menjadi Basis Pembangunan Berkelanjutan – jika diarahkan ke sektor ramah lingkungan dan inklusif.

Dengan demikian, konsep dasar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terbatas pada peningkatan output barang dan jasa, tetapi juga mencakup dimensi transformasi struktural, distribusi, serta keberlanjutan. Pemahaman yang komprehensif mengenai definisi, indikator, jenis, dan cara perhitungan pertumbuhan menjadi landasan penting untuk menganalisis kondisi ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia.

Dengan kerangka konseptual yang jelas, kita dapat melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu teori-teori pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor mendasar penyebab pertumbuhan dalam jangka panjang.

4.3 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang kompleks, sehingga berbagai ekonom telah mencoba menjelaskan faktor-faktor penyebabnya melalui teori-teori yang berbeda. Teori pertumbuhan ekonomi tidak hanya menggambarkan mekanisme

peningkatan output, tetapi juga memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan.

Secara garis besar, teori pertumbuhan dapat dikelompokkan menjadi empat aliran besar: teori klasik, teori neoklasik, teori pertumbuhan endogen, dan teori modern berbasis inovasi (Schumpeterian).

4.3.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus memberikan kontribusi awal dalam memahami pertumbuhan ekonomi.

1. Adam Smith (1776)

- a. Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Smith menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of labor*) yang meningkatkan produktivitas.
- b. Mekanisme pasar bebas dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui *invisible hand*.
- c. Pertumbuhan didorong oleh akumulasi modal, perluasan pasar, dan spesialisasi tenaga kerja.

2. David Ricardo (1817)

- a. Menekankan hukum hasil yang menurun (*diminishing returns*) terutama pada lahan pertanian.
- b. Menurut Ricardo, pertumbuhan akan melambat seiring dengan bertambahnya populasi karena keterbatasan lahan.
- c. Solusi yang ditawarkan adalah perdagangan internasional (teori keunggulan komparatif).

3. Thomas Malthus (1798)

- a. Dalam *Essay on the Principle of Population*, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan, sehingga akan timbul kelaparan dan kemiskinan.
- b. Walaupun pandangan ini banyak dikritik, konsep tekanan penduduk tetap relevan dalam diskusi modern tentang ketahanan pangan.

Kritik terhadap Teori Klasik:

1. Terlalu pesimistis terhadap peran teknologi.
2. Kurang mempertimbangkan inovasi sebagai faktor pendorong pertumbuhan jangka panjang.

4.3.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan Model)

Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan (1956). Model neoklasik menekankan tiga faktor utama: modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), dan teknologi (*technology*).

1. Persamaan produksi ditulis dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

di mana Y adalah output, A teknologi, K modal, dan L tenaga kerja.

2. Hasil utama teori Solow-Swan:

1. Pertumbuhan jangka panjang hanya bisa dipertahankan melalui kemajuan teknologi.
2. Negara miskin akan tumbuh lebih cepat dibanding negara kaya jika memiliki tingkat tabungan yang sama → fenomena konvergensi ekonomi.
3. Tabungan dan investasi penting untuk meningkatkan akumulasi modal.

Kelebihan teori ini: memberikan kerangka matematis sederhana yang menjelaskan dinamika pertumbuhan.

Kelemahannya: menganggap teknologi sebagai faktor eksogen yang muncul “dari luar sistem ekonomi.”

4.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Pada 1980-an muncul teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer (1986) dan Robert Lucas (1988). Teori ini merupakan kritik terhadap model Solow.

1. Menurut teori ini, teknologi tidak eksogen melainkan hasil dari aktivitas ekonomi itu sendiri, terutama melalui:
 - a. Investasi dalam pengetahuan dan riset.
 - b. Pendidikan dan modal manusia (*human capital*).
 - c. Inovasi dan kewirausahaan.

2. Model pertumbuhan endogen menekankan bahwa kebijakan publik (misalnya subsidi riset, insentif pendidikan, penguatan hak paten) dapat memengaruhi pertumbuhan jangka panjang.
3. Kontribusi utama teori ini:
 4. Menjelaskan mengapa negara maju bisa terus tumbuh (karena investasi pada R&D dan SDM).
 5. Menunjukkan bahwa perbedaan kualitas institusi, kebijakan, dan inovasi menyebabkan **divergensi** pertumbuhan antarnegara.

4.3.4 Teori Schumpeterian dan Inovasi

Joseph Schumpeter (1934, 1942) memperkenalkan konsep "*creative destruction*".

1. Pertumbuhan ekonomi terjadi melalui inovasi yang dilakukan oleh pengusaha (*entrepreneur*).
2. Inovasi dapat berupa:
 - a. Penemuan produk baru.
 - b. Proses produksi baru.
 - c. Pembukaan pasar baru.
 - d. Sumber bahan baku baru.
 - e. Bentuk organisasi baru.
3. Proses inovasi ini akan menghancurkan teknologi lama (destruksi kreatif), namun sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi.

Dalam konteks modern, teori Schumpeter sangat relevan untuk menjelaskan peran startup, teknologi digital, dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan.

4.3.5 Teori Pertumbuhan Strukturalis

Selain teori-teori di atas, terdapat teori **strukturalis** (Lewis, 1954) yang menekankan transformasi struktural dari sektor tradisional (pertanian subsisten) ke sektor modern (industri).

1. Menurut model Lewis, pertumbuhan didorong oleh perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri, di mana produktivitas lebih tinggi.

2. Pertumbuhan berlanjut sampai surplus tenaga kerja di sektor tradisional habis.

4.3.6 Relevansi Teori dalam Konteks Indonesia

1. Teori Klasik → relevan untuk menjelaskan keterbatasan lahan pertanian dan masalah demografi di Indonesia.
2. Teori Neoklasik (Solow-Swan) → sesuai untuk menganalisis peran investasi dan tabungan nasional.
3. Teori Endogen → sangat relevan untuk menjelaskan pentingnya pendidikan, riset, inovasi, dan kebijakan pemerintah.
4. Teori Schumpeterian → dapat menjelaskan kebangkitan ekonomi digital Indonesia (Gojek, Tokopedia, dsb.) sebagai motor pertumbuhan baru.
5. Teori Strukturalis → cocok melihat transformasi ekonomi Indonesia dari agraris menuju industri dan jasa.

Dengan demikian, teori pertumbuhan ekonomi memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana suatu negara dapat mencapai peningkatan output jangka panjang.

1. Ekonom klasik menekankan akumulasi modal dan keterbatasan sumber daya.
2. Ekonom neoklasik menyoroti peran teknologi dan tabungan.
3. Ekonom endogen menjelaskan bahwa inovasi, pendidikan, dan modal manusia adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan.
4. Schumpeter menekankan pentingnya inovasi dan kewirausahaan.
5. Teori strukturalis menekankan transformasi sektor ekonomi.

Pemahaman berbagai teori ini penting karena tidak ada satu teori pun yang sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kombinasi pendekatan teoretis dan implementasi kebijakan yang tepat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:

1. Sumber Daya Alam (SDA): ketersediaan tanah, air, mineral, energi, dll.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): kualitas pendidikan, keterampilan, produktivitas.
3. Akumulasi Modal: investasi dalam infrastruktur, mesin, dan teknologi.
4. Kemajuan Teknologi: inovasi digital, pertanian modern, dan industrialisasi.
5. Kebijakan Pemerintah: regulasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional.
6. Stabilitas Politik dan Sosial: kondisi keamanan dan tata kelola pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi yang kompleks antara berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Sejak awal pengembangan teori pertumbuhan, para ekonom telah berusaha mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor tersebut tidak hanya terbatas pada akumulasi modal atau perkembangan teknologi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, kebijakan, serta kondisi sosial dan politik.

4.4.1 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) sering kali dianggap sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi, terutama pada tahap awal industrialisasi. Negara yang kaya akan SDA, seperti minyak, gas, batu bara, atau lahan pertanian yang subur, berpotensi meningkatkan pertumbuhan melalui ekspor komoditas.

Namun, fenomena yang disebut *resource curse* (kutukan sumber daya) menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak selalu membawa pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanpa manajemen yang baik, ketergantungan pada SDA dapat memicu ketidakstabilan

ekonomi, fluktuasi harga, hingga lemahnya diversifikasi. Indonesia sendiri menghadapi dilema ini, terutama pada periode ketergantungan terhadap minyak bumi pada dekade 1970-an.

4.4.2 Akumulasi Modal

Modal fisik seperti mesin, infrastruktur, dan teknologi produksi merupakan kunci dalam memperbesar kapasitas output. Investasi yang konsisten dapat mempercepat pertumbuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Model Harrod-Domar yang menekankan peran tabungan dan investasi dalam meningkatkan output nasional.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur besar-besaran melalui program Tol Laut dan jalan tol trans-Jawa telah menjadi salah satu upaya untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik. Dengan demikian, akumulasi modal bukan hanya soal jumlah, tetapi juga efisiensi dalam penggunaannya.

4.4.3 Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor fundamental dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia menghadapi tantangan dalam aspek ini. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Beasiswa LPDP adalah contoh implementasi kebijakan untuk memperbaiki kualitas SDM dalam jangka panjang.

4.4.4 Kemajuan Teknologi

Teknologi berperan sebagai katalis utama dalam menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam kerangka Model Pertumbuhan Solow-Swan, teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang mendorong pertumbuhan jangka panjang setelah akumulasi modal mencapai titik diminishing return.

Era digital saat ini memperlihatkan betapa pentingnya inovasi teknologi. Adopsi *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data memungkinkan peningkatan efisiensi di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri jasa. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital dengan munculnya unicorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka merupakan bukti nyata kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.5 Stabilitas Politik dan Kelembagaan

Institusi yang kuat dan stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Teori Institusionalisme dari Douglass C. North menekankan bahwa kualitas lembaga, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Indonesia, dengan sistem demokrasi yang relatif stabil, masih menghadapi tantangan dalam hal korupsi, birokrasi yang lambat, dan kepastian hukum. Upaya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

4.4.6 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memberikan peluang bagi suatu negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Teori David Ricardo tentang keunggulan komparatif menunjukkan bahwa dengan spesialisasi dan perdagangan, negara dapat mencapai efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem autarki.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan batu bara. Namun, untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, diperlukan diversifikasi ekspor berbasis manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi. Program Making Indonesia 4.0 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

4.4.7 Faktor Sosial dan Budaya

Nilai-nilai sosial, etika kerja, serta budaya juga berperan penting dalam memengaruhi pertumbuhan. Max Weber dalam

karyanya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* menekankan bagaimana etika kerja dan budaya dapat mendorong perkembangan kapitalisme di Eropa.

Dalam konteks Indonesia, budaya gotong royong dan semangat kewirausahaan lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi keuangan dan preferensi konsumtif perlu diatasi agar tidak menghambat pertumbuhan.

4.4.8 Faktor Lingkungan dan Keberlanjutan

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan dapat mengancam masa depan. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan hijau (*green growth*) menjadi penting untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam isu lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran udara, dan degradasi lahan. Upaya transisi menuju ekonomi hijau melalui energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta kebijakan karbon menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai elemen: SDA, modal, SDM, teknologi, kelembagaan, perdagangan, budaya, hingga lingkungan. Interaksi antar faktor ini menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, penguatan kualitas SDM, adopsi teknologi, pengelolaan SDA secara berkelanjutan, serta reformasi kelembagaan menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.5 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Riil: nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri dengan harga konstan.

2. Produk Nasional Bruto (PNB): PDB ditambah pendapatan bersih dari luar negeri.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): ukuran pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah/provinsi.

Rumus pertumbuhan ekonomi:

$$g = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Contoh:

Tabel 4.1. Pertumbuhan PDB Indonesia 2018–2023

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05

(Sumber: BPS, 2023)

4.6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan struktural, seperti ketergantungan pada sektor primer (pertanian, pertambangan), tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, dan rendahnya produktivitas. Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan stabil dengan dukungan sektor jasa, konsumsi rumah tangga, dan investasi asing (World Bank, 2022).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan topik penting dalam kajian makroekonomi karena mencerminkan bagaimana perekonomian nasional bergerak dari waktu ke waktu. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik maupun global, seperti ketersediaan

sumber daya alam, perkembangan sektor industri dan jasa, kebijakan pemerintah, hingga stabilitas politik dan keamanan.

4.6.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

1. Sejak masa kemerdekaan hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada era 1970-an hingga 1990-an, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi berkat booming komoditas minyak bumi dan program industrialisasi yang dicanangkan pemerintah. Namun, krisis moneter Asia tahun 1997/1998 menjadi titik balik yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -13,1% pada tahun 1998.
2. Pasca krisis, perekonomian Indonesia mulai pulih dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di kisaran 4–6% per tahun. Stabilitas makroekonomi yang lebih baik, reformasi kelembagaan, serta meningkatnya peran sektor swasta turut mendorong kinerja ekonomi nasional.
3. Memasuki abad ke-21, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit (CPO), dan karet. Meskipun demikian, ketergantungan pada komoditas seringkali membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap gejolak harga global.

4.6.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Reformasi

1. Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia terus berkembang, meskipun tidak terlepas dari tantangan global. Beberapa catatan penting antara lain:
2. Era 2000-an Awal: Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, didorong oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas.
3. Krisis Keuangan Global 2008: Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 4,6%, lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, berkat basis konsumsi domestik yang kuat.
4. Dekade 2010-an: Pertumbuhan relatif stabil di kisaran 5%, dengan peningkatan investasi asing, pembangunan infrastruktur, dan digitalisasi ekonomi.

5. Pandemi COVID-19 (2020): Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%, pertama kali sejak krisis 1998. Namun, pada 2021 perekonomian kembali tumbuh 3,7% dan pada 2022 mencapai 5,3%, didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan ekspor, dan akselerasi digital.

4.6.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Beberapa sektor utama yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional antara lain:

1. Sektor Pertanian: Menjadi basis ketahanan pangan, terutama pada masa krisis.
2. Sektor Industri Pengolahan: Menjadi motor pertumbuhan, terutama industri manufaktur dan otomotif.
3. Sektor Jasa: Meningkatkan pesat seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, misalnya sektor keuangan, perdagangan elektronik, dan transportasi.
4. Sektor Pertambangan dan Energi: Memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor, meskipun rentan terhadap volatilitas harga global.

4.6.4 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, antara lain:

1. Ketergantungan pada Komoditas: Membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.
2. Kesenjangan Pembangunan: Pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di Jawa, sementara kawasan timur Indonesia masih tertinggal.
3. Tingkat Produktivitas: Masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
4. Kualitas SDM: Pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan era industri 4.0.
5. Birokrasi dan Regulasi: Reformasi kelembagaan dan penyederhanaan perizinan masih menjadi agenda penting untuk meningkatkan iklim investasi.

4.6.5 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di masa depan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi:

- 1. Bonus Demografi: Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi dapat menjadi motor pertumbuhan apabila dikelola dengan baik.
- 2. Transformasi Digital: Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
- 3. Pembangunan Infrastruktur: Investasi pemerintah dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi akan meningkatkan daya saing ekonomi.
- 4. *Green Economy*: Peralihan menuju energi terbarukan dan praktik ekonomi berkelanjutan dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan.

4.6.6 Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tabel berikut menyajikan ringkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir:

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Catatan Penting
1998	-13,1	Krisis moneter Asia
2005	5,7	Pemulihan pasca krisis
2008	6,0	Menjelang krisis global
2009	4,6	Dampak krisis global
2013	5,6	Peningkatan investasi
2015	4,9	Penurunan harga komoditas
2019	5,0	Stabil pra-pandemi
2020	-2,07	Pandemi COVID-19
2022	5,3	Pemulihan ekonomi
2023	±5,0	Pertumbuhan stabil

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun menghadapi berbagai krisis, perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan yang cukup kuat, dengan tren pertumbuhan positif dalam jangka menengah dan panjang.

4.7 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Perkembangan ilmu ekonomi setelah era klasik dan neoklasik mendorong lahirnya berbagai teori pertumbuhan ekonomi modern yang lebih komprehensif, dengan memasukkan faktor teknologi, peran kebijakan publik, inovasi, dan aspek kelembagaan. Teori-teori ini lahir sebagai respon atas keterbatasan model sebelumnya, yang sering dianggap terlalu menekankan pada modal dan tenaga kerja, serta mengasumsikan adanya kondisi pasar yang sempurna.

Secara umum, teori pertumbuhan modern berupaya menjelaskan mengapa negara-negara mengalami perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi, apa yang menjadi faktor penentu keberlanjutan pertumbuhan, serta bagaimana kebijakan pemerintah dan dinamika global dapat memengaruhi proses pembangunan ekonomi jangka panjang.

Beberapa teori utama dalam kerangka modern antara lain sebagai berikut:

4.7.1 Model Harrod-Domar

Model Harrod-Domar, yang sering disebut sebagai *post-Keynesian growth model*, menekankan pentingnya tabungan dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung pada:

1. **Rasio tabungan masyarakat** – semakin tinggi tingkat tabungan, semakin besar modal yang dapat diinvestasikan.
2. **Produktivitas investasi** (incremental capital-output ratio / ICOR) – semakin efisien investasi dalam menghasilkan output, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Rumus sederhananya:

$$g = \frac{s}{ICOR}$$

dengan g adalah tingkat pertumbuhan, s adalah rasio tabungan, dan $ICOR$ adalah rasio tambahan modal terhadap tambahan output.

Model ini banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia pada awal Orde Baru, karena memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai kebutuhan investasi. Namun, kelemahannya adalah asumsi yang terlalu kaku, seperti produktivitas modal yang konstan dan ketidakmampuan menjelaskan faktor teknologi serta kualitas sumber daya manusia.

4.7.2 Model Solow-Swan (Neoklasik)

Model pertumbuhan Solow-Swan (1956) memperbaiki kelemahan Harrod-Domar dengan memasukkan faktor kemajuan teknologi sebagai determinan penting pertumbuhan jangka panjang. Model ini berasumsi bahwa perekonomian akan menuju ke titik *steady state* di mana pertumbuhan output hanya ditentukan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Poin penting model Solow-Swan:

1. Akumulasi modal memiliki *diminishing returns* (pengembalian yang menurun).
2. Pertumbuhan jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada tabungan dan investasi.
3. Teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang menentukan produktivitas.

Implikasinya, negara berkembang yang meningkatkan tabungan dan investasi hanya dapat mengejar negara maju hingga batas tertentu. Tanpa adanya inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

4.7.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Berbeda dengan Solow yang menganggap teknologi sebagai faktor eksternal (*exogenous*), teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) yang dikembangkan oleh Paul Romer (1986, 1990) dan Robert Lucas (1988) berpendapat bahwa

kemajuan teknologi justru dihasilkan oleh aktivitas ekonomi itu sendiri, seperti:

1. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan).
3. Inovasi dan difusi pengetahuan.

Teori ini menjelaskan mengapa negara yang memiliki kapasitas inovasi lebih tinggi dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan insentif untuk inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penyediaan infrastruktur pendidikan dan penelitian.

4.7.4 Teori Schumpeterian (Inovasi dan Kewirausahaan)

Joseph Schumpeter menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari inovasi dan proses kewirausahaan. Menurutnya, perkembangan ekonomi bukan hanya proses linier, tetapi juga melalui *creative destruction*, yaitu mekanisme di mana inovasi baru menggantikan teknologi lama.

Contohnya dapat dilihat pada perkembangan industri digital: layanan transportasi berbasis aplikasi menggantikan sistem konvensional, atau e-commerce yang menggeser dominasi toko ritel tradisional. Dalam konteks Indonesia, munculnya startup digital seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka mencerminkan pentingnya inovasi dalam pertumbuhan ekonomi modern.

4.7.5 Teori Kelembagaan (*Institutional Economics*)

Teori pertumbuhan modern juga menggarisbawahi peran kelembagaan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Douglas North (1990), institusi—baik formal (aturan hukum, kebijakan pemerintah) maupun informal (norma sosial, budaya)—mempengaruhi insentif dan perilaku ekonomi.

Negara dengan kelembagaan yang kuat (misalnya penegakan hukum yang adil, perlindungan hak milik, dan birokrasi yang efisien) akan lebih mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat

menimbulkan praktik korupsi, ketidakpastian hukum, dan inefisiensi ekonomi.

4.7.6 Implikasi Teori Modern bagi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori pertumbuhan modern menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan investasi fisik, tetapi juga harus menekankan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi ekonomi.
3. Reformasi kelembagaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan.
4. Kebijakan inklusif yang mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah.

Dengan demikian, Teori-teori pertumbuhan ekonomi modern memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana perekonomian berkembang dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi, inovasi, institusi, serta modal manusia. Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi dan akumulasi modal, sedangkan Solow-Swan memperluas pandangan tersebut dengan memasukkan peran teknologi dan diminishing return. Lebih lanjut, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer dan Lucas menggarisbawahi bahwa inovasi, penelitian dan pengembangan (R&D), serta kualitas sumber daya manusia dapat menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dari dalam sistem ekonomi itu sendiri.

Juga teori-teori pertumbuhan modern memberikan kerangka analisis yang lebih luas dan realistis untuk memahami dinamika pembangunan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Teori-teori pertumbuhan modern tidak hanya menjelaskan mekanisme akumulasi faktor produksi, tetapi juga menyoroti pentingnya pendidikan, keterampilan, kebijakan pemerintah, stabilitas makroekonomi, serta lingkungan institusional dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Pemahaman ini relevan

bagi Indonesia dalam merumuskan strategi pembangunan yang tidak semata mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga investasi dalam inovasi, teknologi, dan penguatan modal manusia untuk meningkatkan daya saing di era global.

4.8 Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kinerja suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, dampak pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat positif semata. Ada sisi lain yang perlu dicermati, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

4.8.1 Dampak Positif Pertumbuhan Ekonomi

1. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi mendorong meningkatnya output nasional yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat sehingga daya beli juga membaik.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan bertambahnya kegiatan produksi, permintaan tenaga kerja ikut meningkat. Hal ini berdampak pada berkurangnya pengangguran, yang selanjutnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Perbaikan Infrastruktur dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah dan swasta untuk memperbesar investasi, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dampaknya adalah terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi jangka panjang.

4. Peningkatan Kualitas Hidup

Pertumbuhan ekonomi memberikan peluang bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang lebih baik. Dengan

demikian, kualitas hidup dan Human Development Index (HDI) meningkat.

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat membaik seiring dengan akses yang lebih luas terhadap layanan publik.

6. Mendorong Investasi dan Inovasi

Perekonomian yang tumbuh menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga investor domestik maupun asing lebih tertarik menanamkan modal. Selain itu, kompetisi dalam pasar juga mendorong inovasi teknologi yang berimplikasi pada efisiensi produksi.

7. Ekspansi Kesempatan Kerja

Peningkatan aktivitas ekonomi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, sehingga memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

8. Peningkatan Kapasitas Fiskal Negara

Pertumbuhan ekonomi memperbesar penerimaan pajak negara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

4.8.2 Dampak Negatif Pertumbuhan Ekonomi

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkadang, pertumbuhan lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi.

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu fokus pada peningkatan output seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan degradasi lingkungan, deforestasi, dan krisis energi.

3. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Aktivitas industri dan pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan polusi udara, air, dan tanah. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat.

4. Urbanisasi yang Tidak Terkendali dan Masalah Sosial

Pertumbuhan ekonomi biasanya terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga memicu urbanisasi besar-besaran. Apabila tidak diimbangi dengan perencanaan tata kota yang baik, mengakibatkan munculnya masalah sosial seperti kepadatan penduduk, pengangguran perkotaan, kemacetan, pemukiman kumuh, kemacetan, dan meningkatnya kriminalitas.

5. Inflasi Struktural

Pertumbuhan ekonomi yang cepat kadang menimbulkan tekanan inflasi akibat permintaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan produksi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat.

6. Ketergantungan pada Modal Asing

Jika pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh investasi asing, maka risiko ketergantungan meningkat. Hal ini dapat mengurangi kedaulatan ekonomi nasional dan membuat negara rentan terhadap gejolak global.

4.8.3 Implikasi Kebijakan

Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif pertumbuhan ekonomi, diperlukan strategi pembangunan yang berimbang, antara lain:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memperhatikan pemerataan.
2. Mengedepankan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan.
3. Mengintegrasikan kebijakan sosial dengan ekonomi, misalnya melalui program perlindungan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan.
4. Mengembangkan ekonomi berbasis digital dan hijau sebagai fondasi pertumbuhan di masa depan. Mengoptimalkan

kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem pajak progresif dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

5. Mendorong pembangunan ramah lingkungan dengan konsep *green economy* dan energi terbarukan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dengan demikian, dampak pertumbuhan ekonomi bersifat dua sisi: di satu pihak membawa kemajuan berupa peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kualitas hidup; namun di pihak lain menimbulkan tantangan berupa ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kenaikan PDB, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi membawa dampak multidimensi. Di satu sisi, ia menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas fiskal negara. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan dapat menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada modal asing. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

4.9 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan indikator penting bagi kesejahteraan suatu negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul kesadaran global bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka Produk Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka

panjang. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) hadir untuk menjawab dilema antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam serta ancaman kerusakan lingkungan.

4.9.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam laporan Brundtland Report (1987) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya menekankan aspek kuantitatif (angka pertumbuhan), tetapi juga aspek kualitatif seperti pemerataan, inklusivitas, dan kelestarian lingkungan.

1. Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah:
2. **Ekonomi** – pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.
3. **Sosial** – pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial.
4. **Lingkungan** – pelestarian sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan mitigasi perubahan iklim.
5. Ketiga aspek ini harus berjalan secara harmonis agar pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan masalah sosial maupun ekologis di masa depan.

4.9.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi seringkali berhubungan erat dengan eksploitasi sumber daya alam. Model pembangunan yang menekankan industrialisasi tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan degradasi hutan, pencemaran udara dan air, serta emisi gas rumah kaca. Fenomena ini kemudian menimbulkan paradoks, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dapat merugikan kualitas hidup masyarakat karena kerusakan ekologi.

Konsep *Environmental Kuznets Curve* (EKC) menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan peningkatan degradasi lingkungan. Namun, setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, kesadaran

masyarakat dan kebijakan pemerintah mendorong perbaikan kualitas lingkungan seiring dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

4.9.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Selain PDB, kini banyak negara menggunakan indikator tambahan untuk mengukur keberlanjutan pertumbuhan, antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI): menilai aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
2. Green GDP: menghitung PDB dengan memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam.
3. *Sustainable Development Goals* (SDGs): agenda global yang mencakup 17 tujuan, termasuk pengentasan kemiskinan, energi bersih, dan aksi iklim.

Indonesia sendiri telah mengintegrasikan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan fokus pada pembangunan inklusif dan ramah lingkungan.

4.9.4 Tantangan dan Peluang bagi Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam (batubara, kelapa sawit, dan tambang).
2. Tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lahan.
3. Masalah polusi udara di perkotaan.
4. Kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah.

Namun, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti:

1. Pemanfaatan energi terbarukan (surya, angin, hidro, biomassa).
2. Pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mendukung ketahanan pangan.

3. Ekonomi sirkular (*circular economy*) yang menekankan daur ulang dan pengurangan limbah.
4. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) yang membuka lapangan kerja baru sekaligus melestarikan lingkungan.

4.9.5 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah perlu:

1. Mendorong **diversifikasi ekonomi** agar tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
2. Menerapkan **kebijakan fiskal hijau**, misalnya insentif pajak untuk energi bersih dan disinsentif bagi kegiatan pencemar lingkungan.
3. Mengembangkan **teknologi ramah lingkungan** dan digitalisasi ekonomi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung SDGs.

Dengan demikian, Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi jika direncanakan dengan baik. Pertumbuhan yang hanya mengejar angka PDB tanpa memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan sosial akan membawa konsekuensi serius di masa depan. Sebaliknya, pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian alam, dan keadilan sosial, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

4.10 Penutup

Bahasan komprehensif konsep pertumbuhan ekonomi dari berbagai perspektif, mulai dari definisi dasar, pengukuran, teori-teori klasik dan modern, hingga aplikasinya dalam konteks Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menggambarkan peningkatan kapasitas suatu perekonomian

dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan, yang tercermin dari indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita.

Melalui kajian berbagai faktor penentu, kita memahami bahwa pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh modal fisik, tenaga kerja, dan akumulasi modal manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, inovasi, serta integrasi dengan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembahasan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik hingga modern menegaskan bahwa setiap teori memiliki relevansinya sesuai dengan konteks waktu dan ruang. Misalnya, teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi, teori Solow akumulasi modal-teknologi, sementara teori endogen menyoroti peran inovasi, pengetahuan, dan institusi dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Konteks Indonesia menunjukkan dinamika yang khas, di mana pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir relatif stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, serta kerentanan terhadap krisis global. Oleh karena itu, strategi pembangunan di Indonesia tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan, tetapi juga pada inklusivitas, pengurangan kemiskinan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam kajian ekonomi makro, tetapi bukanlah satu-satunya tujuan. Pertumbuhan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pemerataan, kualitas hidup, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang teori, faktor, dan dampak pertumbuhan ekonomi akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa, peneliti, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I. (1961). *Theories of Economic Growth and Development*. Stanford: Stanford University Press.
- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth* (2nd ed.). Cambridge: MIT Press.
- BPS. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023*. Badan Pusat Statistik.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2014). *Macroeconomics* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *The American Economic Review*, 63(3), 247–258.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (11th ed.). New York: Worth Publishers.
- Meier, G. M., & Rauch, J. E. (2005). *Leading Issues in Economic Development* (8th ed.). New York: Oxford University Press.
- Ranis, G., & Fei, J. C. H. (1961). A Theory of Economic Development. *American Economic Review*, 51(4), 533–565.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UN Dev.Programme.
- World Bank. (2023). *World Development Indicators*. Washington, D.C.: World Bank.

BAB 5

KESEIMBANGAN PASAR UANG DAN BARANG

Oleh Unang Atmaja

5.1 Pendahuluan

Dinamika interaksi antara pasar uang dan barang merupakan aspek penting dalam perekonomian modern. Kedua pasar saling mempengaruhi dan membentuk sistem ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami bagaimana keseimbangan antara keduanya terbentuk sangat diperlukan, terutama dalam sektor agrobisnis yang peka terhadap pergerakan suku bunga dan tingkat pendapatan masyarakat.

Contohnya, petani seringkali membutuhkan akses pendanaan untuk membeli benih, pupuk, atau alat tani lainnya. Sementara itu, pelaku ekspor produk pertanian dipengaruhi fluktuasi nilai tukar. Dalam kondisi seperti ini, interaksi antara pasar uang dan barang menjadi jelas. Suku bunga tinggi dapat menghambat investasi di sektor pertanian, sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong permintaan produk pertanian, yang kemudian akan mempengaruhi produksi dan distribusi.

Sesuai pandangan Mankiw (2019), keseimbangan simultan yang tercipta antara pasar keuangan dan barang akan menghasilkan kondisi yang dikenal sebagai keseimbangan umum dalam ekonomi makro. Dalam kerangka ini, interaksi kedua pasar memainkan peran penting dalam menentukan output nasional dan suku bunga yang berlaku di suatu negara.

5.2 Konsep Dasar Pasar Uang

5.2.1 Pengertian dan Karakteristik Pasar Uang

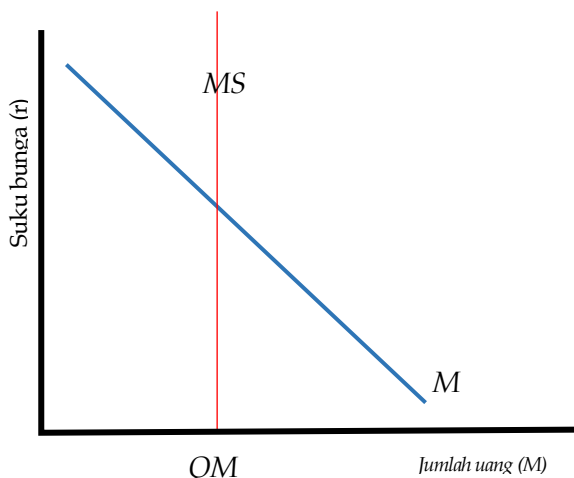
Pasar uang merupakan suatu mekanisme di mana instrumen keuangan jangka pendek diperjualbelikan, biasanya dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Dalam kerangka ekonomi makro,

pasar uang lebih merujuk pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang dalam suatu perekonomian.

Penawaran uang (*money supply*) dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Bank Indonesia yang mengatur jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti operasi pasar terbuka (*open market operation*), suku bunga acuan (BI Rate), serta ketentuan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan.

Sementara itu, permintaan uang timbul dari tiga motif utama sebagaimana dijelaskan oleh Keynes, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga (*precautionary*), dan motif spekulasi. Dalam konteks agribisnis, motif transaksi cenderung lebih dominan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pelaku usaha agribisnis terhadap uang tunai untuk mendanai aktivitas operasional harian, seperti pembelian input produksi (bibit, pupuk, dan pakan), pembayaran upah buruh tani, serta biaya logistik dan distribusi produk

5.2.2 Kurva Permintaan dan Penawaran Uang



Gambar 5.1. Keseimbangan Pasar Uang

Kurva penawaran uang dibentuk dalam kondisi vertikal karena jumlah uang yang beredar di pasar sepenuhnya ditentukan oleh

otoritas moneter dan tidak tergantung secara langsung pada suku bunga nominal. Artinya, penawaran uang bersifat kaku dalam periode pendek. Elastisitas penawaran uang terhadap suku bunga tertentu tak terhingga. Dengan kata lain, kurva penawaran uang mencerminkan pandangan eksogen pada kebijakan moneter Bank Indonesia.

Sebaliknya, kurva permintaan uang memiliki kemiringan negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka permintaan terhadap uang akan semakin rendah terutama dalam spekulasi. Hal ini sejalan dengan teori Keynesian, di mana suku bunga yang lebih tinggi akan mendorong masyarakat untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk aset finansial daripada uang tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Warjiyo (2016) menggambarkan bahwa elastisitas permintaan uang terhadap suku bunga di Indonesia relatif rendah. Temuan tersebut membuktikan bahwa motif transaksi lebih dominan mendorong permintaan uang di Indonesia daripada motif spekulasi. Penalaran tersebut sesuai dengan dominannya penawaran uang di sektor riil ekonomi nasional yang bersifat transaksi tunai baik dalam komersialisasi produk pertanian dan kebudayaan pedesaan.

5.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan Pasar Uang

Keseimbangan dalam pasar uang dipengaruhi oleh berbagai faktor berpengaruh yang memainkan peranan penting dalam menentukan interaksi yang dinamis antara penawaran dan permintaan uang. Beberapa faktor utama tersebut adalah:

1. *Kebijakan Moneter Nasional*: Bank sentral memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan moneter, salah satunya adalah operasi pasar terbuka. Ketika Bank Indonesia, misalnya, membeli surat berharga pemerintah dengan aktif, maka likuiditas di pasar meningkat secara signifikan. Kondisi ini cenderung menekan tingkat suku bunga dan mendorong percepatan aktivitas ekonomi.
2. *Tingkat Pendapatan Masyarakat*: Peningkatan pendapatan nasional umumnya akan meningkatkan permintaan uang,

terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Dalam konteks agribisnis, apabila harga komoditas pertanian meningkat tajam, maka pendapatan petani pun ikut melonjak. Dampaknya, kebutuhan terhadap uang tunai untuk membeli kebutuhan pokok maupun input produksi juga mengalami kenaikan yang cukup besar.

3. *Ekspektasi terhadap Tingkat Inflasi*: Anticipasi masyarakat terhadap laju inflasi turut memengaruhi persepsi mereka terhadap nilai uang. Ketika inflasi diperkirakan meningkat tajam, masyarakat cenderung mengurangi kepemilikan uang tunai karena nilai riilnya diprediksi akan turun drastis. Sebagai solusi, mereka beralih ke bentuk kekayaan alternatif yang diyakini lebih aman, seperti emas, properti, atau komoditas unggulan.
4. *Perkembangan Teknologi Keuangan Digital*: Inovasi dalam sistem pembayaran digital, seperti uang elektronik (e-money), dompet virtual, dan transaksi berbasis superapps, kian hari kian mempengaruhi pola permintaan masyarakat terhadap uang tunai, terutama di perkotaan. Masyarakat urban semakin terbiasa melakukan pembayaran secara digital, sehingga kebutuhan akan uang fisik menjadi relatif menurun.

5.3 Konsep Dasar Pasar Barang

5.3.1 Keseimbangan Pasar Barang dalam Model IS

Pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila total belanja agregat setara dengan pendapatan nasional atau output keseluruhan. Keseimbangan ini dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

di mana:

Y adalah output nasional atau pendapatan nasional,

C adalah konsumsi rumah tangga,

I adalah investasi,

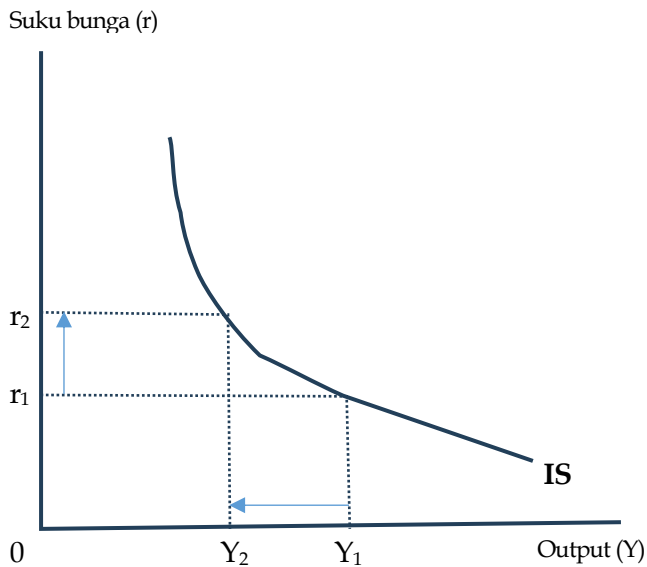
G adalah pengeluaran pemerintah, dan

$(X - M)$ adalah ekspor bersih (perbedaan antara ekspor dan impor).

Dalam konteks agribisnis, setiap komponen dalam persamaan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Konsumsi produk pertanian cenderung bersifat tidak elastis terhadap pendapatan, bahkan beberapa komoditas termasuk dalam kategori inferior goods. Investasi di sektor agribisnis sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kondisi cuaca yang fluktuatif. Sementara itu, ekspor dan impor produk pertanian sangat rentan terhadap dinamika harga internasional dan kebijakan perdagangan global.

5.3.2 Kurva IS (*Investment-Saving*)

Kurva IS menggambarkan hubungan negatif antara tingkat output dan suku bunga di mana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Slope kurva ini negatif karena penurunan suku bunga akan mendorong peningkatan investasi, yang kemudian meningkatkan output nasional melalui efek multiplier (*pengganda ekonomi*).



Gambar 5.2. Kurva IS

Kemiringan kurva IS ditentukan oleh dua faktor utama: elastisitas investasi terhadap suku bunga dan besarnya multiplier

pengeluaran. Dalam sektor agribisnis, elastisitas investasi terhadap suku bunga relatif tinggi. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku agribisnis mengandalkan pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya kredit perbankan.

Menurut hasil penelitian Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, ditemukan bahwa penurunan suku bunga sebesar 1% mampu mendorong peningkatan investasi di sektor agraria hingga 2,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa kurva IS untuk sektor agribisnis bersifat relatif datar atau elastis, yang mencerminkan respon investasi yang cukup sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

5.3.3 Pergeseran Kurva IS

Kurva IS dapat mengalami pergeseran apabila terjadi perubahan pada komponen **pengeluaran otonom**. Beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi pergeseran tersebut antara lain:

1. Perubahan Konsumsi Otonom

Konsumsi otonom dapat berubah akibat pergeseran preferensi konsumen atau faktor demografi. Misalnya, tren *healthy lifestyle* mendorong peningkatan permintaan terhadap produk organik, sehingga menambah konsumsi meskipun pendapatan tidak berubah.

2. Perubahan Investasi Otonom

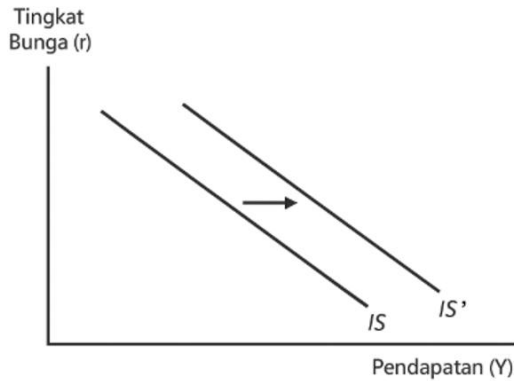
Kebijakan atau program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat meningkatkan investasi otonom di sektor agribisnis. Peningkatan investasi ini akan mendorong pergeseran kurva IS ke kanan.

3. Kebijakan Fiskal

Peningkatan pengeluaran pemerintah, misalnya melalui pembangunan infrastruktur pertanian atau pemberian subsidi pupuk, akan meningkatkan permintaan agregat dan menggeser kurva IS ke kanan.

4. Faktor Eksternal

Kondisi perekonomian global juga dapat memengaruhi posisi kurva IS. Sebagai contoh, kenaikan harga komoditas internasional akan meningkatkan ekspor neto Indonesia, sehingga mendorong pergeseran kurva IS ke kanan.

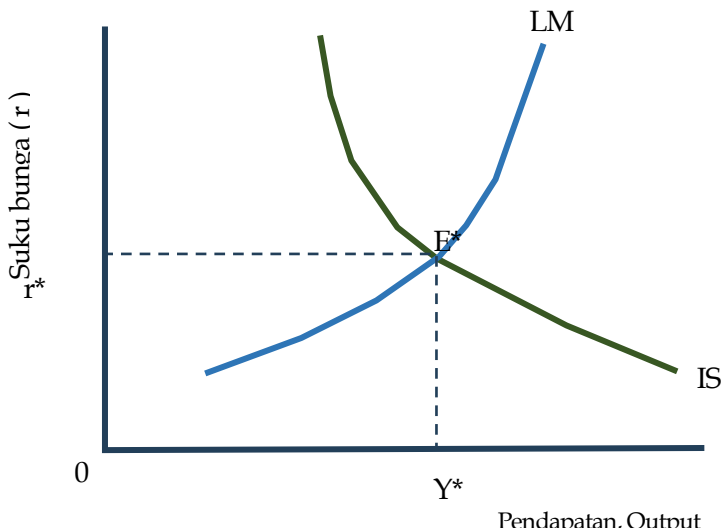


Gambar 5.3. Pergeseran kurva IS.

5.4 Model IS-LM: Keseimbangan Simultan

5.4.1 Integrasi Pasar Uang dan Pasar Barang

Model IS-LM, yang dikembangkan oleh John Hicks berdasarkan teori Keynes, menunjukkan bagaimana keseimbangan simultan tercapai di pasar uang (kurva LM) dan pasar barang (kurva IS). Titik potong kedua kurva menentukan tingkat output dan suku bunga keseimbangan.



Gambar 5.4. Model IS-LM

Dalam konteks agribisnis, model ini sangat relevan untuk memahami bagaimana guncangan ekonomi mempengaruhi sektor tersebut. Misalnya, ketika terjadi kekeringan yang mengurangi produksi pertanian, kurva IS bergeser ke kiri, menyebabkan penurunan output dan suku bunga.

5.4.2 Mekanisme Penyesuaian

Ketika ekonomi berada di luar keseimbangan, terdapat mekanisme otomatis yang mengembalikan ke titik keseimbangan:

Ketidakseimbangan di Pasar Barang: Jika total pengeluaran melebihi output, terjadi penurunan inventori yang mendorong peningkatan produksi. Sebaliknya, jika pengeluaran kurang dari output, akumulasi inventori akan mengurangi produksi.

Ketidakseimbangan di Pasar Uang: Excess demand terhadap uang akan meningkatkan suku bunga, sementara excess supply akan menurunkan suku bunga.

Proses penyesuaian ini tidak selalu instan. Dalam sektor agribisnis, lag time production sangat panjang karena siklus produksi pertanian. Petani tidak bisa langsung menyesuaikan output ketika terjadi perubahan permintaan atau harga.

5.4.3 Stabilitas Keseimbangan

Stabilitas keseimbangan bergantung pada slope relatif kurva IS dan LM. Umumnya, keseimbangan bersifat stabil karena kurva LM berslope positif dan kurva IS berslope negatif. Namun, dalam kondisi liquidity trap (kurva LM horizontal) atau investment trap (kurva IS vertikal), stabilitas dapat terganggu.

Penelitian Bank Indonesia (2018) menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia cukup baik, dengan koefisien penyesuaian (*adjustment coefficient*) sekitar 0,7 per tahun untuk gap output.

5.5 Dampak Kebijakan Ekonomi Makro

5.5.1 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ekspansif (peningkatan jumlah uang beredar) menggeser kurva LM ke kanan, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan output. Dalam konteks agribisnis, hal ini

umumnya berdampak positif karena menurunkan biaya modal untuk investasi. Petani dan pelaku agribisnis lainnya dapat mengakses kredit dengan bunga yang lebih rendah, sehingga mendorong ekspansi usaha dan modernisasi teknologi pertanian.

Mekanisme transmisi (*transmission mechanism*) kebijakan moneter dalam sektor agribisnis berlangsung melalui beberapa jalur. Pertama, *interest rate channel*, yaitu penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang akan menurunkan suku bunga kredit perbankan. Kedua, *credit channel*, yakni peningkatan likuiditas perbankan yang memudahkan akses kredit bagi sektor agribisnis. Ketiga, *exchange rate channel*, di mana pelonggaran moneter dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas pertanian.

Namun, efektivitas kebijakan moneter bergantung pada elastisitas permintaan uang terhadap suku bunga. Jika permintaan uang sangat elastis (*liquidity trap*), kebijakan moneter ekspansif menjadi tidak efektif. Kondisi ini dapat terjadi ketika suku bunga sudah sangat rendah, tetapi investasi tidak merespons karena rendahnya tingkat kepercayaan (*confidence level*) atau tingginya ketidakpastian (*uncertainty*).

Data empiris menunjukkan bahwa kredit pertanian merespons positif terhadap penurunan suku bunga. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (2021), setiap penurunan suku bunga sebesar 100 basis poin meningkatkan pertumbuhan kredit pertanian sebesar 3,2%. Namun, respons ini bervariasi antarsubsektor. Perkebunan dan peternakan menunjukkan elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan karena karakteristik usaha yang lebih padat modal (*capital intensive*).

Efek jeda (*time lag*) kebijakan moneter terhadap sektor pertanian merupakan aspek krusial dalam analisis ekonomi, terutama dalam konteks pembiayaan pedesaan dan siklus produksi. Penelitian menunjukkan bahwa efek jeda ini biasanya berkisar antara enam hingga sembilan bulan. Durasi ini terkait dengan beberapa faktor, termasuk siklus produksi yang panjang dan kekakuan struktural yang memengaruhi akses kredit di daerah pedesaan.

Penelitian Rivai (2022) menunjukkan bahwa produksi pertanian dicirikan oleh periode gestasi yang lebih panjang dibandingkan sektor lain. Rivai menyoroti dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan pertanian dan harga pangan, serta menekankan bahwa produktivitas pertanian merespons perubahan kebijakan hanya setelah jeda signifikan karena sifat siklus pertanian dan proses persiapan produksi. Selain itu, Wagan dkk. (2018) membahas bahwa produktivitas pertanian di India dipengaruhi oleh guncangan kebijakan moneter, memperkuat gagasan bahwa guncangan tersebut memerlukan waktu untuk meresap melalui rantai nilai pertanian dan memengaruhi output produksi.

5.5.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ekspansif menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan output dan suku bunga. Peningkatan suku bunga ini dapat menyebabkan *crowding-out effect* terhadap investasi swasta. Dalam konteks agribisnis, *trade-off* ini menjadi sangat penting karena sektor ini sangat bergantung pada investasi swasta untuk modernisasi dan ekspansi.

Dalam sektor agribisnis, kebijakan fiskal sering kali berbentuk:

1. Subsidi Input Produksi

Pemerintah Indonesia mengalokasikan subsidi pupuk yang mencapai Rp30 triliun per tahun. Subsidi ini secara langsung mengurangi biaya produksi petani, setara (*equivalent*) dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*). Dalam model IS-LM, hal ini menggeser kurva IS ke kanan melalui peningkatan konsumsi dan investasi pertanian.

2. Investasi Infrastruktur

Program *One Map Initiative* dan pembangunan jalan tani meningkatkan produktivitas marginal modal (*marginal productivity of capital*) di sektor agribisnis. Investasi infrastruktur memiliki *multiplier effect* yang besar karena mengurangi biaya transaksi dan membuka akses pasar.

3. Program Bantuan Langsung

Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan daya beli

masyarakat, khususnya terhadap produk pangan. Hal ini menggeser kurva IS melalui peningkatan konsumsi.

4. Tarif dan Kuota Impor

Kebijakan proteksi seperti tarif impor beras dan gula secara efektif meningkatkan harga domestik, setara dengan peningkatan ekspor neto dalam persamaan IS.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam model IS-LM bergantung pada kemiringan kurva IS dan LM serta besarnya *crowding-out effect* dalam konteks elastisitas investasi agribisnis di Indonesia. Model IS-LM menggambarkan interaksi antara pasar barang (IS) dan pasar uang (LM), di mana posisi relatif kurva IS dapat menunjukkan tingkat respons investasi terhadap perubahan suku bunga. Apabila kurva IS datar, elastisitas investasi terhadap suku bunga tinggi, sehingga kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan *crowding out* yang signifikan terhadap investasi swasta (Canh & Trinh, 2018).

Sebaliknya, jika kurva LM datar (elastisitas permintaan uang tinggi), kebijakan fiskal akan sangat efektif karena tidak menyebabkan kenaikan suku bunga yang besar. Kondisi ini dapat terjadi dalam situasi *excess liquidity* atau ketika bank sentral mengakomodasi ekspansi fiskal melalui kebijakan moneter yang longgar.

Multiplier fiskal untuk sektor agribisnis umumnya lebih tinggi dibandingkan sektor lain karena: (1) *marginal propensity to consume* rumah tangga petani yang tinggi, (2) keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan sektor input, dan (3) keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dengan industri pengolahan. Studi Bappenas (2019) menunjukkan bahwa *multiplier* pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian mencapai 1,7, lebih tinggi dibandingkan rata-rata perekonomian sebesar 1,4.

5.5.3 Koordinasi Kebijakan dan *Policy Mix*

Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai target ekonomi makro yang optimal. *Policy mix* yang tepat dapat meminimalkan *trade-off* antara pertumbuhan dan inflasi, sekaligus mengurangi volatilitas output.

1. Koordinasi Ekspansif

Ketika kedua kebijakan bersifat ekspansif, dampak terhadap output sangat besar, namun risiko inflasi juga tinggi. Dalam konteks agribisnis, koordinasi ini efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor, tetapi perlu diwaspadai potensi pembentukan gelembung harga aset pertanian seperti tanah (*asset price bubble*).

2. Koordinasi Kontraktif

Ketika perekonomian mengalami *overheating* dan inflasi tinggi, koordinasi kebijakan kontraktif diperlukan. Namun, dampaknya terhadap sektor agribisnis dapat berat karena sektor ini umumnya memiliki akses terbatas terhadap sumber pembiayaan alternatif.

3. Kombinasi Kebijakan

Kombinasi kebijakan fiskal ekspansif dengan moneter kontraktif (atau sebaliknya) dapat digunakan untuk mencapai target tertentu. Misalnya, untuk mendorong investasi produktif sambil menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur sambil menjalankan kebijakan moneter yang relatif ketat.

Contoh koordinasi yang baik adalah program revitalisasi pertanian tahun 2005–2009, di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur pertanian (kebijakan fiskal ekspansif) dibarengi kebijakan moneter yang akomodatif untuk mencegah kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi. Hasilnya, sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,9% per tahun, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

4. Kerangka Kelembagaan (*Institutional Framework*)

Koordinasi yang efektif memerlukan kerangka kelembagaan yang solid. Di Indonesia, Forum Koordinasi Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran (FKKMSS) berfungsi sebagai wadah koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK. Untuk sektor agribisnis, koordinasi ini sebaiknya diperluas dengan melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian

5.6 Dinamika Jangka Pendek dan Jangka Panjang

5.6.1 Penyesuaian Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, harga dan upah cenderung kaku (*sticky*), sehingga penyesuaian terjadi melalui perubahan kuantitas (*output* dan *employment*). Model IS-LM efektif menjelaskan fluktuasi jangka pendek ini karena mengasumsikan price level yang tetap.

Untuk sektor agribisnis, kekakuan harga terutama terlihat pada produk pangan strategis. Misalnya, stabilitas harga di tingkat petani lebih jelas tampak pada komoditas beras dibandingkan sayuran di Jawa. Penelitian oleh Saptana et al. (2023) menunjukkan bahwa dinamika rantai pasok dan mekanisme pengaturan harga beras di Jawa Tengah dipengaruhi oleh penerapan sistem kontrak serta interaksi antar pelaku pasar. Kontrak tersebut membentuk struktur yang mampu meminimalkan fluktuasi harga yang berpotensi merugikan petani. Namun, di sisi lain, kontrak ini kadang mengurangi fleksibilitas yang dibutuhkan untuk merespons perubahan kondisi pasar yang berlangsung cepat.

Upah Buruh Tani: Sistem upah yang mengikuti pola musiman dan tradisi lokal menyebabkan upah buruh tani relatif kaku. Di banyak daerah, upah masih menggunakan sistem bagi hasil atau upah harian yang sudah menjadi norma sosial.

Harga Sewa Lahan: Kontrak sewa lahan umumnya bersifat tahunan dengan harga yang *fixed*, menyebabkan kekakuan dalam *adjustment cost* produksi.

Harga Input: Harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dan harga benih bersertifikat yang diregulasi menciptakan kekakuan harga input.

Implikasi dari kekakuan harga ini adalah bahwa guncangan ekonomi dalam jangka pendek akan lebih banyak diserap melalui perubahan kuantitas. Ketika terjadi penurunan permintaan, petani akan mengurangi luas tanam atau intensitas produksi rather than menurunkan harga jual.

Inventory Adjustment: Berbeda dengan manufaktur, sektor agribisnis memiliki keterbatasan dalam inventory management karena sifat produk yang perishable. Hal ini menyebabkan volatilitas harga yang tinggi ketika terjadi *mismatch* antara *supply* dan *demand*.

Model IS-LM perlu dimodifikasi untuk mengakomodasi karakteristik ini.

Employment Flexibility: Meskipun upah relatif kaku, employment di sektor agribisnis cukup fleksibel karena sifat musiman produksi. Buruh tani dapat dengan mudah berpindah antar sektor atau antar daerah mengikuti pola musim tanam. Fleksibilitas ini membantu ekonomi menyesuaikan diri terhadap guncangan jangka pendek.

5.6.2 Transisi ke Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, harga dan upah menjadi fleksibel, sehingga ekonomi bergerak menuju keseimbangan *natural rate*. Kurva LM jangka panjang menjadi vertikal pada tingkat output potensial, mengindikasikan bahwa kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi output *riil* dalam jangka panjang.

Natural Rate Hypothesis: Sektor agribisnis memiliki *natural rate of output* yang ditentukan oleh faktor-faktor *riil* seperti ketersediaan lahan, teknologi, dan iklim. Dalam jangka panjang, kebijakan *demand-side* tidak dapat meningkatkan output di atas *natural rate* tanpa menyebabkan inflasi.

Price Adjustment Mechanism: Proses penyesuaian harga dalam sektor agribisnis mengikuti pola yang unik. Harga komoditas pertanian dunia sangat *volatile* dan mempengaruhi harga domestik melalui *arbitrage mechanism*. Ketika harga dunia naik, *exporters* akan mengurangi pasokan domestik untuk ekspor, mendorong kenaikan harga dalam negeri.

Structural Changes: Transisi ke jangka panjang juga melibatkan perubahan struktural dalam sektor agribisnis. Konsolidasi lahan, adopsi teknologi, dan integrasi vertikal mengubah struktur *cost* dan *supply response*. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan per petani terus menurun, dari 0,89 ha pada tahun 2003 menjadi 0,75 ha pada tahun 2018, mengindikasikan fragmentasi yang semakin parah.

Capital Accumulation: Dalam jangka panjang, akumulasi kapital (fisik dan manusia) menjadi driver utama pertumbuhan output. Investasi dalam irigasi, mekanisasi, dan R&D meningkatkan kapasitas produksi sektor agribisnis. *Government expenditure* untuk

penelitian pertanian memiliki social return yang sangat tinggi, sekitar 30-40% menurut studi internasional.

Transisi ini penting untuk memahami *sustainability* kebijakan ekonomi. Kebijakan ekspansif yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi tanpa meningkatkan output riil dalam jangka panjang. Untuk sektor agribisnis, hal ini berarti bahwa stimulus demand-side hanya efektif dalam jangka pendek, sementara peningkatan produktivitas jangka panjang memerlukan kebijakan supply-side seperti investasi R&D dan infrastruktur.

5.6.3 Peran Ekspektasi dan *Adaptive Learning*

Ekspektasi memainkan peran esensial dalam menentukan kecepatan transisi dari keseimbangan jangka pendek hingga jangka panjang. Dalam konteks sektor agribisnis, ekspektasi tidak hanya terdiri dari variabel ekonomi tradisional namun juga faktor-faktor spesifik seperti iklim, kebijakan pemerintah, serta kondisi pasar internasional yang fluktuatif.

Ekspektasi Adaptif vs Rasional: Sebagian besar petani membentuk ekspektasi berdasarkan pengalaman masa lalu (*adaptive expectations*), terutama dalam hal cuaca dan harga. Namun, petani modern dan *agro-corporations* cenderung menggunakan informasi *forward-looking* dalam membuat keputusan (*rational expectations*).

Learning Process: Pembelajaran secara adaptif dalam sektor agribisnis berjalan lambat karena siklus produksi yang panjang dan akses informasi yang terbatas. Petani berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi melalui pengalaman yang diperoleh secara bertahap dalam jangka waktu yang lama.

Weather Expectations: Ekspektasi cuaca memiliki dampak langsung terhadap keputusan produksi. Fenomena El Niño dan La Niña yang bersifat siklis mempengaruhi ekspektasi petani terhadap curah hujan dan temperature. Petani yang mengantisipasi kekeringan akan mengurangi luas tanam atau beralih ke komoditas yang lebih tahan kekeringan.

Price Expectations: Perkiraan harga komoditas dipengaruhi oleh informasi pasar internasional, kebijakan pemerintah, dan pola musiman. Petani yang memprediksi kenaikan harga cenderung

menunda penjualan (bila memungkinkan) atau memperluas area tanam di musim berikutnya. Ketergantungan petani pada harga acuan membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Policy Expectations: Prakiraan terhadap kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang. Ketidakpastian subsidi atau tarif impor dapat menunda keputusan untuk menerapkan teknologi baru atau memperluas bisnis. Keraguan investor akibat perubahan regulasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Lucas (1976) menunjukkan bahwa kebijakan yang dapat diprediksi akan kehilangan efektivitasnya karena agen ekonomi menyesuaikan ekspektasi mereka. Hal ini menjelaskan mengapa efektivitas kebijakan moneter cenderung menurun seiring waktu. Dalam konteks agribisnis, fenomena ini dapat diamati dalam respon petani terhadap program subsidi yang rutin. Setelah beberapa tahun, petani akan memperhitungkan subsidi sebagai bagian dari pendapatan normal, sehingga dampak insentifnya berkurang.

Information Asymmetry: Asimetri informasi antara petani kecil dan pelaku agribisnis besar menciptakan heterogenitas dalam pembentukan ekspektasi. Petani kecil umumnya memiliki akses terbatas terhadap informasi pasar dan teknologi, sehingga cenderung membentuk ekspektasi yang bias atau tidak akurat.

5.7 Keterbatasan Model IS-LM dan Pengembangan Kontemporer

5.7.1 Asumsi yang Restriktif dalam Konteks Agribisnis

Model IS-LM, meskipun powerful sebagai *framework* analisis, memiliki beberapa keterbatasan yang menjadi semakin apparent ketika diterapkan pada sektor agribisnis:

Fixed Price Level: Model mengasumsikan tingkat harga tetap, padahal volatilitas harga adalah karakteristik utama sektor agribisnis. Harga komoditas pertanian dapat berfluktuasi 20-30% dalam satu musim tanam, jauh melebihi volatilitas harga manufaktur. Asumsi harga tetap mengabaikan *supply shocks* yang dominan di sektor ini.

Closed Economy Assumption: Model dasar tidak mempertimbangkan sektor luar negeri, padahal Indonesia adalah

eksportir utama *palm oil*, karet, dan kakao, serta importir gandum dan kedelai. *Terms of trade* komoditas pertanian sangat mempengaruhi kesejahteraan petani dan stabilitas makroekonomi.

Static Model: Model tidak menjelaskan dinamika penyesuaian dari waktu ke waktu. Dalam agribisnis, *adjustment process* sangat panjang karena *biological lag* dalam produksi. *Respons supply* terhadap perubahan harga memerlukan waktu minimal satu musim tanam, bahkan bertahun-tahun untuk komoditas perkebunan.

Homogeneous Agents: Model mengasumsikan semua agen ekonomi identik, padahal terdapat heterogenitas yang signifikan dalam sektor agribisnis. Petani kecil memiliki *access to credit* dan *risk tolerance* yang berbeda dengan *agro-corporations*. Credit constraints lebih binding untuk petani kecil, menyebabkan respons investasi yang berbeda terhadap perubahan suku bunga.

Perfect Capital Mobility: Asumsi mobilitas modal yang sempurna tidak realistis untuk sektor agribisnis, terutama di daerah rural. *Financial inclusion* masih rendah, dengan hanya 60% petani yang memiliki akses ke layanan perbankan formal menurut survei OJK (2019).

5.7.2 Pengembangan Model untuk Mengatasi Keterbatasan

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, ekonom mengembangkan berbagai ekstensi dan modifikasi:

Model IS-LM-BP (*Balance of Payment*): Menambahkan sektor luar negeri dengan kurva *Balance of Payment*. Untuk sektor agribisnis, model ini sangat relevan karena:

1. Ekspor komoditas primer berkontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan
2. Import input seperti pupuk dan pestisida mempengaruhi biaya produksi
3. Volatilitas nilai tukar berdampak langsung pada competitiveness ekspor

Model AS-AD (*Aggregate Supply-Aggregate Demand*): Menggabungkan sisi *supply* dan demand dengan tingkat harga yang fleksibel. Model ini lebih sesuai untuk sektor agribisnis karena dapat

mengakomodasi *supply shocks* seperti bencana alam, serangan hama, atau perubahan iklim.

Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE): Model yang lebih kompleks dengan agen yang *forward-looking* dan berbagai jenis shock. *DSGE models for agriculture* telah dikembangkan untuk menganalisis dampak *climate change* dan *commodity price volatility*.

Financial Frictions Models: Bernanke-Gertler-Gilchrist framework yang memasukkan *financial accelerator mechanism*. Model ini sangat relevan untuk sektor agribisnis karena credit constraints yang ketat dan pentingnya *collateral* (tanah) dalam akses kredit.

Heterogeneous Agent Models: Model yang mengakomodasi heterogenitas dalam karakteristik agen. Untuk agribisnis, hal ini penting karena perbedaan signifikan antara subsistence farmers, commercial farmers, dan agro-corporations.

5.7.3 Relevansi Berkelanjutan untuk *Policy Making*

Meskipun memiliki keterbatasan, model IS-LM tetap relevan untuk *policy making* karena beberapa alasan:

Pedagogical Value: Model memberikan intuisi yang mudah dipahami tentang interaksi antara pasar uang dan barang. Untuk *policy makers* yang bukan ekonom, model IS-LM menyediakan framework sederhana untuk memahami trade-off kebijakan.

Policy Communication: Bank sentral dan kementerian keuangan masih menggunakan IS-LM *framework* untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik. *Simplicity* model membuatnya *effective* sebagai communication tool.

Benchmark Analysis: Model IS-LM menjadi starting point untuk analisis yang lebih kompleks. Even sophisticated *DSGE models often reduce to IS-LM-like relationships under certain assumptions*.

Quick Policy Assessment: Dalam situasi krisis, policy makers memerlukan quick assessment tentang dampak kebijakan. Model IS-LM dapat memberikan rough estimate tentang arah dan magnitude dampak kebijakan.

Bernanke (2022) berpendapat bahwa model IS-LM tetap menjadi workhorse untuk analisis kebijakan makroekonomi meskipun telah dikembangkan model-model yang lebih

sophisticated. Dalam konteks sektor agribisnis, model ini tetap berguna sebagai first approximation, terutama ketika dikombinasikan dengan sector-specific knowledge tentang karakteristik unik pertanian.

Practical Application: Di Indonesia, Bappenas dan Bank Indonesia masih menggunakan IS-LM framework dalam quarterly macroeconomic outlook, meskipun dilengkapi dengan sectoral models yang lebih detail. Untuk sektor agribisnis, model IS-LM digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan makro terhadap investasi pertanian dan akses kredit.

5.8 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Keberadaan keseimbangan pasar uang dan barang adalah hal yang penting untuk dipahami. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pasar uang dan barang adalah konsep dasar yang memiliki banyak implikasi penting, berikut beberapa implikasi yang kolektif berdasarkan pada diskusi di atas.

5.8.1 Relevansi Model IS-LM untuk Sektor Agribisnis

Model IS-LM sebagai konsep pendukung ekonomi selalu dapat digunakan. Terutama, ketika model ini didukung oleh penyesuaian sesuai pada karakteristik sektor agribisnis, karena:

1. Karakteristik Sektor Agribisnis

Harga yang cenderung sensitif terhadap perubahan suplai, musiman dan efek alam membuat investasi di sektor ini juga sensitif dengan kebijakan makroekonomi. Sehingga, kurva IS agribisnis melebar lebih elastis dan kurva LM sektor agribisnis lebih stabil tetapi miring ke atas.

2. Mekanisme Transmisi

Kebijakan moneter memengaruhi sektor agribisnis melalui berbagai saluran, antara lain: interest rate channel yang memengaruhi biaya kredit, *credit channel* yang memengaruhi akses pembiayaan, serta exchange rate channel yang memengaruhi daya saing ekspor komoditas.

3. Heterogenitas Respons

Tidak semua subsektor agribisnis merespons kebijakan makroekonomi dengan cara yang sama. Subsektor

perkebunan dan peternakan yang lebih padat modal (*capital-intensive*) menunjukkan elastisitas yang lebih tinggi terhadap perubahan suku bunga dibandingkan dengan subsektor tanaman pangan yang lebih padat karya (*labor-intensive*).

5.8.2 Koordinasi Kebijakan Makroekonomi

Kebijakan makroekonomi berperan penting dalam sektor agribisnis dan harus berkoordinasi dengan baik untuk menjamin efektivitas kebijakan.

1. Kombinasi Kebijakan Optimal

Kombinasi kebijakan fiskal ekspansif yang tepat sasaran (misalnya subsidi input dan investasi infrastruktur pertanian) dengan kebijakan moneter yang akomodatif terbukti paling efektif mendorong pertumbuhan sektor agribisnis tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan.

2. Koordinasi Waktu

Koordinasi kebijakan makroekonomi pada sektor agribisnis harus konsisten dan dapat diprediksi. Sehingga, kebijakan yang kerap berubah akan merugikan pihak yang melakukan investasi.

3. Kerangka Kelembagaan

Diperlukan koordinasi kelembagaan yang lebih luas berdaarkan pada hasil berkoordinasi sebelumnya oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian melalui FKKMSS.

5.8.3 Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

Implikasi dari keseimbangan pasar uang dan barang di atas antara lain:

1. Stabilisasi Makroekonomi

Volatilitas sektor agribisnis dapat menjadi sumber ketidakstabilan makroekonomi. Pengembangan instrumen manajemen risiko, seperti *commodity futures*, asuransi pertanian (*crop insurance*), dan dana stabilisasi harga (*price stabilization funds*), dapat mengurangi volatilitas serta meningkatkan prediktabilitas investasi.

2. Inklusi Keuangan

Kendala kredit (*credit constraints*) yang ketat di sektor agribisnis memerlukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif, seperti *microfinance*, *peer-to-peer lending*, dan solusi fintech untuk meningkatkan transmisi moneter ke sektor ini.

3. *Investasi Infrastruktur*

Investasi infrastruktur pertanian memiliki efek pengganda (*multiplier effects*) yang signifikan dan dapat menggeser kurva IS secara permanen. Prioritas investasi perlu diberikan pada irigasi, jalan pedesaan, serta infrastruktur pascapanen guna meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. *Adopsi Teknologi*

Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar. Platform e-commerce, sistem pembayaran digital, serta pertanian presisi (*precision agriculture*) dapat memperkuat integrasi sektor agribisnis dengan perekonomian secara keseluruhan.

5.8.4 Tantangan dan Peluang Masa Depan

Sektor agribisnis Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang akan memengaruhi dinamika keseimbangan makroekonomi, antara lain:

1. *Adaptasi Perubahan Iklim*

Perubahan iklim memerlukan penyesuaian mendasar dalam pola produksi dan manajemen risiko. Hal ini dapat mengubah struktur investasi dan berpotensi memengaruhi kemiringan (*slope*) kurva IS sektor agribisnis.

2. *Integrasi Rantai Nilai Global*

Peningkatan keterhubungan dengan rantai nilai global memberikan peluang pertumbuhan ekspor, tetapi juga meningkatkan paparan terhadap guncangan eksternal. Hal ini memerlukan respons kebijakan yang lebih canggih dan terintegrasi dengan pertimbangan domestik dan internasional.

3. *Transisi Demografis*

Penuaan penduduk di wilayah pedesaan dan tren urbanisasi menuntut transformasi struktural sektor agribisnis menuju

sistem produksi yang lebih padat modal dan berbasis teknologi. Hal ini akan mengubah proporsi faktor produksi dan memengaruhi elastisitas permintaan tenaga kerja.

4. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*

Tekanan untuk mencapai SDGs, khususnya zero hunger dan pertanian berkelanjutan, memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan produktivitas dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat memengaruhi struktur biaya dan pola investasi sektor agribisnis.

5.8.5 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dalam bab ini, rekomendasi kebijakan dapat dibagi menjadi tiga horizon waktu:

1. *Jangka Pendek*

Menjaga stabilitas suku bunga untuk memberikan prediktabilitas bagi keputusan investasi. Meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter dan subsidi pertanian untuk menghindari konflik kebijakan. Memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) guna mengantisipasi guncangan pasokan dan volatilitas harga komoditas.

2. *Jangka Menengah*

Mengembangkan instrumen manajemen risiko yang komprehensif untuk sektor agribisnis. Meningkatkan infrastruktur keuangan di wilayah pedesaan untuk memperbaiki transmisi moneter.

Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) pertanian guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.

3. *Jangka Panjang*

Mengembangkan kerangka kelembagaan untuk integrasi sektor agribisnis dalam perencanaan makroekonomi. Membangun sistem pertanian yang tangguh terhadap iklim (*climate-resilient agricultural systems*). Mendorong ekosistem inovasi yang mendukung transformasi teknologi sektor agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2018). *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). *Transmisi Kebijakan Moneter: Tinjauan Teoretis dan Empiris di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Investasi Sektor Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Analisis Multiplier Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian*. Jakarta: Bappenas.
- Bernanke, B. S. (2022). *21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19*. New York: W. W. Norton & Company.
- Bernanke, Ben S., and Mark Gertler. 1995. "Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission." *Journal of Economic Perspectives* 9 (4): 27–48. DOI: 10.1257/jep.9.4.27
- Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. *Handbook of Macroeconomics*, 1, 1341-1393. [https://doi.org/10.1016/S1574-0048\(99\)10034-X](https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)10034-X)
- Blanchard, O., & Summers, L. H. (2017). Rethinking stabilization policy: Evolution or revolution? (No. w24179). National Bureau of Economic Research.
- Canh, N. T. and Trinh, L. T. (2018). The impacts of public investment on private investment and economic growth. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 25(1), 15-32. <https://doi.org/10.1108/jabes-04-2018-0003>
- Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the "classics"; a suggested interpretation. *Econometrica*, 5(2), 147-159. <https://doi.org/10.2307/1907242>
- Kementerian Pertanian. (2021). *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Tanaman Pangan 2021*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Macroeconomics* (5th ed.). New York: Worth Publishers.

- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1(1), 19-46. [https://doi.org/10.1016/S0167-2231\(76\)80003-6](https://doi.org/10.1016/S0167-2231(76)80003-6)
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (9th ed.). New York: Worth Publishers.
- Mishkin, F. S. (2018). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Indonesia 2021*. Jakarta: OJK.
- Rivai, A. (2022). The monetary policy impact on agricultural growth and food prices. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(9), 158-165. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i9.2234>
- Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Saptana, N., Suryani, E., & Darmawati, E. (2023). Kinerja rantai pasok, dinamika, dan pembentukan harga beras di jawa tengah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(1), 39-58. <https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.39-58>
- Wagan, Z. A., Chen, Z., Seelro, H., & Shah, M. S. (2018). Assessing the effect of monetary policy on agricultural growth and food prices. *Agricultural Economics (Zemědělská Ekonomika)*, 64(11), 499-507. <https://doi.org/10.17221/295/2017-agricecon>
- Warjiyo, P. (2016). *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Yellen, J. L. (2017). The goals of monetary policy and how we pursue them. Speech at the University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, September 24, 2015. *Federal Reserve Bulletin*, 103(1), 1-12.. (2022). *21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19*. New York: W. W. Norton & Company.

BAB 6

PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN AGREGAT

Oleh Muhammad Hatta

6.1 Pendahuluan

Model Permintaan Agregat (*Aggregate Demand* - AD) dan Penawaran Agregat (*Aggregate Supply* - AS) merupakan kerangka kerja inti dalam ekonomi makro untuk memahami fluktuasi ekonomi jangka pendek dan menengah. Model ini menjelaskan:

1. Penyebab naik-turunnya tingkat output (PDB riil) dan harga (inflasi/deflasi).
2. Dampak kebijakan fiskal dan moneter.
3. Dampak guncangan (*shocks*) ekonomi seperti perubahan harga minyak atau kepercayaan konsumen.
4. Perbedaan perilaku ekonomi antara jangka pendek dan jangka panjang.

6.2 Permintaan Agregat (AD)

Permintaan Agregat (AD) adalah total pengeluaran yang direncanakan (dibeli) untuk barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga, dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun), dengan asumsi faktor lain konstan (*ceteris paribus*). (Mankiw, N. Gregory.2022)

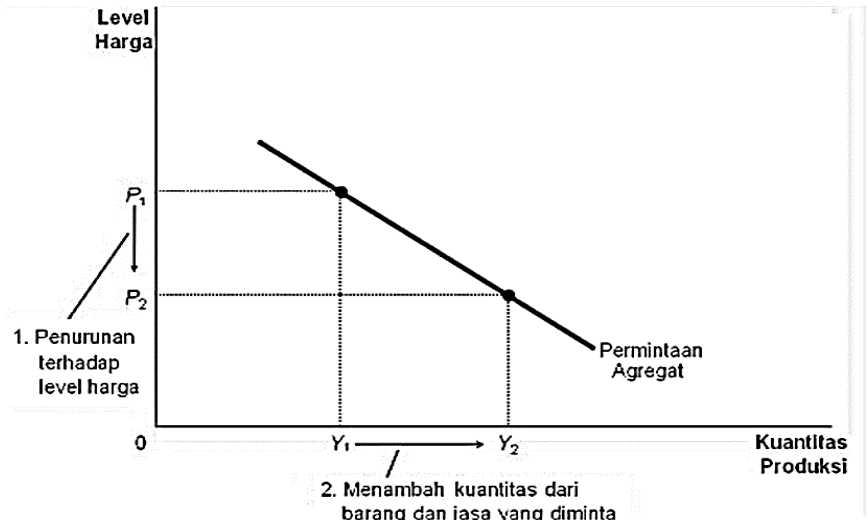
$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Komponen Aggregate Demand (AD)

1. Konsumsi (C): Pengeluaran rumah tangga untuk barang/jasa.
2. Investasi (I): Pengeluaran perusahaan untuk modal baru (mesin, pabrik) dan perubahan persediaan, serta pengeluaran rumah tangga untuk rumah baru.
3. Pengeluaran Pemerintah (G): Pembelian barang/jasa oleh pemerintah (bukan termasuk transfer payments).
4. Ekspor Neto (X - M): Ekspor (X) dikurangi Impor (M).

8.2.1. Kurva Permintaan Agregat (AD):

Kurva AD menunjukkan hubungan terbalik (negatif) antara tingkat harga umum (P) dan jumlah output agregat (PDB riil, Y) yang diminta. Bentuk Miring ke Bawah:



Gambar 6.1. Kurva Permintaan Agregat

Keterangan :

1. Sumbu Vertikal (P): Tingkat Harga Umum
2. Sumbu Horizontal (Y): *Output Agregat Riil* (PDB Riil)
3. Kurva AD: Menurun dari kiri atas ke kanan bawah.

Mengapa Kurva AD Miring ke Bawah? (Efek Tingkat Harga terhadap Pengeluaran Riil) :

1. Efek Kekayaan (*Wealth Effect/Pigou Effect*): Ketika tingkat harga turun, nilai riil kekayaan (uang tunai, tabungan) masyarakat meningkat. Mereka merasa lebih kaya dan cenderung meningkatkan konsumsi (C).
2. Efek Suku Bunga (*Interest Rate Effect/Keynes Effect*): Ketika tingkat harga turun, permintaan akan uang tunai (untuk transaksi) menurun. Dengan penawaran uang nominal yang tetap, penurunan permintaan uang menyebabkan suku

bunga turun. Suku bunga yang lebih rendah mendorong investasi (I) dan konsumsi tahan lama (bagian dari C).

3. Efek Nilai Tukar (*Exchange Rate Effect/Mundell-Fleming Effect*): Pada perekonomian terbuka. Ketika tingkat harga domestik turun (relatif terhadap luar negeri), ekspor menjadi lebih murah dan impor menjadi lebih mahal. Ini meningkatkan ekspor neto (NX).

6.2.1 Faktor yang Menggeser Kurva AD (Perubahan Permintaan Agregat):

Perubahan faktor selain tingkat harga (P) akan menggeser seluruh kurva AD.

Perubahan Kebijakan

1. **Kebijakan Fiskal Ekspansif:** G meningkat atau Pajak turun menyebabkan C meningkat dan/atau I meningkat maka AD bergeser ke kanan
2. **Kebijakan Fiskal Kontraktif:** G turun atau Pajak naik maka C turun dan/atau I turun maka AD bergeser ke kiri
3. **Kebijakan Moneter Ekspansif:** Penawaran Uang meningkat maka Suku Bunga turun menyebabkan I meningkat dan C meningkat menyebabkan AD bergeser ke kanan
4. **Kebijakan Moneter Kontraktif:** Penawaran Uang turun menyebabkan Suku Bunga naik maka I turun dan C turun menyebabkan AD bergeser ke kiri

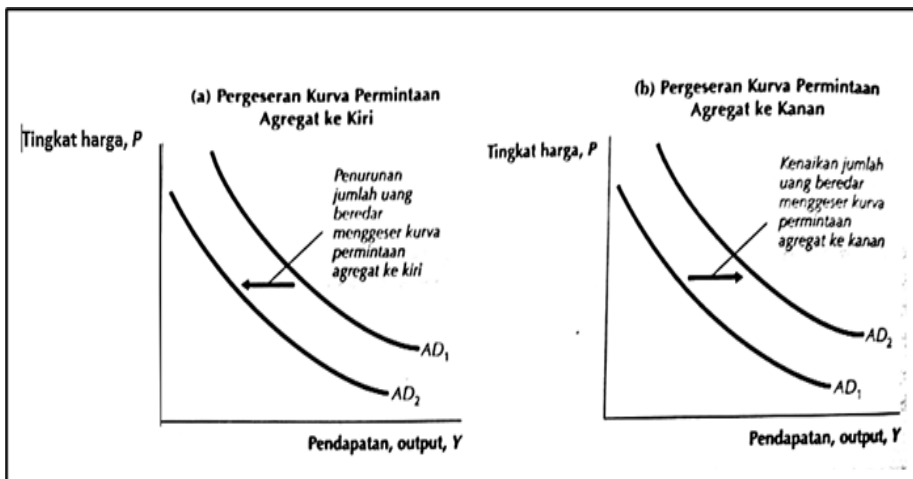
Perubahan Ekspektasi:

1. Ekspektasi pendapatan meningkat/keuntungan maka depan maka C naik dan I naik menyebabkan AD bergeser ke kanan
2. Ekspektasi inflasi meningkat maka beli sekarang sebelum harga naik maka C meningkat menyebabkan AD bergeser ke kanan

Perubahan Kondisi Ekonomi Luar Negeri:

1. Pertumbuhan ekonomi luar negeri naik menyebabkan Ekspor (X) naik maka AD bergeser ke kanan

2. Nilai tukar riil (apresiasi mata uang domestik) naik maka X turun dan M meningkat menyebabkan XM turun mengakibatkan AD bergeser ke kiri



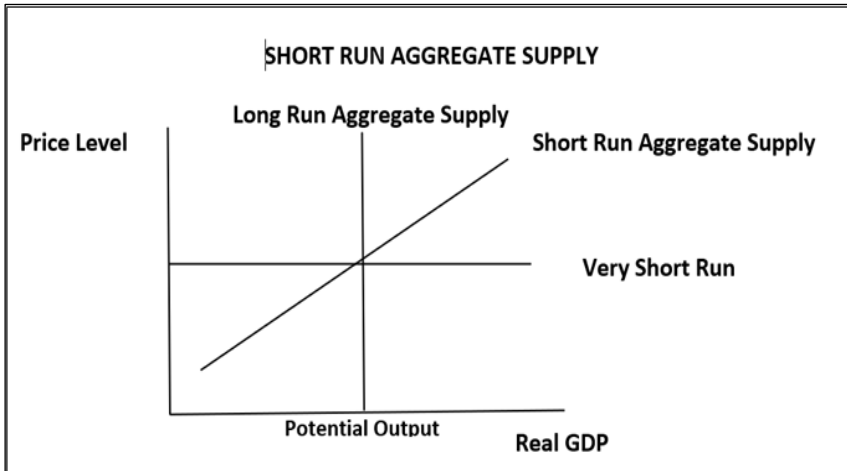
Gambar 6.2. Pergeseran Kurva Permintaan Agregat

6.3 Penawaran Agregat (AS)

Penawaran Agregat (AS) adalah total output barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga, dalam periode waktu tertentu. Pentingnya Jangka Waktu: Perilaku AS berbeda signifikan antara Jangka Pendek dan Jangka Panjang (Sadono, Sukirno, 2016)

6.3.1 Penawaran Agregat Jangka Pendek (SRAS)

Penawaran agregat jangka pendek adalah hubungan antara tingkat harga (P) dan jumlah output (Y) yang ditawarkan perusahaan ketika harga input (terutama upah nominal) belum sepenuhnya menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga output, berikut Kurva SARS



Gambar 6.3. Penawaran Agregat Jangka Pendek (SRAS)

Penawaran Agregat Jangka Pendek (*Short-Run Aggregate Supply/SRAS*) merujuk pada total output yang diproduksi suatu perekonomian dalam periode di mana beberapa biaya produksi bersifat tetap (*fixed*) dan tidak dapat disesuaikan sepenuhnya. Secara grafis, kurva SRAS digambarkan dengan kemiringan positif (*upward sloping*), menunjukkan hubungan positif antara tingkat harga agregat (*aggregate price level*) dengan output riil yang ditawarkan. Artinya, kenaikan tingkat harga akan diikuti oleh peningkatan output agregat, dan sebaliknya.

Kemiringan positif kurva SRAS ini terutama disebabkan oleh adanya rigiditas nominal (*nominal rigidity*), khususnya pada upah dan beberapa biaya input lainnya. Dalam jangka pendek, upah sering kali bersifat kaku (*sticky*) dan tidak menyesuaikan secara instan dengan perubahan tingkat harga. Ketidakfleksibelan ini menyebabkan perubahan tingkat harga memengaruhi margin keuntungan riil (*real profit margins*) perusahaan (Mankiw, N. Gregory.2022).

Sebagai contoh, ketika tingkat harga mengalami kenaikan sementara upah nominal dan biaya-biaya tertentu tetap stabil, profitabilitas riil perusahaan meningkat. Kondisi ini memberikan insentif bagi pelaku bisnis untuk memperluas volume produksi guna memanfaatkan keuntungan yang lebih tinggi tersebut. Mekanisme

inilah yang menjelaskan mengapa kenaikan harga umum dalam perekonomian dapat mendorong peningkatan output agregat dalam jangka pendek.

6.3.2 Cara upah kaku mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek

Teori kekakuan upah (*wage rigidity theory* atau *sticky wage theory*) menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas. Jika upah kaku, maka margin keuntungan lebih tinggi ketika tingkat harga naik. Situasi ini menginsentif perusahaan untuk meningkatkan output untuk meraih lebih banyak keuntungan. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, karena upah tidak berubah, keuntungan turun, memaksa mereka memangkas produksi (Olivier Blanchard, 2021).

Dalam jangka pendek, upah bersifat tidak fleksibel (*rigid*) dan tidak menyesuaikan secara proporsional terhadap perubahan tingkat harga. Salah satu penyebab utama rigiditas nominal upah (*nominal wage rigidity*) ini adalah adanya kontrak kerja (*labor contracts*) yang mengikat. Kontrak kerja biasanya menetapkan upah nominal untuk periode tertentu, sehingga perusahaan tidak dapat serta-merta merevisi upah pekerja meskipun terjadi kenaikan maupun penurunan dalam tingkat harga umum. Akibatnya, upah menjadi kaku (*sticky*) dalam jangka pendek.

Selain kontrak kerja, rigiditas upah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor kelembagaan berikut:

1. **Kebijakan Upah Minimum:** Penetapan upah minimum oleh pemerintah membatasi fleksibilitas penyesuaian upah ke bawah.
2. **Regulasi Pasar Tenaga Kerja:** Peraturan ketenagakerjaan yang kompleks dapat menghambat penyesuaian upah yang cepat.
3. **Kekuatan Bargaining Serikat Pekerja:** Kemampuan serikat pekerja dalam melakukan negosiasi kolektif seringkali mencegah penurunan upah nominal bahkan dalam kondisi penurunan harga.

Teori Kesalahan Persepsi (*Misperceptions Theory*) Menurut teori ini, kenaikan tak terantisipasi dalam tingkat harga umum (P) dapat menyebabkan produsen melakukan kesalahan persepsi.

Mereka mungkin menginterpretasikan kenaikan harga produk mereka sendiri sebagai kenaikan harga relatif—yang menandakan meningkatnya profitabilitas—bukan sebagai bagian dari kenaikan harga umum. Persepsi keliru ini mendorong mereka untuk meningkatkan output, sehingga dalam jangka pendek, kenaikan harga umum dapat menyebabkan peningkatan output agregat (PDB riil) ((Olivier Blanchard, 2021).

Dalam representasi grafis model makroekonomi, hubungan kausal antara tingkat harga agregat (*aggregate price level*) dan output riil divisualisasikan melalui Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek (SRAS). Perubahan pada tingkat harga akan mengakibatkan pergerakan sepanjang (*movement along*) kurva SRAS yang telah terbentuk. Penting untuk dibedakan bahwa perubahan harga ini tidak menyebabkan perpindahan kurva (*shift of the curve*) itu sendiri, melainkan hanya merepresentasikan penyesuaian menuju titik keseimbangan yang berbeda pada kurva yang sama.

Pergeseran kurva SRAS (ke kanan atau kiri) hanya terjadi akibat perubahan pada faktor-faktor determinan non-harga. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi biaya produksi atau kapasitas produktif perekonomian secara keseluruhan.

6.3.3 Faktor-Faktor Penggeser Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek:

Beberapa variabel kunci yang dapat menggeser kurva SRAS meliputi:

1. **Harga Input:** Perubahan pada biaya input seperti energi dan bahan baku.
2. **Ekspektasi Inflasi:** Ekspektasi mengenai tingkat harga di masa depan.
3. **Kebijakan Pajak dan Subsidi:** Perubahan dalam pajak perusahaan dan subsidi produksi.
4. **Nilai Tukar:** Depresiasi atau apresiasi mata uang yang memengaruhi harga input impor.
5. **Pasokan dan Kualitas Tenaga Kerja:** Perubahan dalam jumlah dan produktivitas angkatan kerja.

6. **Stok dan Kualitas Modal:** Perubahan dalam kuantitas dan teknologi yang tertanam dalam modal.
7. **Kemajuan Teknologi:** Inovasi yang meningkatkan efisiensi proses produksi.

6.3.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pergeseran Kurva Penawaran Agregat Jangka Pendek ke Kanan

Kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) bergeser ke kanan apabila terjadi peningkatan dalam jumlah output riil yang diproduksi oleh seluruh pelaku ekonomi pada setiap tingkat harga. Pergeseran ini menunjukkan suatu kondisi dimana perekonomian mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar. Beberapa faktor kunci yang dapat memicu pergeseran ini adalah:

1. **Penurunan Harga Faktor Produksi (Input):** Ketika harga input produksi seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan energi mengalami penurunan, biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang. Penurunan biaya ini, *ceteris paribus*, akan memperluas margin keuntungan. Akibatnya, perusahaan terdorong untuk meningkatkan volume produksinya.
2. **Ekspektasi Inflasi di Masa Depan:** Ekspektasi mengenai tingkat harga di masa depan memengaruhi perilaku produksi perusahaan. Jika perusahaan mengantisipasi kenaikan harga relatif terhadap tingkat harga umum pada periode mendatang, mereka akan memandang adanya peluang untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Untuk memanfaatkan peluang ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan output dan mengakumulasi persediaan (*inventory building*) pada periode sekarang.
3. **Kebijakan Fiskal yang Mengurangi Beban Perusahaan:** Pengurangan dalam pajak langsung yang dikenakan pada bisnis (seperti pajak penghasilan badan) efektif menurunkan biaya produksi per unit. Subsidi produksi dari pemerintah juga memiliki efek serupa, yaitu menurunkan biaya marjinal. Kedua kebijakan ini meningkatkan profitabilitas,

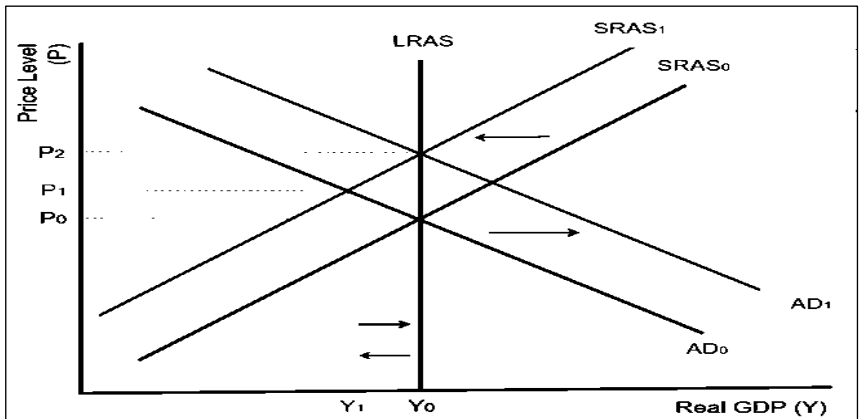
sehingga merangsang perusahaan untuk menaikkan tingkat produksinya.

4. **Apresiasi Nilai Tukar Mata Uang:** Menguatnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing menyebabkan harga barang-barang impor (seperti bahan baku, barang modal, dan komponen) menjadi lebih murah. Penurunan harga input impor ini kemudian menekan biaya produksi secara keseluruhan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan output.
5. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input:**
 - a. **Tenaga Kerja:** Peningkatan jumlah angkatan kerja (*labor supply*) memungkinkan pereconomian menghasilkan output yang lebih besar. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja (melalui pendidikan dan pelatihan) akan meningkatkan produktivitas, sehingga lebih banyak output dapat dihasilkan dari jumlah input yang sama.
 - b. **Modal:** Ketersediaan modal fisik (seperti mesin dan pabrik) yang lebih banyak meningkatkan kapasitas produksi. Demikian pula, kemajuan teknologi yang terwujud dalam kualitas modal yang lebih tinggi (teknologi canggih) meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga mampu menghasilkan output lebih besar.
6. **Kemajuan Teknologi:** Inovasi teknologi merupakan faktor fundamental yang meningkatkan produktivitas seluruh faktor produksi (tenaga kerja dan modal). Teknologi yang lebih maju memungkinkan dihasilkannya output yang lebih banyak dengan menggunakan jumlah input yang sama, sehingga secara signifikan mendorong kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan.

6.3.5 Penyebab kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri

Penawaran agregat jangka pendek turun ketika faktor-faktor di atas bekerja secara terbalik. Sehingga, secara singkat, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri karena:

1. Harga input naik
2. Harga di masa depan turun
3. Pajak bisnis meningkat
4. Subsidi di pangkas
5. Mata uang domestik terdepresiasi
6. Pasokan tenaga kerja berkurang
7. Tenaga kerja berkualitas lebih rendah
8. Persediaan modal menurun
9. Kualitas modal memburuk
10. Kemunduran teknologi

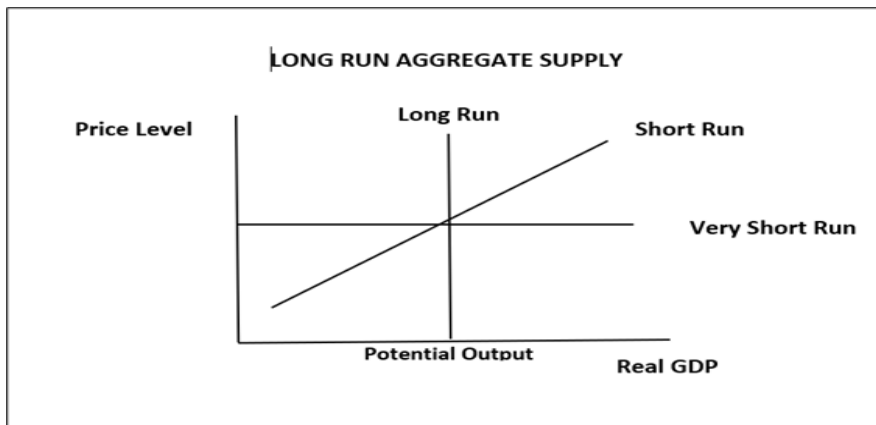


Gambar 6.4. Pergeseran Kurva SARS

6.3.2 Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS)

Dalam analisis makroekonomi, penawaran agregat jangka panjang (*long-run aggregate supply*) merepresentasikan hubungan antara tingkat harga (P) dan jumlah output riil (Y) yang diproduksi oleh perekonomian pada kondisi dimana upah nominal dan harga-harga input lainnya telah melakukan penyesuaian penuh (*full adjustment*) terhadap setiap perubahan dalam tingkat harga output. Pada posisi ini, perekonomian dianggap beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan menghasilkan output potensialnya (potential GDP), dengan tingkat pengangguran yang sesuai dengan tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*). Kurva penawaran agregat jangka panjang bersifat

vertikal karena output tidak lagi dipengaruhi oleh tingkat harga, melainkan oleh ketersediaan faktor produksi dan teknologi.



Gambar 6.5. Penawaran Agregat Jangka Panjang

Penawaran Agregat Jangka Panjang (*Long-Run Aggregate Supply/LRAS*) merupakan konsep dalam analisis makroekonomi yang merujuk pada tingkat output total yang mampu dicapai oleh suatu perekonomian setelah seluruh faktor produksi dapat disesuaikan secara penuh. Dalam jangka panjang, upah nominal dan harga-harga input lainnya bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan secara proporsional dengan perubahan tingkat harga umum. Kondisi ini menyebabkan perubahan harga tidak lagi memengaruhi insentif produsen untuk mengubah volume output, karena biaya riil produksi tetap tidak berubah. Pada titik ini, perekonomian diasumsikan beroperasi pada tingkat penggunaan kapasitas penuh (*full employment*), di mana semua sumber daya termanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kurva LRAS bersifat vertikal dan mencerminkan output potensial (*potential output*)—yaitu tingkat produksi maksimum yang berkelanjutan yang dapat dihasilkan dengan memanfaatkan semua teknologi dan sumber daya yang tersedia tanpa menimbulkan tekanan inflasioner.

Dalam analisis makroekonomi, kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) bersifat vertikal (inelastis sempurna terhadap tingkat harga). Sifat vertikal ini merefleksikan proposisi klasik bahwa dalam jangka panjang, perekonomian beroperasi pada

tingkat output potensialnya. Implikasi fundamental dari bentuk kurva ini adalah bahwa perubahan dalam tingkat harga agregat (*aggregate price level*) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat output riil jangka panjang (Case, Karl E., Ray C. Fair, dan Sharon E. Oster. 2020).

Perubahan (perpindahan/*shift*) pada kurva LRAS hanya dapat terjadi akibat perubahan pada faktor-faktor riil yang mendasari kapasitas produktif perekonomian. Faktor-faktor determinan ini meliputi:

1. **Kuantitas dan Kualitas Faktor Produksi:** Peningkatan ketersediaan (seperti pertumbuhan angkatan kerja atau akumulasi modal) atau peningkatan kualitas (seperti pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang lebih baik) akan memperluas kapasitas produksi.
2. **Kemajuan Teknologi:** Inovasi teknologi berperan sebagai pendorong utama peningkatan **produktivitas**, yang memungkinkan lebih banyak output dihasilkan dari kombinasi input yang sama, sehingga meningkatkan output potensial.

Dengan demikian, pergeseran kurva LRAS ke kanan menandai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dihasilkan dari peningkatan kapasitas produktif dan efisiensi, terlepas dari fluktuasi tingkat harga.

Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) digambarkan sebagai vertikal, yang mencerminkan sifatnya yang inelastis sempurna terhadap tingkat harga. Bentuk vertikal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi dalam tingkat harga agregat tidak berdampak pada tingkat output riil perekonomian dalam jangka panjang.

Alasan mendasar bagi bentuk vertikal kurva LRAS terletak pada perilaku harga input. Dalam kerangka waktu jangka panjang, seluruh faktor produksi dianggap bersifat variabel. Asumsi ini mengimplikasikan bahwa kenaikan dalam tingkat harga agregat akan diikuti oleh kenaikan yang proporsional dalam seluruh biaya input (seperti upah dan harga bahan baku). Sebaliknya, penurunan tingkat harga juga akan menyebabkan penurunan biaya input secara proporsional.

Akibatnya, margin keuntungan riil perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat harga. Karena biaya bergerak sejalan dengan pendapatan, perubahan harga tidak menciptakan insentif bagi firma untuk menambah atau mengurangi volume produksinya.

Pandangan ini berakar pada perspektif Mazhab Neoklasik, yang berasumsi bahwa perekonomian senantiasa beroperasi pada kapasitas penuh (*full employment*) dalam jangka panjang. Pada titik ini, output telah mencapai tingkat potensialnya, dan sumber daya yang tersedia tidak memungkinkan produksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pandangan Neoklasik, kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal. Implikasinya, tidak hanya perubahan harga, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi biaya produksi dalam jangka pendek (seperti *price shocks* pada upah atau bahan baku) tidak efektif dalam menggeser output agregat jangka panjang. Perubahan pada output potensial hanya dapat terjadi melalui peningkatan kuantitas, kualitas, atau produktivitas faktor-faktor produksi.

Dalam perspektif ekonomi Neoklasik, kurva penawaran agregat jangka panjang bersifat vertikal. Sifat ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam tingkat harga tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat output agregat riil dalam jangka panjang. Lebih lanjut, faktor-faktor berjangka pendek—seperti fluktuasi upah nominal dan harga bahan baku—tidak berdampak pada penawaran agregat jangka panjang, karena diasumsikan seluruh harga input telah menyesuaikan sepenuhnya.

Sebaliknya, perubahan pada penawaran agregat jangka panjang hanya terjadi akibat perubahan pada faktor-faktor fundamental (determinan) jangka panjang. Pergeseran kurva LRAS, misalnya, dapat dipicu oleh:

1. **Peningkatan kuantitas tenaga kerja:** Pertumbuhan angkatan kerja memungkinkan perekonomian memproduksi output yang lebih besar.
2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital):** Peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan pekerja meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang

- memungkinkan terciptanya output lebih banyak dengan input yang sama.
3. **Akumulasi modal fisik:** Penambahan stok modal (seperti mesin, pabrik, dan infrastruktur) meningkatkan kapasitas produksi.
 4. **Kemajuan teknologi:** Inovasi teknologi memungkinkan dihasilkannya output yang lebih besar dari kombinasi input yang sama, sehingga mendorong pertumbuhan produktivitas.

Perubahan positif pada faktor-faktor determinan ini akan menggeser kurva LRAS ke kanan, yang merepresentasikan ekspansi dalam output potensial (*potential output*) perekonomian. Sebaliknya, penurunan pada faktor-faktor tersebut (seperti penyusutan modal atau berkurangnya angkatan kerja) akan menyebabkan kurva LRAS bergeser ke kiri

6.3.6 Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang?

Dalam analisis makroekonomi jangka panjang, fluktuasi tingkat harga agregat serta perubahan pada biaya input (seperti kenaikan upah nominal dan harga bahan baku) tidak memengaruhi posisi kurva penawaran agregat jangka panjang (LRAS). Sebaliknya, pergeseran kurva LRAS hanya disebabkan oleh perubahan pada faktor-faktor fundamental penentu kapasitas produktif perekonomian. Faktor-faktor determinan ini pada dasarnya mencakup kuantitas dan kualitas faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) serta tingkat teknologi.

Peningkatan dalam kuantitas atau kualitas faktor-faktor ini akan mendorong peningkatan output potensial (*potential output*), yang merepresentasikan batas maksimum produksi perekonomian. Peningkatan ketersediaan input memungkinkan ekspansi kapasitas produktif, sementara peningkatan kualitas input dan kemajuan teknologi akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas ini memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang lebih besar dari setiap unit input yang digunakan.

Secara sistematis, determinan utama penawaran agregat jangka panjang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam: Kelimpahan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam.
2. Kuantitas dan Kualitas Modal Manusia (*Human Capital*): Ukuran angkatan kerja dan tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan yang dimilikinya.
3. Kuantitas dan Kualitas Modal Fisik: Volume dan kemutuan (*state-of-the-art*) dari stok barang modal seperti mesin, pabrik, dan infrastruktur.
4. Tingkat Teknologi: Kemajuan dalam proses produksi, inovasi, dan kemampuan teknis yang mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya.

Perubahan positif pada variabel-variabel tersebut akan menggeser kurva LRAS ke kanan, menandai pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

6.3.7 Penyebab kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan

Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) mengalami pergeseran ke kanan utamanya didorong oleh peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi (sumber daya ekonomi). Selain itu, perbaikan kualitas dari faktor-faktor produksi tersebut juga berkontribusi terhadap pergeseran ini.

Pergeseran kurva LRAS ke kanan merepresentasikan ekspansi dalam kapasitas produktif perekonomian. Implikasi penting dari kondisi ini adalah bahwa perekonomian mampu menghasilkan tingkat output potensial yang lebih tinggi tanpa menimbulkan tekanan inflasioner. Dengan kata lain, pertumbuhan output tersebut dapat dicapai dalam kondisi stabilnya tingkat harga umum.

6.3.8 Faktor-Faktor Penentu Pergeseran Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS)

Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) merepresentasikan output potensial perekonomian. Pergeseran

kurva LRAS ke kanan menandakan suatu peningkatan dalam kapasitas produktif jangka panjang (*long-run productive capacity*) perekonomian. Pergeseran ini dipicu oleh pertumbuhan dalam kuantitas, kualitas, atau efisiensi dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor determinannya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Kuantitas Tenaga Kerj Ekspansi dalam ukuran angkatan kerja (*labor force*)—yang dipengaruhi oleh faktor demografis seperti pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kebijakan imigrasi—akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan asumsi tenaga kerja tersebut terserap penuh (*full employment*), hal ini secara langsung memperbesar output potensial yang dapat dihasilkan oleh perekonomian.
2. Akumulasi Modal Manusia (*Human Capital*) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui investasi dalam modal manusia—seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pengalaman kerja—meningkatkan produktivitas rata-rata tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih terampil dan berpengetahuan mampu menghasilkan output yang lebih besar untuk setiap unit input yang digunakan.
3. Ekspansi Ketersediaan Sumber Daya Alam Penemuan deposit sumber daya alam baru atau akses yang lebih mudah terhadap bahan baku mentah (*raw materials*) menambah kuantitas input yang tersedia untuk proses produksi. Kelimpahan sumber daya ini memperluas batas (*frontier*) kapasitas produksi potensial suatu perekonomian.
4. Akumulasi Modal Fisik (*Physical Capital*) Pertumbuhan stok modal bersih (*net capital stock*) melalui investasi barang modal (seperti mesin, pabrik, dan infrastruktur) secara langsung meningkatkan kapasitas produksi. Syarat utama untuk akumulasi modal bersih ini adalah bahwa investasi bruto (*gross investment*) harus melampaui penyusutan (*depreciation*) modal yang ada. Investasi pengganti (*replacement investment*) saja tidak cukup untuk menambah stok modal neto.
5. Kemajuan Teknologi Inovasi teknologi berfungsi sebagai penggerak utama peningkatan produktivitas faktor total (*Total Factor Productivity* - TFP). Kemajuan ini tidak hanya

meningkatkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan tetapi juga meningkatkan produktivitas marjinal dari tenaga kerja dan modal, sehingga memungkinkan dihasilkannya output yang lebih besar dari kombinasi input yang sama.

6. Peningkatan Kualitas Modal Fisik Penggantian teknologi lama dengan teknologi yang lebih maju dan terwujud dalam modal fisik (seperti automasi dan robotika) meningkatkan produktivitas modal itu sendiri. Setiap unit modal fisik baru yang berkualitas lebih tinggi dapat menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan modal lama, sehingga mendorong kurva LRAS ke kanan.

6.3.9 Penyebab kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kiri

Pergeseran kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) ke kiri menandai penurunan dalam output potensial (*potential output*) perekonomian. Kondisi ini merepresentasikan penyusutan kapasitas produktif, yang mengakibatkan perekonomian hanya mampu memproduksi output riil pada tingkat yang lebih rendah (Case, Karl E., Ray C. Fair, dan Sharon E. Oster. 2020) Peristiwa ini dapat dipicu oleh beberapa faktor determinan, antara lain:

1. Depletasi Sumber Daya Alam: Penipisan atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam menyebabkan menyusutnya bahan baku yang esensial bagi proses produksi, sehingga membatasi output maksimum yang dapat dihasilkan.
2. Penurunan Kuantitas Tenaga Kerja: Kontraksi dalam pasokan tenaga kerja—yang dapat disebabkan oleh fenomena demografis seperti populasi yang menua (*aging population*), penurunan tingkat fertilitas, atau emigrasi—akan mengurangi kapasitas produksi secara keseluruhan.
3. Penurunan Kualitas Tenaga Kerja: Memburuknya kualitas modal manusia (*human capital*), misalnya akibat rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan, atau kesehatan, akan menurunkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya mengurangi output potensial.

4. Penyusutan Stok Modal Fisik: Apabila tingkat investasi bruto tidak cukup untuk mengganti modal yang mengalami depresiasi (*capital consumption*), maka stok modal neto akan mengalami penyusutan. Hal ini secara langsung mengurangi kapasitas produktif perekonomian.
5. Penurunan Kualitas Modal Fisik: Ketergantungan pada teknologi yang sudah usang atau tidak efisien menyebabkan produktivitas modal menurun. Setiap unit modal fisik yang ada menghasilkan output yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang lebih mutakhir.
6. Kemunduran Teknologi: Meskipun jarang terjadi, stagnasi atau kemunduran teknologi—yang dapat disebabkan oleh minimnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D)—akan menurunkan produktivitas faktor total (*total factor productivity*), yang merupakan penggerak fundamental pertumbuhan output jangka panjang.

6.3.10 Faktor-Faktor Penggeser Kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (Perubahan Output Potensial)

Pergeseran kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) merepresentasikan perubahan dalam **output potensial** (*potential output*) suatu perekonomian, yang disebabkan oleh transformasi pada faktor-faktor fundamental penentu kapasitas produksi jangka panjang. Faktor-faktor determinan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Perubahan dalam Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya**
Peningkatan kuantitas dan kualitas **faktor produksi** (*factors of production*) akan menggeser kurva LRAS ke kanan. Perubahan ini mencakup:
 - a. Ekspansi populasi dan angkatan kerja.
 - b. Akumulasi modal (*capital accumulation*) melalui peningkatan investasi.
 - c. Peningkatan kualitas modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan dan pelatihan.
 - d. Penemuan dan eksploitasi sumber daya alam baru.
2. **Kemajuan teknologi** (*technological progress*) berperan sebagai pendorong utama peningkatan **produktivitas faktor**

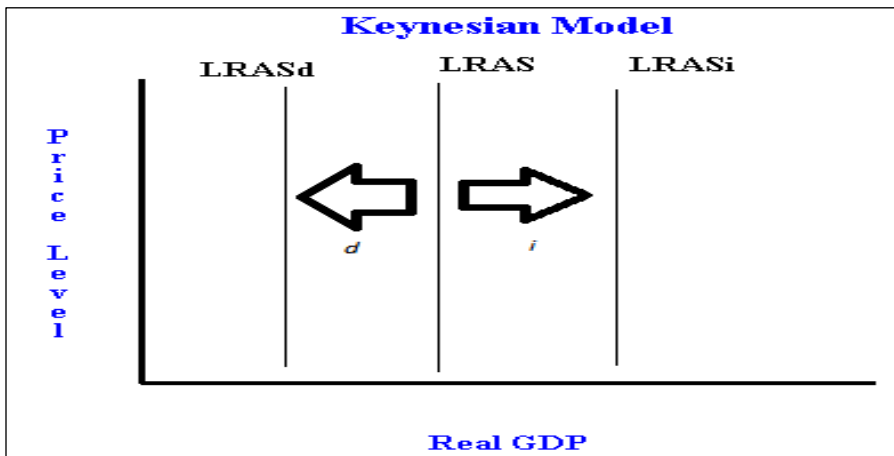
total (*total factor productivity*). Peningkatan efisiensi ini memungkinkan dihasilkannya output yang lebih besar dari kombinasi input yang sama, sehingga menggeser kurva LRAS ke kanan.

3. Perubahan Institusi dan Kerangka Kebijakan

Perbaikan dalam lingkungan institusional dan kebijakan yang menciptakan iklim lebih kondusif bagi pertumbuhan akan menggeser kurva LRAS ke kanan. Perubahan ini meliputi:

- Pencapaian stabilitas politik dan kepastian hukum.
- Peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan sektor keuangan.
- Implementasi kebijakan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan jangka panjang (seperti insentif untuk riset dan pengembangan).

Sebaliknya, degradasi institusi (seperti eskalasi korupsi atau ketidakstabilan politik) akan mengurangi efisiensi dan menggeser kurva LRAS ke kiri.



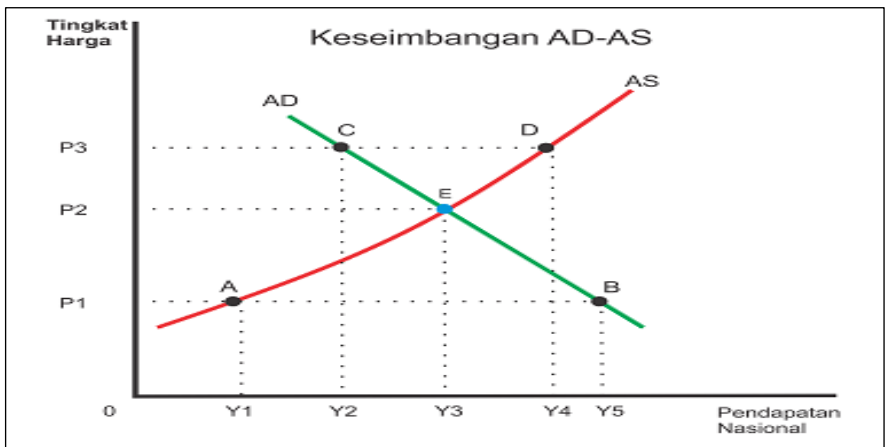
Gambar 6.6. Pergeseran Kurva LRAS

6.4 Keseimbangan AD-AS

Keseimbangan makroekonomi tercapai ketika jumlah output yang diminta (*aggregate demand/AD*) dalam perekonomian sama persis dengan jumlah output yang ditawarkan (*aggregate*

supply/AS). Secara grafis, kondisi ekuilibrium ini direpresentasikan oleh titik perpotongan antara kurva AD dan kurva AS. Pada ilustrasi tersebut, keseimbangan terjadi pada titik E—yakni titik temu antara kurva penawaran agregat dan kurva permintaan agregat. Pada posisi ini, tidak terdapat tekanan inflasioner maupun deflasioner karena seluruh output yang diproduksi terserap oleh permintaan.

Tingkat output keseimbangan (*equilibrium output*) dalam perekonomian ditunjukkan pada level Y, yang merepresentasikan besarnya pendapatan nasional pada kondisi ekuilibrium. Sementara itu, tingkat harga keseimbangan (*equilibrium price level*) terbentuk pada level P, yang menunjukkan harga konsisten dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. (Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D. 2010)



Gambar 6.7. Keseimbangan AD dan AS

Tingkat harga keseimbangan (*equilibrium price level*) dalam model interaksi permintaan dan penawaran agregat tercapai pada titik P_2 , seperti terlihat dalam ilustrasi grafis. Pada setiap tingkat harga di luar P_2 , kondisi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) akan terjadi. Mekanisme penyesuaian melalui interaksi antara permintaan agregat (*aggregate demand*) dan penawaran agregat (*aggregate supply*) akan secara alami mendorong tingkat harga kembali menuju P_2 untuk mencapai keseimbangan.

Sebagai contoh ilustratif, apabila tingkat harga berlaku berada pada P_3 (yang lebih tinggi dari P_2), maka akan terjadi **kelebihan penawaran** (*excess supply*) di pasar. Dalam kondisi ini, kuantitas yang ditawarkan oleh produsen melampaui kuantitas yang diminta oleh konsumen. Implikasi dari ketidakseimbangan ini adalah bahwa kekuatan pasar akan mendorong tingkat harga secara bertahap menurun.

Seiring dengan penurunan tingkat harga tersebut, dua penyesuaian fundamental terjadi secara simultan:

1. Penurunan harga mendorong penurunan kuantitas yang ditawarkan (*quantity supplied*) oleh produsen.
2. Penurunan harga *simultaneously* memicu peningkatan kuantitas yang diminta (*quantity demanded*) oleh konsumen.

Proses dinamis penyesuaian harga, kuantitas supplied, dan kuantitas demanded ini akan berlanjut secara berkelanjutan hingga sistem ekonomi mencapai titik keseimbangan baru (*new equilibrium*) yang stabil antara permintaan agregat dan penawaran agregat (AD-AS).

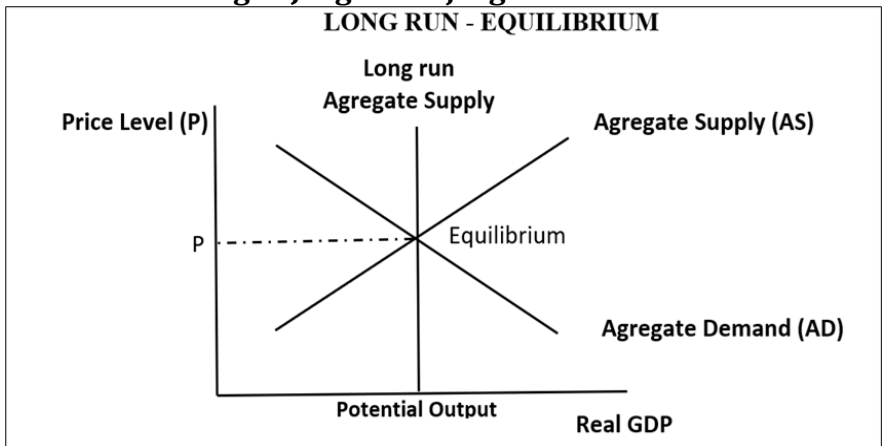
Sebaliknya, apabila tingkat harga berlaku berada di bawah tingkat keseimbangan, misalnya pada P_1 , mekanisme penyesuaian yang berlawanan akan terjadi. Pada tingkat harga ini, tercipta kondisi kelebihan permintaan (*excess demand*) di mana kuantitas yang diminta melampaui kuantitas yang ditawarkan. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan inflasioner (*inflationary pressure*) yang mendorong tingkat harga untuk mengalami kenaikan (Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D. 2010).

Seiring dengan kenaikan tingkat harga tersebut, dua proses penyesuaian utama berlangsung:

1. **Berkurangnya kuantitas yang diminta** (*quantity demanded*) akibat efek penawaran (*substitution effect*) dan pendapatan (*income effect*) dari kenaikan harga.
2. **Meningkatnya kuantitas yang ditawarkan** (*quantity supplied*) seiring dengan semakin menariknya tingkat harga bagi produsen untuk menaikkan produksi.

Proses dinamis ini—yang meliputi kenaikan harga, penurunan permintaan, dan peningkatan penawaran—akan terus berlanjut hingga pasar menemukan titik ekuilibrium baru dalam model permintaan dan penawaran agregat (AD-AS), di mana kuantitas yang diminta kembali sama dengan kuantitas yang ditawarkan.

6.4.1 Keseimbangan Jangka Panjang AD dan AS



Gambar 6.8. Keseimbangan Jangka Panjang AS dan AD

Dalam analisis makroekonomi, Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS) merepresentasikan tingkat output maksimum yang mampu dihasilkan oleh suatu perekonomian pada kapasitas penuhnya. Apabila perekonomian mencapai ekuilibrium jangka panjang, hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian tersebut beroperasi pada tingkat output potensial (*potential output*), suatu kondisi yang juga dikenal dengan istilah kesempatan kerja penuh (*full employment*). Pada kondisi ini, seluruh sumber daya produktif telah termanfaatkan secara optimal, sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) riil aktual akan menyamai besarnya PDB potensial (McConnell, Campbell R., Brue, Stanley L., & Flynn, Sean M. 2021).

6.4.2 Keseimbangan Makroekonomi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Secara empiris, PDB riil aktual (*actual real GDP*) jarang sekali berada tepat pada level PDB potensial (*potential GDP*). Ketidaksesuaian (*disequilibrium*) ini terjadi akibat dinamika perubahan pada permintaan agregat (*aggregate demand*) dan penawaran agregat jangka pendek (*short-run aggregate supply*) yang berlangsung terus-menerus. Fluktuasi dinamis ini menyebabkan keseimbangan makroekonomi jangka pendek senantiasa berayun di sekitar tren pertumbuhan jangka panjang yang ditunjukkan oleh kurva LRAS (*Long-Run Aggregate Supply*). Deviasi berkelanjutan antara output aktual dengan output potensial ini dikenal sebagai kesenjangan output (*output gap*), yang pada hakikatnya membentuk berbagai fase dalam siklus bisnis (*business cycle*), seperti masa ekspansi dan resesi.

Secara konseptual, ekuilibrium jangka panjang digambarkan pada Gambar 6.8, yang memvisualisasikan tiga komponen fundamental: kurva permintaan agregat (AD), kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS), dan kurva penawaran agregat jangka panjang (LRAS). Ekuilibrium jangka panjang (*long-run equilibrium*) tercapai pada titik perpotongan antara kurva AD dengan kurva LRAS. Pada posisi ini, seluruh tingkat harga telah menyesuaikan secara penuh (*fully adjusted*), sehingga perekonomian beroperasi pada tingkat output potensial. Implikasinya, kurva SRAS harus memotong titik perpotongan tersebut, mengingat dalam jangka panjang, harga-harga bersifat fleksibel dan penawaran agregat bersifat independen terhadap tingkat harga.

Dalam perspektif jangka panjang, fleksibilitas harga mengimplikasikan bahwa perubahan permintaan agregat hanya memengaruhi tingkat harga (*price level*) tanpa mengubah output riil, yang tetap berada pada level potensialnya. Sebaliknya, dalam jangka pendek, harga-harga bersifat kaku (*sticky*) sehingga kurva SRAS bersifat elastis terhadap tingkat harga. Akibatnya, fluktuasi permintaan agregat pada periode jangka pendek akan memengaruhi output riil dan tingkat kesempatan kerja, sebelum penyesuaian harga secara penuh mengembalikan perekonomian menuju ekuilibrium jangka panjang, dapat dilihat dari:

1. Kesenjangan Output Positif (Kesenjangan Ekspansioner)

Kesenjangan output positif, atau yang dikenal sebagai kesenjangan ekspansioner (*expansionary gap*), umumnya terjadi pada fase akhir ekspansi dalam suatu siklus bisnis (*business cycle*). Secara grafis, kondisi ini direpresentasikan ketika titik ekuilibrium jangka pendek terletak di sebelah kanan kurva Penawaran Agregat Jangka Panjang (LRAS), yang mengindikasikan bahwa PDB riil aktual (*actual real GDP*) melampaui tingkat PDB potensial (*potential GDP*).

Kesenjangan ini menandakan bahwa permintaan agregat (*aggregate demand*) dalam perekonomian melebihi kapasitas produktif maksimumnya dalam jangka panjang. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan inflasioner (*inflationary pressure*) pada tingkat harga umum. Untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut, perekonomian seringkali meningkatkan impor barang dan jasa dari luar negeri. Akibatnya, neraca perdagangan (*trade balance*) cenderung mengalami defisit selama periode ini akibat tingginya permintaan terhadap produk impor.

2. Kesenjangan Output Negatif (Kesenjangan Deflasioner/Resesional)

Kesenjangan output negatif, yang juga disebut sebagai kesenjangan deflasioner (*deflationary gap*) atau kesenjangan resesional (*recessionary gap*), biasanya terjadi selama fase kontraksi atau resesi. Sebagaimana namanya, kondisi ini menciptakan tekanan deflasioner (*deflationary pressure*) terhadap tingkat harga. Kesenjangan negatif terjadi ketika PDB riil aktual berada di bawah PDB potensial, yang mengindikasikan bahwa perekonomian beroperasi di bawah kapasitas penuhnya.

Pada kondisi ini, sebagian sumber daya produktif tidak termanfaatkan (menganggur), sehingga menimbulkan tekanan penurunan pada tingkat harga. Dampak utama dari kesenjangan ini adalah meningkatnya tingkat pengangguran (*unemployment rate*) dan melambatnya laju inflasi (*inflation*), yang dapat berupa disinflasi (*disinflation*) atau dalam kasus ekstrem, deflasi (*deflation*).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun dinamakan kesenjangan deflasi, outcome yang terjadi tidak selalu berupa deflasi absolut, melainkan lebih sering berupa perlambatan laju inflasi (disinflasi).

6.4.3 Keseimbangan Jangka Pendek

Teori kekakuan upah (*wage rigidity theory* atau *sticky wage theory*) menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas. Jika upah kaku, maka margin keuntungan lebih tinggi ketika tingkat harga naik. Situasi ini menginsentif perusahaan untuk meningkatkan output untuk meraih lebih banyak keuntungan. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, karena upah tidak berubah, keuntungan turun, memaksa mereka memangkas produksi. Upah tidak fleksibel dan berubah secara proporsional ketika tingkat harga naik karena, diantaranya, kontrak kerja. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak segera merevisi kontrak pekerja mereka dengan menaikkan upah untuk menyesuaikan kenaikan tingkat harga. Begitu juga, ketika tingkat harga turun, upah juga tidak akan serta merta turun. Sebagai hasilnya, kontrak kerja membuat upah kaku (Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. 2018)

Selain kontrak kerja formal, rigiditas upah nominal (*nominal wage rigidity*) juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor kelembagaan, di antaranya:

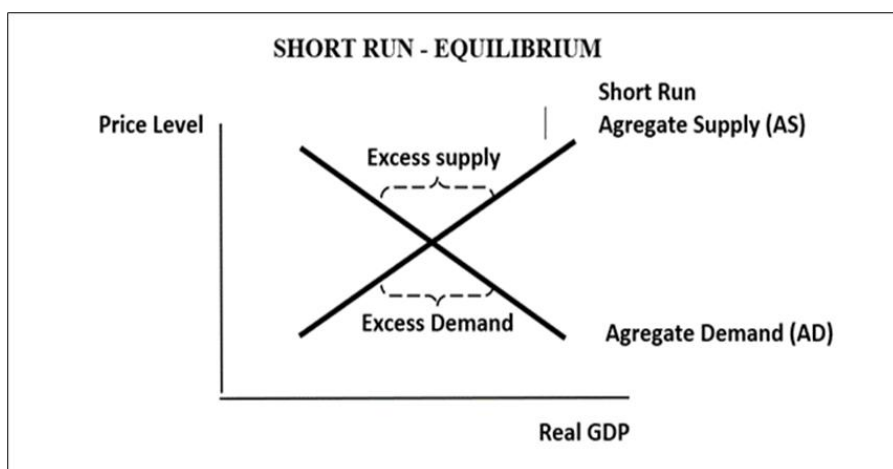
1. Penerapan upah minimum (*minimum wage*)
2. Regulasi pasar tenaga kerja (*labor market regulations*)
3. Kekuatan bargaining serikat pekerja (*trade union bargaining power*)

Dalam analisis mekanisme penyesuaian menuju ekuilibrium, apabila tingkat harga umum (*aggregate price level*) berada di atas tingkat ekuilibriumnya, maka penawaran agregat (*aggregate supply*) akan melebihi permintaan agregat (*aggregate demand*), sehingga menciptakan kelebihan penawaran (*excess supply*) di dalam perekonomian. Kondisi ini mengakibatkan akumulasi persediaan barang yang tidak terjual (*inventory buildup*), yang pada akhirnya memicu produsen untuk menurunkan harga jual.

Penurunan tingkat harga ini akan mendorong kenaikan permintaan agregat melalui beberapa saluran transmisi:

1. **Efek Kekayaan Riil** (*Real Balance Effect*): Penurunan harga meningkatkan nilai riil dari kekayaan (*wealth*) yang dimiliki rumah tangga, sehingga merangsang pengeluaran konsumsi.
2. **Efek Suku Bunga** (*Interest Rate Effect*): Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan kebutuhan akan uang tunai untuk transaksi, yang pada gilirannya menurunkan suku bunga dan mendorong investasi.
3. **Efek Nilai Tukar** (*Exchange Rate Effect*): Dalam perekonomian terbuka, penurunan harga domestik meningkatkan daya saing yang mendorong ekspor neto.

Sebagai hasilnya, komponen-komponen permintaan agregat dari keempat sektor (konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto) mengalami peningkatan. Proses penyesuaian ini akan berlanjut secara bertahap hingga perekonomian mencapai titik ekuilibrium makroekonomi (*macroeconomic equilibrium*) yang baru.



Gambar 6.9. Keseimbangan Jangka Pendek

6.4.4 Dinamika Ketidakseimbangan Harga dan Penyesuaian Menuju Ekuilibrium

Sebaliknya, apabila tingkat harga aktual berada di bawah tingkat harga ekuilibrium, akan timbul situasi kelangkaan (*shortage*) dalam perekonomian. Merespons kondisi ini, produsen akan

cenderung menaikkan harga output dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, kenaikan harga tersebut akan menyebabkan penurunan permintaan agregat (*aggregate demand*) akibat efek pendapatan riil dan efek substitusi. Proses penyesuaian harga ini akan berlanjut hingga perekonomian mencapai titik ekuilibrium baru, di mana permintaan agregat kembali seimbang dengan penawaran agregat.

6.4.5 Sifat Kurva Penawaran Agregat dalam Kerangka Waktu yang Berbeda

Dalam perspektif jangka pendek, kurva penawaran agregat jangka pendek (*Short-Run Aggregate Supply*/SRAS) menunjukkan hubungan positif dengan tingkat harga. Hal ini merefleksikan fenomena dimana kenaikan tingkat harga mendorong peningkatan output yang ditawarkan, dan sebaliknya. Secara grafis, kurva SRAS digambarkan dengan kemiringan positif (*upward sloping*) pada sumbu yang memetakan tingkat harga (sumbu Y) terhadap output agregat (sumbu X).

Sementara itu, dalam jangka panjang—yang didefinisikan sebagai periode dimana semua faktor produksi bersifat variabel—perubahan tingkat harga akan diikuti oleh penyesuaian yang proporsional pada biaya input (*input costs*), termasuk upah nominal. Sebagai contoh, kenaikan tingkat harga umum akan diimbangi oleh kenaikan upah nominal yang proporsional. Mekanisme penyesuaian penuh ini menyebabkan margin keuntungan (*profit margin*) perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan harga, sehingga perusahaan tidak memiliki insentif untuk mengubah tingkat produksinya. Implikasinya, perubahan tingkat harga tidak memengaruhi output agregat dalam jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka panjang (*Long-Run Aggregate Supply*/LRAS) bersifat vertikal pada level output potensial.

6.4.6 Determinan Pergeseran Kurva Penawaran Agregat

Perubahan pada penawaran agregat jangka pendek terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memengaruhi biaya produksi, seperti:

1. Perubahan harga bahan baku

2. Perubahan upah nominal
3. Kebijakan perpajakan dan pemberian subsidi
4. Fluktuasi nilai tukar mata uang

Sebaliknya, faktor-faktor tersebut tidak menggeser kurva LRAS. Penawaran agregat jangka panjang hanya akan bergeser akibat perubahan dalam kuantitas atau kualitas faktor produksi (*factors of production*). Kemajuan teknologi, akumulasi modal fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penemuan sumber daya alam baru merupakan contoh faktor yang dapat meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan menggeser kurva LRAS ke kanan. Perlu dicatat bahwa faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi penawaran jangka pendek, namun dampaknya terhadap kapasitas produktif jangka panjang bersifat lebih fundamental dan berkelanjutan.

6.5 Analisis Dinamis: Menuju Keseimbangan Jangka Panjang

6.5.1 Analisis Dinamis: Menuju Keseimbangan Jangka Panjang

Analisis dinamis merupakan pendekatan krusial dalam ilmu ekonomi (terutama makroekonomi dan teori pertumbuhan) untuk memahami bagaimana suatu perekonomian atau sistem berevolusi dari waktu ke waktu dan apakah serta bagaimana ia bergerak menuju suatu keadaan stabil yang disebut keseimbangan jangka panjang (*long-run equilibrium*).

6.5.2 Analisis mendalam konsep keseimbangan jangka panjang meliputi :

1. Memahami Keseimbangan Jangka Panjang (*Long-Run Equilibrium*):

Long Run Equilibrium adalah keadaan di mana variabel-variabel kunci ekonomi (seperti output, kesempatan kerja, kapital, tingkat harga, tingkat upah) telah menetap pada nilai-nilai konstan atau tumbuh pada tingkat yang stabil dan berkelanjutan. Tidak ada tekanan internal yang mendorong perubahan lebih lanjut.

Gejala yang dapat dilihat dalam kesesimbangan jangka panjang:

- a. Stabilitas: Sistem tidak memiliki kecenderungan untuk berubah *dari dirinya sendiri* pada titik ini (dalam kondisi *ceteris paribus*).
 - b. Konsistensi: Keputusan pelaku ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah) selaras dan tidak ada insentif untuk mengubah perilaku secara agregat.
 - c. Pemanfaatan Penuh: Dalam banyak model (seperti model klasik/neoklasik), keseimbangan jangka panjang sering dikaitkan dengan penggunaan sumber daya secara penuh (*full employment*) dan output potensial (*potential output*).
 - d. Steady State: Istilah lain yang sering digunakan, terutama dalam model pertumbuhan (seperti Model Solow), merujuk pada keadaan di mana variabel per kapita (seperti modal per pekerja, output per pekerja) konstan atau tumbuh dengan laju konstan.
2. Esensi Analisis Dinamis: Analisis dinamis tidak hanya fokus pada dimana keseimbangan berada, tetapi lebih pada:
- a. Bagaimana sistem bergerak dari satu titik ke titik lain? Bagaimana respons ekonomi terhadap *shock* (kejutan) seperti perubahan teknologi, kebijakan fiskal/moneter, perubahan preferensi, atau krisis?
 - b. Apakah jalur penyesuaian menuju keseimbangan stabil? Apakah fluktuasi mereda seiring waktu atau justru membesar?
 - c. Seberapa cepat konvergensi terjadi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendekati keseimbangan jangka panjang setelah gangguan?
 - d. Bagaimana ekspektasi pelaku ekonomi mempengaruhi dinamika? Ekspektasi adaptif vs. ekspektasi rasional memainkan peran penting dalam kecepatan dan pola penyesuaian.
3. Mekanisme Menuju Keseimbangan Jangka Panjang: proses penyesuaian melibatkan interaksi kompleks berbagai kekuatan pasar dan kebijakan:

- a. Penyesuaian Harga dan Upah: Dalam model klasik/neoklasik, fleksibilitas harga dan upah adalah kunci. Kelebihan penawaran/permintaan di pasar barang atau tenaga kerja akan mendorong perubahan harga/upah yang mengembalikan keseimbangan.
 - b. Penyesuaian Stok Modal: Investasi (yang meningkatkan stok modal) dan depresiasi (yang mengurangnya) berinteraksi untuk mendorong ekonomi menuju tingkat modal *steady-state* per pekerja (Model Solow).
 - c. Peran Kebijakan: Bank sentral menggunakan kebijakan moneter (suku bunga) untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengarahkan ekonomi menuju target inflasi dan output potensial. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal (pajak, belanja) untuk tujuan serupa atau stabilisasi.
 - d. Pembentukan Ekspektasi: Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membentuk ekspektasi tentang inflasi masa depan, pertumbuhan, atau kebijakan sangat mempengaruhi keputusan konsumsi, investasi, dan penentuan upah/harga saat ini, sehingga mempengaruhi jalur dinamis.
4. Pentingnya Analisis Dinamis:
- a. Relevansi Kebijakan: Pemahaman tentang jalur transisi sangat penting bagi pembuat kebijakan. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan dampak jangka pendek *dan* jalur menuju dampak jangka panjangnya. Kebijakan yang buruk bisa menciptakan ketidakstabilan atau memperlambat konvergensi.
 - b. Memahami Fluktuasi Ekonomi (Siklus Bisnis): Analisis dinamis adalah inti dari teori siklus bisnis. Ia menjelaskan bagaimana ekonomi bereaksi terhadap *shock*, mengalami booming dan resesi, dan (dalam teori tertentu) akhirnya kembali ke jalur pertumbuhan jangka panjangnya.
 - c. Evaluasi Model Ekonomi: Sebuah model ekonomi tidak hanya dinilai dari kemampuannya mendefinisikan keseimbangan, tetapi juga dari kemampuannya mereplikasi pola dinamika yang diamati di dunia nyata (misalnya, persistensi inflasi, kelambatan respon output).

- d. Perencanaan Jangka Panjang: Bagi pelaku bisnis dan investor, memahami dinamika menuju keseimbangan membantu dalam perencanaan strategis dan manajemen risiko.
5. Tantangan dalam Analisis Dinamis:
- a. Kompleksitas: Sistem ekonomi nyata sangat kompleks dengan banyak interaksi dan umpan balik.
 - b. Ekspektasi: Memodelkan pembentukan ekspektasi secara akurat sulit dilakukan.
 - c. Ketidaklenturan Harga/Upah (*Sticky Prices/Wages*): Bukti empiris menunjukkan harga dan upah tidak selalu menyesuaikan secara instan dan sempurna, seperti asumsi model klasik. Ini memperlambat penyesuaian dan menciptakan fluktuasi jangka pendek.
 - d. Shock Eksternal: Ekonomi terus-menerus terkena *shock* baru sebelum sepenuhnya menyesuaikan diri dari *shock* sebelumnya.
 - e. Hysteresis: Beberapa *shock* (terutama yang besar seperti resesi dalam) dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kapasitas produktif (output potensial) atau pasar tenaga kerja, sehingga menggeser keseimbangan jangka panjang itu sendiri.
6. Contoh Aplikasi:
- a. Model Solow: Menganalisis bagaimana akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi menggerakkan ekonomi menuju *steady-state growth path*.
 - b. Model AD-AS Dinamis: Memperluas model AD-AS statis dengan memasukkan ekspektasi inflasi (misalnya, Kurva Phillips) dan menggambarkan bagaimana ekonomi bereaksi terhadap *shock* permintaan atau penawaran, menuju tingkat harga jangka panjang dan output potensial.
 - c. Model DSGE (*Dynamic Stochastic General Equilibrium*): Model canggih yang mensimulasikan ekonomi dengan banyak pelaku (rumah tangga, perusahaan) yang membuat keputusan optimal secara dinamis di bawah ketidakpastian, dan digunakan secara luas oleh bank sentral untuk analisis kebijakan.

6.6 Kesimpulan

Analisis dinamis adalah lensa penting untuk melihat ekonomi tidak sebagai foto statis, tetapi sebagai film yang sedang berjalan. Memahami bagaimana sistem bergerak dari ketidakseimbangan menuju keseimbangan jangka panjang (atau bahkan apakah ia bisa mencapainya secara stabil) sangat penting untuk:

1. Membedakan fluktuasi jangka pendek dari tren jangka panjang.
2. Merancang kebijakan yang efektif tidak hanya untuk mencapai target, tetapi juga untuk meminimalkan gangguan selama transisi.
3. Memprediksi konsekuensi dari *shock* dan kebijakan ekonomi.
4. Memahami sifat dasar ketahanan dan stabilitas suatu sistem ekonomi.

Tanpa analisis dinamis, pemahaman kita tentang ekonomi akan terfragmentasi dan tidak lengkap, terutama dalam merespons perubahan dan merencanakan masa depan yang berkelanjutan. Model AD-AS memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleksitas perekonomian makro. Model ini membedakan dengan jelas perilaku ekonomi jangka pendek (dengan kekakuan harga dan upah) dan jangka panjang (dengan penyesuaian penuh dan determinasi output oleh faktor riil). Dengan model ini, kita dapat menganalisis penyebab inflasi, resesi, stagflasi, serta mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral dalam menstabilkan perekonomian. Pemahaman akan proses penyesuaian dari keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang juga sangat krusial.

DAFTAR PUSTAKA

- Mankiw, N. Gregory.(2022). *Macroeconomics* (11th ed.). Worth Publishers.
- Blanchard, Olivier, Amighini, Alessia, & Giavazzi, Francesco.(2021). *Macroeconomics: A European Perspective* (4th ed.). Pearson.
- Dornbusch, Rudiger, Fischer, Stanley, & Startz, Richard.(2018). *Macroeconomics* (13th ed.). Mc.Graw-Hill Education. Bab 6: Aggregate Supply: Wages, Prices, and Unemployment
- Karl E. Case, Ray C. Fair, dan Sharon E. Oster. (2020), *Principles of Economics*, (13th ed.). Pearson Education Limited, Harlow, United Kingdom
- Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- McConnell, Campbell R., Brue, Stanley L., & Flynn, Sean M.(2021). *Macroeconomics* (22nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi Ketiga, Bab 9: Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat). PT RajaGrafindo Persada.

BAB 7

PENDAPATAN NASIONAL

Oleh Wiljan Atfentia Kotngoran

7.1 Pendahuluan

Pendapatan nasional adalah matrik penting dalam penelitian makro ekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perekonomian. Jumlah total uang yang diterima oleh semua pelaku ekonomi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu (eringkali setahun) disebut pendapatan nasional. Pendapatan dari perdagangan internasional, investasi, serta produksi barang dan jasa semuanya termasuk dalam data ini. Memahami konsep pendapatan nasional sangat penting tidak hanya untuk tujuan ilmiah tetapi juga untuk pengembangan kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat menemukan ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam masyarakat, menilai laju pertumbuhan ekonomi, dan memutuskan arah kebijakan fiskal dan moneter menggunakan analisis pendapatan nasional (Sukirno, 2016).

Selanjutnya, pendapatan nasional digunakan sebagai dasar untuk menghitung ukuran turunan seperti PDB, PNB, dan PNI, serta sebagai standar untuk mengevaluasi kesejahteraan antar negara (Mankiw, 2021). Namun pada kenyataannya, ada sejumlah kendala dalam menentukan pendapatan nasional, termasuk keberadaan sektor informal, data yang tidak lengkap, dan perubahan nilai tukar mata uang dalam ekonomi terbuka. Oleh karena itu, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang komponen, kendala, dan metodologi yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional.

7.2 Sejarah dan Perkembangan Teori Pendapatan Nasional

Satu indikator penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi sebuah negara adalah pendapatan negara. Ini adalah ide yang tidak

muncul secara kebetulan; sebaliknya, itu muncul melalui siklus sejarah yang panjang dari perkembangan teori ekonomi selama bertahun-tahun. Teori tentang pendapatan nasional berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi global. Ini beralih dari teori klasik dan Keynesian ke teori yang lebih kompleks di era modern.

Pada abad ke-18, ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus mulai menekankan betapa pentingnya produksi dan distribusi dalam perekonomian. Dalam *The Wealth of Nations* (1776), Adam Smith menekankan bahwa produktivitas dan spesialisasi pekerja memengaruhi kemakmuran suatu negara. Ekonomi klasik berpendapat bahwa pendorong utama pendapatan nasional adalah keterbukaan perdagangan, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Ricardo lebih memperhatikan teori nilai tenaga kerja dan alokasi pendapatan di antara kapitalis, pekerja, dan pemilik tanah. Perspektif tradisional berpendapat bahwa mekanisme pasar dapat membantu keseimbangan ekonomi dan pertumbuhan.

Saat abad ke-20 dimulai, Depresi Hebat tahun 1929–1939 menghadirkan rintangan serius bagi teori klasik. Pengangguran meroket, produksi turun drastis, dan kekuatan pasar tidak mampu secara otomatis memulihkan ekonomi. Di sinilah ide-ide revolusioner John Maynard Keynes pertama kali muncul. Keynes menekankan bahwa permintaan agregat menentukan pendapatan nasional dalam bukunya tahun 1936, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Dia menegaskan bahwa volatilitas ekonomi sering kali disebabkan oleh investasi swasta yang bervariasi. Oleh karena itu, diyakini bahwa untuk menjaga stabilitas pendapatan nasional dan menurunkan pengangguran, keterlibatan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter diperlukan (Keynes 1936/2018).

Filsafat Keynesian mendominasi kebijakan ekonomi di banyak negara setelah Perang Dunia II. Namun pada tahun 1970-an, stagflasi—tingkat pengangguran tinggi dan inflasi tinggi—muncul, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Keynesian. Sebagai akibat dari keadaan ini, kelompok Monetaris Milton Friedman mengembangkan teori baru. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa jumlah uang yang beredar memiliki dampak

signifikan terhadap pendapatan nasional. Dilihat ideal bagi pemerintah untuk memainkan peran yang lebih kecil dan membiarkan pasar melakukan lebih banyak.

Selanjutnya, muncul gagasan ekonomi pertumbuhan, seperti yang dikemukakan oleh Trevor Swan dan Robert Solow pada tahun 1950-an. Menurut hipotesis ini, tingkat pendapatan nasional jangka panjang ditentukan oleh faktor-faktor seperti ekspansi tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, inovasi, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi nasional, menurut hipotesis pertumbuhan endogen, yang dikemukakan oleh Paul Romer dan Robert Lucas pada akhir abad ke-20 (Romer, 1986; Lucas 1988).

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pendapatan nasional telah diperluas untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti distribusi pendapatan, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat, selain dievaluasi berdasarkan PDB atau PNB. Untuk mengatasi kekurangan PDB sebagai ukuran kesejahteraan, lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkenalkan metrik tambahan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gagasan pembangunan berkelanjutan (World Bank, 2022).

Akibatnya, evolusi teori pendapatan nasional menggambarkan bagaimana dinamika ekonomi dipengaruhi oleh perubahan keadaan global. Teori Keynesian, yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dan permintaan agregat, serta teori klasik, yang berfokus pada mekanisme pasar, digantikan oleh model kontemporer yang lebih canggih yang memprioritaskan pengetahuan, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan (Blanchard, 2021). Semua ini menunjukkan bahwa teori pendapatan nasional akan terus berubah untuk mencerminkan kesulitan yang dihadapi suatu negara dan perekonomian global.

7.3 Manfaat Pendapatan Nasional

Salah satu konsep fundamental dalam makroekonomi adalah pendapatan nasional, yang berfungsi sebagai ukuran untuk menilai kinerja suatu perekonomian. Definisi paling sederhana dari pendapatan nasional adalah nilai total dari semua barang dan jasa

jadi yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama periode waktu tertentu, seringkali satu tahun. Dengan menghitung pendapatan nasional, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, produktivitas, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Keinginan untuk cara yang lebih sistematis dalam mengukur dampak pembangunan ekonomi melahirkan ide ini. Karena kegiatan produksi dalam ekonomi modern melibatkan banyak sektor dan masukan produksi, diperlukan teknik khusus untuk mencegah keluaran dihitung dua kali. Dengan demikian, pendekatan produksi (nilai tambah), pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran adalah tiga metode yang digunakan ekonom untuk menentukan pendapatan nasional.

Pendekatan produksi menghitung nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi untuk memeriksa pendapatan nasional dari sisi output. Di sisi lain, pendekatan pendapatan menentukan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan imbalan yang diterima oleh faktor-faktor produksi—seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Sebaliknya, metode pengeluaran menganggap pendapatan nasional sebagai jumlah semua pengeluaran akhir yang dilakukan oleh perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan sektor luar negeri. Karena produksi, pendapatan, dan pengeluaran pada dasarnya adalah tiga sisi dari aktivitas ekonomi yang sama, ketiga strategi ini pada dasarnya akan menghasilkan nilai pendapatan nasional yang sama.

Pendapatan nasional penting karena berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan dan tolok ukur kemajuan ekonomi. Dengan mengetahui pendapatan nasional per kapita, pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan regional dan menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, analisis pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, termasuk perubahan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan inflasi.

Oleh karena itu, pendapatan nasional memberikan gambaran holistik tentang bagaimana sumber daya suatu negara digunakan untuk mencapai kekayaan, bukan hanya angka statistik. Untuk membuat jalur pertumbuhan lebih terukur dan sejalan dengan

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendapatan nasional.

7.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional

Salah satu hal utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasionalnya. Kemampuan suatu negara untuk menggunakan sumber dayanya dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu ditunjukkan oleh kuantitas pendapatan nasionalnya. Namun demikian, sejumlah faktor lokal dan internasional memengaruhi pendapatan nasional, sehingga tidak selalu meningkat setiap tahun (Mankiw, 2020).

Sumber daya alam adalah komponen kunci dimana kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang bernilai tinggi sangat ditingkatkan oleh kelimpahan sumber daya alamnya, termasuk mineral, minyak, gas, dan lahan subur. Namun, pendapatan nasional yang besar tidak selalu dijamin oleh kekayaan alam. Cara bangsa mengelola sumber dayanya secara bertanggung jawab dan menghindari ketergantungan berlebihan pada sektor primer akan berdampak signifikan pada hal ini (Todaro & Smith, 2020).

Sumber daya manusia (SDM) adalah pertimbangan berikutnya. Produktivitas nasional sangat bergantung pada tingkat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja. Nilai tambah yang lebih besar sering dihasilkan oleh negara-negara dengan tenaga kerja yang sangat terdidik dan terampil. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan nasional jangka panjang bergantung pada investasi dalam perawatan kesehatan dan pendidikan.

Teknologi dan modal juga merupakan faktor penting. Infrastruktur, mesin, peralatan, dan alat manufaktur lainnya yang menopang aktivitas ekonomi semuanya dianggap sebagai bentuk modal. Memanfaatkan teknologi kontemporer meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang meningkatkan output nasional. Pertumbuhan pendapatan nasional umumnya lebih kuat di negara-negara yang dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi

seperti otomatisasi dan digitalisasi dibandingkan dengan negara-negara yang tertinggal (Blanchard, 2021).

Kebijakan pemerintah kemudian menjadi pusat perhatian. Lingkungan ekonomi yang menguntungkan untuk investasi dan konsumsi dapat diciptakan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Misalnya, stabilitas harga, pengendalian inflasi, administrasi pajak, dan pengeluaran pemerintah semuanya memiliki dampak langsung pada aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Selanjutnya, stabilitas politik dan hukum sangat penting karena akan meningkatkan kepercayaan di kalangan investor domestik dan asing (Sukrino, 2016).

Selain itu, faktor eksternal—terutama kondisi global dan perdagangan internasional—tidak dapat diabaikan. Negara-negara yang berorientasi ekspor akan mengalami peningkatan pendapatan valuta mereka. Di sisi lain, ketergantungan yang signifikan pada impor dapat membebani pendapatan negara. Pendapatan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas internasional, krisis global, dan hubungan perdagangan antar negara.

Dengan demikian, baik pengaruh internal maupun eksternal memengaruhi pendapatan nasional. Faktor-faktor utama yang memengaruhi perubahan pendapatan nasional meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya alam, modal dan teknologi, kualitas sumber daya manusia, peraturan pemerintah, dan kondisi perdagangan internasional. Strategi pembangunan komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang bijaksana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan adopsi teknologi, stabilitas makroekonomi, dan ekspansi pasar ekspor diperlukan untuk memastikan pendapatan nasional terus meningkat secara berkelanjutan.

7.5 Konsep Pendapatan Nasional

Salah satu konsep kunci dalam makroekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perekonomian adalah pendapatan nasional. Definisi paling sederhana dari pendapatan nasional adalah nilai total dari semua barang dan jasa jadi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama periode waktu tertentu, seringkali satu tahun. Angka ini menunjukkan kapasitas

ekonomi suatu negara untuk memanfaatkan sumber dayanya dalam menghasilkan kekayaan (Sukrino, 2016).

Karena dapat mencirikan tiga aspek utama aktivitas ekonomi—produksi, pendapatan, dan pengeluaran—konsep pendapatan nasional sangat penting. Nilai tambah total yang dihasilkan oleh beberapa sektor ekonomi, termasuk perdagangan, industri, jasa, dan pertanian, ditampilkan oleh pendapatan nasional dari sisi produksi. Dari perspektif pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh faktor-faktor produksi, termasuk upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan pemilik bisnis. Jumlah total yang dibelanjakan oleh rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan sektor luar negeri untuk perolehan barang dan jasa jadi, di sisi lain, mewakili pendapatan nasional.

Pada kenyataannya, pendapatan nasional ditentukan menggunakan tiga metode utama. Yang pertama adalah pendekatan nilai tambah atau produksi, yang menentukan pendapatan nasional dengan mengurangi biaya perantara dari nilai output di semua sektor. Pendekatan pendapatan, yang menjumlahkan semua pembayaran faktor, berada di urutan kedua. Metode ketiga adalah pendekatan pengeluaran, yang menggunakan rumus $Y=C+I+G+(X-M)$ untuk menentukan pendapatan nasional dari sudut pandang semua pengeluaran akhir yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Karena mewakili aktivitas ekonomi yang sama, ketiga metode ini pada dasarnya akan memberikan nilai yang sama (Mankiw, 2020; Sukirno, 2016).

Pendapatan nasional lebih dari sekadar angka; itu adalah komponen kunci pertumbuhan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi tahunan dapat dievaluasi menggunakan pendapatan nasional. Kedua, dengan menghitung pendapatan nasional per kapita, indikator ini membantu menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketiga, perencanaan pembangunan jangka panjang dan pembentukan kebijakan moneter dan fiskal keduanya dapat didasarkan pada data pendapatan nasional (Todaro & Smith, 2020; Blanchard, 2021).

Oleh karena itu, konsep pendapatan nasional memiliki makna strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

selain memberikan representasi numerik produktivitas suatu negara. Pemahaman komprehensif tentang pendapatan nasional dapat membantu pemerintah, akademisi, dan entitas korporasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan (Blanchard, 2021).

7.6 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Salah satu hal utama yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional dihitung untuk menentukan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat selama periode waktu tertentu. Data ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan laju pertumbuhan ekonomi. Pendekatan produksi (nilai tambah), pendekatan pendapatan (pendapatan faktor), dan pendekatan pengeluaran (total pengeluaran di semua sektor ekonomi) adalah tiga metode utama yang digunakan dalam praktik untuk menentukan pendapatan nasional (Mankiw, 2020). Bersama-sama, ketiga metode ini memberikan pemahaman komprehensif tentang kegiatan ekonomi suatu negara.

7.6.1 Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi, juga dikenal sebagai pendekatan nilai tambah, menghitung pendapatan nasional dengan menghitung jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Nilai tambah adalah perbedaan antara nilai input (biaya bahan baku atau bantuan yang dibeli dari pihak lain) dan nilai output (penjualan).

$$\text{Pendapatan Nasional} = \sum (\text{Nilai Output} - \text{Biaya Antara})$$

Sektor Produksi yang Dihitung yakni : Pertanian, kehutanan, perikanan; Pertambangan; Industri pengolahan; Listrik, gas, air bersih; Perdagangan, hotel, restoran; Transportasi dan komunikasi; Jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; Jasa pemerintahan dan jasa lainnya. Kelebihan pendekatan ini adalah menghindari perhitungan ganda karena hanya menghitung nilai tambah dan

kelemahannya yakni sulit dilakukan bila data biaya antara dan output tidak lengkap(Sukrino, 2016; Mankiw, 2020).

Contoh Soal 1

Tabel berikut menunjukkan data output dan biaya antara dari tiga sektor ekonomi (dalam miliar rupiah):

Sektor	Nilai Output	Biaya Antara
Pertanian	500	200
Industri	800	400
Jasa	700	300

Hitunglah Pendapatan Nasional dengan pendekatan produksi (nilai tambah)!

Penyelesaian

1. Nilai tambah Pertanian = $500 - 200 = 300$
2. Nilai tambah Industri = $800 - 400 = 400$
3. Nilai tambah Jasa = $700 - 300 = 400$

Pendapatan Nasional = $300 + 400 + 400 = 1.100$ miliar rupiah

7.6.2 Pendekatan Pendapatan

Metode pendapatan menghitung pendapatan nasional dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima faktor produksi selama periode waktu tertentu dalam proses produksi. Tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan adalah komponen produksi. Komponen Pentingnya yakni Upah/Gaji (Wages and Salaries): kompensasi untuk karyawan. Sewa: pembayaran untuk jasa faktor tanah. Bunga (Bunga): membayar jasa modal. Laba (Profit): Keuntungan perusahaan

Secara umum dirumuskan:

Pendapatan Nasional = Upah + Sewa + Bunga + Laba

Dalam hal ini Pendapatan transfer (seperti subsidi, santunan, atau bantuan sosial) tidak dihitung karena tidak berasal dari kegiatan produksi serta Perhitungan dilakukan untuk periode tertentu, biasanya setahun (Sukirno, 2016).

Contoh Soal 1

Tabel berikut menunjukkan data balas jasa faktor produksi di suatu negara (dalam miliar rupiah):

Komponen	Nilai
Upah/Gaji	400
Sewa	100
Bunga	150
Laba Usaha	250

Hitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan!

Penyelesaian

Pendapatan Nasional=400+100+150+250=900 miliar rupiah

7.6.3 Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional dari total pengeluaran akhir seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya satu tahun).

Metode ini melihat perekonomian dari sisi permintaan agregat, yaitu jumlah seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa akhir. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan:

1. C (Consumption/ Konsumsi Rumah Tangga): pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa.
2. I (Investment/ Investasi): pengeluaran perusahaan untuk menambah barang modal.
3. G (Government Expenditure/ Pengeluaran Pemerintah): belanja pemerintah untuk barang dan jasa.
4. X (Export/ Ekspor): penjualan barang dan jasa ke luar negeri.
5. M (Import/ Impor): pembelian barang dan jasa dari luar negeri.

Rumus Umum

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X-M = Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Metode ini Hanya pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang dihitung, bukan barang perantara (untuk menghindari double counting) serta nilai Impor dikurangi karena bukan bagian dari produksi dalam negeri (Todaro & Smith, 2020).

Contoh Soal 1

Data pengeluaran suatu negara (dalam miliar rupiah):

1. Konsumsi rumah tangga (C) = 500
2. Investasi (I) = 200
3. Pengeluaran pemerintah (G) = 300
4. Ekspor (X) = 100
5. Impor (M) = 80

Hitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran!

Penyelesaian

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 500 + 200 + 300 + (100 - 80)$$

$$Y = 500 + 200 + 300 + 20 = 1.020 \text{ miliar rupiah}$$

7.7 Perkembangan Pendapatan Nasional Di Indonesia

Meskipun menghadapi masalah struktural internal dan dinamika global, perkembangan pendapatan nasional Indonesia selama 20 tahun terakhir menunjukkan tren yang menguntungkan. Indonesia berhasil menjaga pertumbuhannya relatif stabil. Indonesia pulih melalui penyesuaian kebijakan makroekonomi setelah krisis ekonomi Asia tahun 1998. Kecuali pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan krisis global tahun 2008–2009, pertumbuhan PDB tahunan rata-rata berkisar antara 5 dan 6 persen (BPS, 2023).

Untuk pertama kalinya sejak krisis tahun 1998, pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi minus 2,07 persen pada tahun 2020. Namun, pemulihan itu cepat, dengan pertumbuhan positif meningkat pada tahun 2022 (5,31%) dan kembali pada tahun 2021 (3,69%). Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di sekitar 5% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menggambarkan betapa tangguhannya perekonomian negara dalam menghadapi isu-isu global seperti inflasi, perubahan harga minyak, dan ketidakpastian geopolitik. Dari sudut pandang struktural, sektor

manufaktur terutama industri makanan dan minuman serta berbasis sumber daya alam pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terus menopang mata pencaharian lokal adalah sumber utama pendapatan nasional Indonesia. Komunikasi, perdagangan, dan transportasi semuanya berkembang pesat sebagai hasil dari digitalisasi serta pertambangan dan energi, khususnya gas, minyak, nikel, dan batu bara.

Selain itu, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Indonesia terus meningkat. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) diperkirakan mencapai US\$35 triliun pada tahun 2023, naik lebih dari 7% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita juga meningkat menjadi hampir US\$4.900, mendekati tolok ukur pendapatan menengah atas. Meskipun trennya meningkat, pendapatan nasional Indonesia tetap menghadapi sejumlah kendala signifikan: Batubara, minyak sawit, nikel, dan komoditas lain yang berasal dari sumber daya alam terus menjadi ekspor utama dari Indonesia. Pendapatan nasional rentan terhadap volatilitas pasar dunia karena fluktuasi harga global.

Seluruh penduduk belum merasakan manfaat yang sama dari pertumbuhan PDB. Meskipun Indonesia bagian timur masih menghadapi tantangan infrastruktur dan akses pasar, daerah perkotaan seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan. Baik peluang maupun tantangan dapat muncul dari dividen demografi. Peningkatan kekayaan nasional tidak selalu mengarah pada distribusi kesejahteraan masyarakat yang lebih adil karena produktivitas yang rendah, ketidaksetaraan pendidikan, dan kurangnya keterampilan digital.

Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan sering kali dikaitkan dengan peningkatan PDB nasional. Ada masalah besar dengan polusi, deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut. Memprioritaskan pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pendapatan nasional yang tinggi dan berkelanjutan. Ekonomi digital berkembang pesat, namun masih ada kesenjangan dalam literasi digital, infrastruktur, dan akses internet. Potensi pendapatan nasional dari industri digital belum dimaksimalkan kecuali transisi ini disamaratakan.

Dalam hal ketahanan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi, studi kasus perkembangan pendapatan nasional Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun demikian, sejumlah masalah sistemik tetap ada, termasuk keberlanjutan lingkungan, ketidaksetaraan, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diversifikasi sektor, penguatan hilirisasi industri, peningkatan standar pendidikan dan keterampilan, serta pembangunan yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

Dengan mengambil tindakan-tindakan ini, pendapatan nasional tidak hanya akan terus meningkat secara numerik tetapi juga akan berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: BPS.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). New York: Pearson.
- Boediono. (2019). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2018). *Principles of Economics* (12th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2014). *Macroeconomics* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kemenkeu.
- Keynes, J. M. (2018). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Palgrave Macmillan. (Karya asli 1936).
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Macroeconomics* (5th ed.). New York: Worth Publishers.
- Kuznets, S. (1941). *National Income and Its Composition, 1919–1938*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Lipsey, R. G., & Chrystal, K. A. (2015). *Economics* (13th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics* (11th ed.). New York: Worth Publishers.
- Ricardo, D. (2004). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. New York: Dover Publications. (Karya asli 1817).
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Smith, A. (1991). *The Wealth of Nations*. New York: Prometheus Books. (Karya asli 1776).
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: OECD.
- Sukirno, S. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education
- World Bank. (2022). *World Development Indicators*. Washington, D.C.: The World Bank.

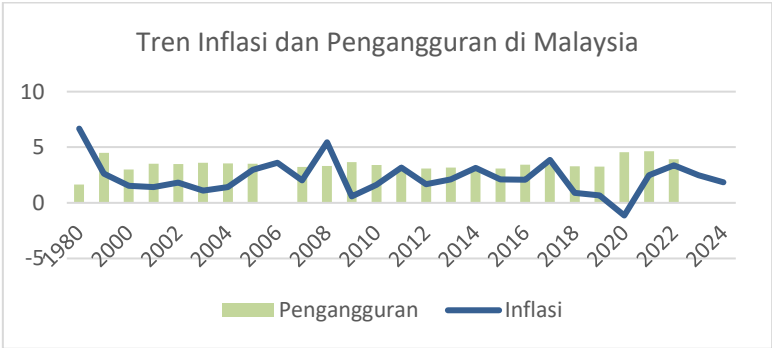
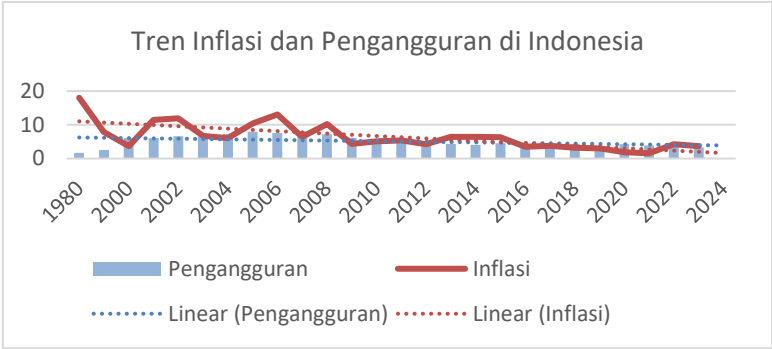
BAB 8

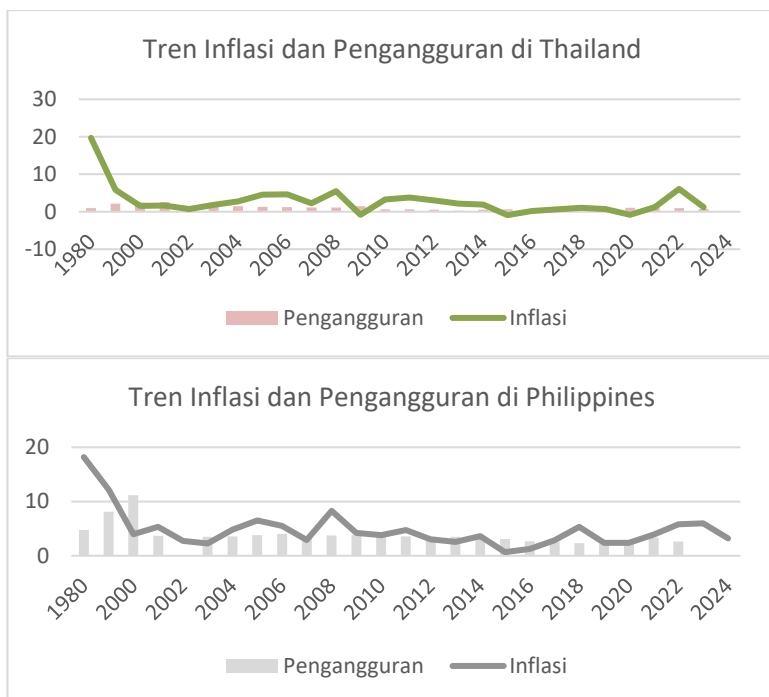
INFLASI DAN PENGANGGURAN

Oleh Febrian

8.1 Pendahuluan

Inflasi dan pengangguran menjadi indikator utama kinerja kebijakan ekonomi. Keduanya memengaruhi kesejahteraan jangka panjang dan stabilitas sosial. Di ASEAN, negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menghadapi dinamika kompleks akibat krisis global, pandemi, dan **volatilitas** komoditas. Lonjakan inflasi mengurangi daya beli, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, sementara pengangguran tinggi menunjukkan inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja.





Gambar 8.1. Grafik Tren Inflasi dan Pengangguran di ASEAN1
(Sumber: World Bank, diakses 15 April 2025)

Data menunjukkan Indonesia mengalami volatilitas inflasi lebih tinggi dibanding negara tetangga, terutama pasca-krisis 1997/1998. Krisis tersebut memicu lonjakan inflasi dan pengangguran simultan, mencerminkan kerentanan stabilitas harga dan pasar tenaga kerja. Pasca-reformasi, inflasi Indonesia relatif stabil meski masih fluktuatif saat krisis 2008 dan pandemi 2020.

Malaysia dan Thailand menunjukkan pola lebih stabil, mengindikasikan efektivitas kebijakan ekonomi konsisten. Sebaliknya, Filipina kerap mengalami fluktuasi signifikan saat krisis eksternal. Tren jangka panjang mengonfirmasi penurunan inflasi-

¹ Grafik Tren Inflasi dan Pengangguran di ASEAN di atas memperlihatkan perkembangan inflasi dan pengangguran di empat negara utama ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, selama periode 1980 hingga 2024. Grafik ini menggabungkan data inflasi (dalam bentuk garis) dan pengangguran (dalam bentuk batang) untuk masing-masing negara.

pengangguran di kawasan, tetapi episodik *spike* membuktikan kerentanan terhadap guncangan global.

Secara teoritis, hubungan inflasi-pengangguran kerap dimodelkan melalui Kurva Phillips. Namun, relasi ini bersifat dinamis—dipengaruhi konteks sosial-politik, arsitektur kelembagaan, dan pendekatan kebijakan. Pemahaman holistik atas dinamika ini menjadi kunci perumusan strategi ekonomi makro berkeadilan dan berkelanjutan.

Bab ini menganalisis hubungan teoritis-empiris inflasi-pengangguran di ASEAN (1980–2024), dengan integrasi analisis ketimpangan pendapatan untuk menangkap dampak tekanan harga dan struktur pasar tenaga kerja terhadap realitas sosial-ekonomi kawasan.

8.1.1 Kerangka Konseptual: Definisi Operasional dan Konsistensi Terminologi

Sebelum menganalisis dinamika empiris, penting menetapkan konsistensi definisi istilah kunci yang digunakan. Inflasi dalam bab ini merujuk pada kenaikan berkelanjutan (*sustained increase*) dalam indeks harga konsumen (IHK) atau deflator PDB, bukan fluktuasi sementara (Bank Indonesia, 2023). Mengacu kepada BPS, pengangguran diukur sebagai persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Konflik distribusi (*distributional conflict*) didefinisikan sebagai persaingan antara kelompok pelaku ekonomi—khususnya pekerja dan pemilik modal—dalam memperebutkan porsi pendapatan nasional, yang dapat memicu spiral harga-upah (*wage-price spiral*) atau spiral upah-harga (*price-wage spiral*) (Kalecki, 1971). Stagflasi merujuk pada kondisi unik di mana inflasi tinggi dan stagnasi output/pengangguran tinggi terjadi bersamaan, melanggar *trade-off* tradisional Kurva Phillips (Lerner, 1951). Kebijakan pendapatan (*incomes policies*) mencakup intervensi terstruktur untuk menyelaraskan pertumbuhan pendapatan nominal dengan produktivitas ekonomi (OECD, 2022). Kedalaman definisi ini menjadi landasan analisis integratif antara teori dan empiris ASEAN selanjutnya.

8.2 Kerangka Teoritis: Relasi Inflasi dan Pengangguran

8.2.1 Teori Klasik dan Monetaris

Dalam kerangka teori ekonomi klasik dan aliran monetaris, inflasi dipandang sebagai fenomena moneter. Pandangan ini merujuk pada gagasan bahwa perubahan tingkat harga secara umum disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan *output* riil dalam perekonomian. Milton pman, tokoh utama dari aliran monetaris, menyatakan secara tegas inflasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya peningkatan jumlah uang dalam perekonomian yang melampaui kapasitas produksinya (Friedman, 1968).

Dalam persamaan $MV = PY$, *Quantity Theory of Money* (QTM) mengasumsikan kecepatan peredaran uang (V) konstan dan *output* riil (Y) pada tingkat *full employment*—asumsi yang kerap tak terpenuhi dalam praktik. Ketidakstabilan V (*velocity volatility*) dan fluktuasi Y yang disebabkan guncangan membuat hubungan mekanis M-P (*money-to-price*) sulit dipertahankan (Keynes, 1936)

Sementara itu, masalah pengangguran dalam kerangka klasik dianggap sebagai fenomena jangka pendek yang akan terselesaikan oleh mekanisme pasar. Klasik berpendapat bahwa pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, sehingga setiap gangguan seperti **resesi** hanya bersifat sementara. Asalkan tidak ada intervensi yang menghalangi fleksibilitas upah, pasar akan mencapai keseimbangan pada tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*), yaitu tingkat pengangguran minimum yang tetap ada meskipun ekonomi berada dalam kondisi penuh pekerjaan (Friedman, 1968).

Aliran monetaris melanjutkan warisan pemikiran ini dengan memperkenalkan konsep ekspektasi adaptif dalam analisis hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, terdapat *trade-off* antara inflasi dan pengangguran yang tercermin dalam Phillips Curve. Namun dalam jangka panjang, *trade-off* ini tidak berlaku. Jika otoritas moneter mencoba menurunkan pengangguran di bawah tingkat alamiahnya melalui ekspansi moneter, maka hasilnya hanyalah peningkatan inflasi tanpa pengurangan pengangguran secara berkelanjutan (Lucas, 1972).

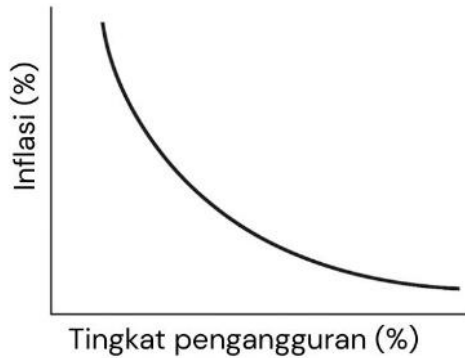
Dengan demikian, baik teori klasik maupun monetaris menekankan pentingnya menjaga stabilitas moneter sebagai syarat tercapainya kestabilan harga dalam jangka panjang. Mereka menganggap inflasi sebagai gejala dari gangguan kebijakan moneter, sementara pengangguran adalah hasil dari penyesuaian pasar yang bersifat sementara.

8.2.2 Pandangan Keynesian dan Kurva Phillips

Pandangan Keynesian menawarkan perspektif berbeda dari pendekatan klasik-monetaris dengan menekankan peran krusial permintaan agregat dan rigiditas pasar dalam menentukan tingkat output serta lapangan kerja. Dalam kerangka ini, inflasi tidak semata-mata bersumber dari eksekusi permintaan (*demand-pull*), tetapi juga muncul dari tekanan biaya produksi (*cost-push*) yang berakar pada konflik distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi. Ketika pekerja menuntut kenaikan upah nominal untuk mempertahankan daya beli riil mereka, sementara perusahaan berusaha menjaga margin keuntungan melalui kenaikan harga, terciptalah dinamika spiral berkelanjutan—baik berupa spiral harga-upah (*wage-price spiral*) maupun spiral upah-harga (*price-wage spiral*). Interaksi ini bersifat endogen dan sangat dipengaruhi struktur kekuatan pasar serta kebijakan institusional (Kalecki, 1971).

Konsep Kurva Phillips, yang berasal dari karya Phillips (1958), memberikan dasar empiris awal untuk memahami hubungan negatif jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kurva ini merefleksikan bagaimana rendahnya pengangguran memperkuat daya tawar pekerja, mendorong kenaikan upah dan inflasi. Namun, Modifikasi Kurva Phillips dengan ekspektasi adaptif $\pi_t = \pi_t^e - \beta(u_t - u_n) + v_t$ mengakui peran guncangan penawaran (v_t) dan ketidakstabilan pengangguran alamiah (u_n). Variabel v_t tidak hanya mewakili guncangan eksternal (minyak), tetapi juga tekanan endogen dari konflik distribusi domestik.

Phillips Curve



Gambar 8.2. Grafik Kurva Phillips
(Sumber: Mitchell et al. (2019))

Dalam persamaan ini, β adalah koefisien yang menunjukkan sensitivitas inflasi terhadap **pengangguran siklis**. Jika tingkat pengangguran berada di bawah tingkat alaminya, maka tekanan inflasi cenderung meningkat melebihi ekspektasi. Sebaliknya, pengangguran yang lebih tinggi dari tingkat alami akan menurunkan tekanan inflasi. Model ini juga menekankan pentingnya ekspektasi publik terhadap kebijakan moneter dan kestabilan harga, sebagaimana dipopulerkan dalam teori ekspektasi rasional dan pendekatan natural *rate hypothesis* yang dikembangkan oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps.

Model ini menekankan bahwa tidak ada *trade-off* jangka panjang antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka panjang, ekonomi akan kembali ke tingkat pengangguran alamiah, dan upaya untuk mempertahankan pengangguran di bawah tingkat ini hanya akan menghasilkan inflasi yang terus meningkat.

Di sisi permintaan, inflasi *demand-pull* terjadi ketika pengeluaran agregat melampaui kapasitas produksi ekonomi. Keynes (1936) mengonseptualisasikannya sebagai *inflationary gap*—kesenjangan antara permintaan nominal dan output potensial. Mekanisme ini semakin kritis ketika ekonomi mendekati pemanfaatan kapasitas penuh (*full capacity utilisation*), di mana

kenaikan permintaan lebih berdampak pada harga daripada output. Fleksibilitas harga pun bervariasi antarsektor akibat *menu costs* dan pertimbangan strategis. (Keynes, 1936).

Dalam konteks ASEAN, dampak tekanan *demand-pull* bervariasi tergantung pada ruang fiskal dan kapasitas produksi domestik. Selama pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 (2021-2023), negara-negara seperti Thailand dan Malaysia menerapkan stimulus fiskal signifikan untuk mendorong permintaan agregat. Namun, respons inflasinya berbeda secara mencolok: Thailand yang memiliki kapasitas manufaktur berlebih berhasil menyerap stimulus melalui peningkatan *output* dengan inflasi terkendali (2-3%), sementara Indonesia dan Filipina—dengan kapasitas produksi lebih terbatas dan ketergantungan impor tinggi—menghadapi tekanan inflasi lebih kuat (4-6%) meski dengan stimulus serupa (ADB, 2022).

Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan ekspansif bergantung pada tiga pilar:

1. Ruang kapasitas produksi sebelum stimulus,
2. Kemampuan meningkatkan pasokan domestik,
3. Institusi pengelola konflik distribusi.

8.2.3 Pandangan Moneteris

Pandangan moneteris muncul sebagai respons kritis terhadap pendekatan Keynesian, terutama pasca-kegagalan Kurva Phillips tradisional menjelaskan fenomena stagflasi tahun 1970-an. Dipelopori Milton Friedman, mazhab ini menegaskan bahwa inflasi pada hakikatnya merupakan fenomena moneter murni—selalu dan di mana pun disebabkan pertumbuhan jumlah uang beredar yang melampaui ekspansi output riil. Pernyataan Friedman yang terkenal, "*inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*" (1968), menjadi fondasi teoretis yang menolak penjelasan inflasi berbasis guncangan penawaran atau konflik distribusi.

Kerangka analitis utama monetarisme bertumpu pada Teori Kuantitas Uang (QTM) dalam bentuk persamaan:

$$MV = PY$$

Di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang (yang diasumsikan konstan), P adalah tingkat harga, dan Y adalah *output* riil. Jika jumlah uang (M) tumbuh lebih cepat dari *output* riil (Y), maka P atau tingkat harga akan naik, menciptakan inflasi. Oleh karena itu, pengendalian jumlah uang beredar menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi makro menurut pendekatan monetaris.

Dalam konteks hubungan inflasi-pengangguran, monetarisme memperkenalkan konsep ekspektasi adaptif dan natural rate of unemployment. Friedman (1968) dan Phelps (1967) membantah keberadaan trade-off jangka panjang melalui model Kurva Phillips yang diperluas:

"Kebijakan moneter ekspansif hanya dapat menurunkan pengangguran di bawah tingkat alamiah secara sementara. Setelah pelaku ekonomi menyesuaikan ekspektasi inflasi mereka, pengangguran akan kembali ke tingkat alamiah—hanya menyisakan inflasi yang lebih tinggi."

Proses ini melahirkan konsep expectations-augmented Phillips curve, yang mengimplikasikan bahwa upaya mempertahankan pengangguran rendah melalui stimulus moneter hanya menghasilkan spiral inflasi tanpa manfaat keberlanjutan.

Bukti Empiris di ASEAN:

Penerapan ide-ide monetaris terlihat jelas pasca-krisis 1997/1998. Bank Indonesia mengadopsi *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 2005, sementara Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand menerapkan kebijakan moneter ketat berbasis aturan. Hasilnya, inflasi Indonesia berhasil distabilkan pada kisaran $3 \pm 1\%$ (Bank Indonesia, 2023), meskipun tidak tanpa kritik. Data menunjukkan hubungan mekanis QTM tidak konsisten:

1. Pasca-krisis 1998, pertumbuhan $M2$ Indonesia 15-20%/tahun hanya memicu inflasi 4-6% karena penurunan V (kepercayaan perbankan rendah) dan peningkatan Y .
2. Sebaliknya, di Filipina (2020-2021), pertumbuhan $M2 > 20\%$ menyebabkan inflasi 4-6% akibat keterbatasan Y selama pandemi (World Bank, 2021).

Implikasi kebijakan dari perspektif monetaris menuntut penolakan tegas terhadap kebijakan diskresioner, menggantikannya dengan pendekatan berbasis aturan (*rules-based policy*) seperti penetapan target pertumbuhan uang beredar atau inflasi. Independensi bank sentral menjadi prasyarat mutlak kredibilitas kebijakan ini, sementara fokus utama diarahkan secara eksklusif pada pencapaian stabilitas harga—dengan mekanisme pasar diharapkan mampu menyesuaikan tingkat pengangguran secara alami. Namun, praktik di kawasan ASEAN sejak 2000-an menunjukkan evolusi kebijakan yang signifikan: bank sentral beralih dari target moneter ketat menuju kerangka ITF yang lebih fleksibel (Jahan, 2012). Pergeseran strategis ini merefleksikan pengakuan atas kompleksitas transmisi kebijakan moneter, di mana faktor perilaku psikologis dan kelembagaan—yang tidak terakomodasi dalam persamaan mekanis Teori Kuantitas Uang—memainkan peran krusial dalam dinamika ekonomi riil.

8.2.4 Pandangan Kritis terhadap *Trade-Off* Inflasi dan Pengangguran

Pergeseran paradigma dalam ekonomi makro kontemporer melahirkan kritik substantif terhadap konsep tradisional *trade-off* inflasi-pengangguran. Perspektif kritis—yang mencakup mazhab pasca-Keynesian, institusionalis, dan ekonomi heterodoks—menolak reduksionisme mekanis Kurva Phillips maupun pendekatan monetaris, dengan menegaskan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bersifat kontingen pada konteks historis-institusional. Inti kritik ini terletak pada tiga argumen fundamental:

Pertama, relasi negatif inflasi-pengangguran tidak bersifat universal. Data empiris ASEAN menunjukkan variasi signifikan: periode stagflasi (inflasi dan pengangguran tinggi simultan) terjadi selama krisis 1997/1998 dan pandemi 2020, sementara era 2000-2010 di Indonesia mencatat inflasi rendah tanpa penurunan pengangguran berarti. Ketidakkonsistenan ini membantah asumsi *trade-off* stabil, sekaligus mengungkap dominasi faktor struktural-eksternal seperti guncangan pasokan, liberalisasi pasar tenaga kerja, dan ketergantungan impor.

Kedua, Teori Konflik Inflasi (*Inflation Conflict Theory*) menawarkan kerangka alternatif dengan menempatkan konflik distribusi sebagai motor inflasi. Dinamika perebutan porsi pendapatan nasional antara buruh (upah) dan pemilik modal (laba)—diperkuat oleh struktur kekuatan pasar asimetris—menciptakan spiral harga-upah yang bersifat endogen. Krisis 1997/1998 menjadi bukti empiris krusial: depresiasi rupiah 300% memicu inflasi 77%, tetapi pelemahan serikat buruh pasca-PHK massal justru mengalihkan penyesuaian melalui pengangguran 20% ketimbang spiral upah. Fenomena ini mengonfirmasi tesis Kalecki (1971) bahwa resolusi konflik distribusi kerap dimenangkan pemilik modal melalui mekanisme pengangguran dan fleksibilisasi pasar tenaga kerja.

Ketiga, dimensi ketimpangan pendapatan beroperasi sebagai sebab-sekaligus-akibat dalam dinamika inflasi-pengangguran. Kebijakan moneter ketat yang menarget inflasi (mis. kenaikan suku bunga) berdampak regresif: kelompok berpendapatan rendah menanggung beban ganda melalui penyusutan lapangan kerja dan erosi daya beli, sementara pemilik modal diuntungkan imbal hasil finansial. Data ASEAN mengonfirmasi pola ini—koefisien Gini Indonesia melonjak dari 0,36 menjadi 0,41 selama 1998-2001 (Sumarto et al., 2008), dan kelompok termiskin Filipina mengalami penurunan pendapatan riil 2,5× lebih besar daripada kelompok terkaya selama pandemi (ADB, 2022). Ketimpangan struktural yang tinggi kemudian memperparah ketidakstabilan makro melalui tiga saluran:

1. Konsumsi rentan: Ketergantungan kelompok berpendapatan rendah pada belanja kebutuhan pokok membuat permintaan agregat peka terhadap guncangan harga pangan/energi.
2. Politik upah tertahan: Daya tawar buruh yang lemah dalam masyarakat timpang memicu siklus upah riil stagnan - produktivitas meningkat - keuntungan terkonsentrasi, yang pada akhirnya memperdalam ketimpangan (ILO, 2018).
3. Resistansi kebijakan: Elite ekonomi yang diuntungkan dari status quo cenderung menentang reformasi distributif, seperti terlihat dalam lambatnya implementasi pajak

progresif dan subsidi target di Indonesia dan Malaysia (Sundaram, 2006).

Dari perspektif pasca-Keynesian, pengangguran bukan konsekuensi tak terhindarkan dari kebijakan anti-inflasi, melainkan kegagalan institusional dalam memastikan permintaan agregat cukup dan hak bekerja. Solusinya memerlukan intervensi radikal seperti program jaminan pekerjaan (*job guarantee*) sebagai jangkar kebijakan. Sementara itu, kritik terhadap ekspektasi rasional menekankan ketidaksempurnaan informasi dan rigiditas perilaku yang membuat respons kebijakan tidak sejalan prediksi model.

Implikasi kebijakan yang muncul menuntut reorientasi tujuan makroekonomi:

1. Integrasi target inflasi dengan indikator ketimpangan (e.g., Indeks Atkinson),
2. Penguatan institusi tripartit untuk negosiasi upah berbasis produktivitas,
3. Alokasi strategis APBN untuk reskilling tenaga kerja terdampak automasi.
4. Pengalaman ASEAN membuktikan bahwa pendekatan teknokratis semata—tanpa memedulikan keadilan distributif—hanya mengabadikan siklus inflasi-pengangguran-ketimpangan.

8.3 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Bab ini telah membahas hubungan antara inflasi dan pengangguran melalui berbagai perspektif teoritis, mulai dari pandangan klasik, *Keynesian*, hingga teori ekspektasi rasional dan kritik terhadap asumsi *trade-off*. Secara konseptual, hubungan antara inflasi dan pengangguran tidaklah linier atau tetap; ia sangat dipengaruhi oleh konteks makroekonomi, struktur pasar tenaga kerja, ekspektasi pelaku ekonomi, serta respons kebijakan pemerintah dan otoritas moneter.

Dari sisi kebijakan, pemahaman terhadap dinamika inflasi dan pengangguran menjadi penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Dalam konteks Indonesia, stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua tujuan utama yang sering

kali dihadapkan pada dilema. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjalankan kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi melalui kerangka *inflation targeting framework*, yang secara resmi diadopsi sejak tahun 2005. Menurut Laporan Tahunan Bank Indonesia (2023), tingkat inflasi Indonesia berhasil dijaga pada kisaran $3\pm 1\%$ selama beberapa tahun terakhir, meskipun sempat meningkat akibat tekanan global pada masa pandemi.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan secara aktif menggunakan stimulus anggaran, baik melalui belanja sosial maupun subsidi energi, untuk menjaga daya beli masyarakat saat inflasi meningkat. Misalnya, pada periode 2022–2023, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi energi sebagai respons atas lonjakan harga pangan dan bahan bakar. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan perlindungan sosial.

Secara regional, negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand juga menerapkan kebijakan serupa. Malaysia, melalui Bank Negara Malaysia, menggabungkan kebijakan moneter hati-hati dengan intervensi pasar tenaga kerja, seperti *reskilling programs*. Sementara Thailand menggunakan *inflation targeting* yang relatif fleksibel dan memperkuat kebijakan ketenagakerjaan untuk mengurangi pengangguran pasca-COVID-19 (ADB Macroeconomic Outlook, 2023).

Dalam jangka panjang, strategi pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter konvensional. Reformasi struktural dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas basis produksi domestik, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Bappenas, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, serta stabilitas makro sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemahaman teoritis yang mendalam, disertai pembacaan atas kondisi empiris dan respons kebijakan yang adaptif, menjadi landasan penting bagi perumusan strategi ekonomi yang seimbang antara pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain pendekatan moneter dan fiskal konvensional, beberapa negara telah menerapkan *incomes policies* sebagai alternatif untuk mengelola inflasi yang bersumber dari konflik distribusi. Kebijakan ini bertujuan mengoordinasikan pertumbuhan pendapatan nominal—baik upah maupun keuntungan—agar selaras dengan pertumbuhan produktivitas ekonomi, sehingga mencegah spiral harga-upah yang merusak (Keynes, 1940). Dalam praktik, *incomes policies* dapat berbentuk pedoman upah sukarela (*wage guidelines*), kesepakatan tripartit (buruh-pengusaha-pemerintah), atau pengendalian harga administratif. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada legitimasi institusional dan konsensus sosial, seperti yang terlihat dalam *Scandinavian Model* di era 1960-1970an, di mana kenaikan upah nasional mengikuti produktivitas sektor ekspor (Flanagan, 1983).

Dalam konteks ASEAN, elemen *incomes policies* muncul dalam berbagai bentuk adaptif. Thailand membangun mekanisme *tripartite wage committees* sejak 1998 untuk menetapkan upah minimum provinsi melalui negosiasi antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah—sebuah upaya memitigasi konflik distribusi pascakrisis (ILO, 2017; Suttawet and Bamber, 2018). Malaysia mengombinasikan kebijakan moneter hati-hati dengan program reskilling yang bertujuan menyelaraskan kenaikan upah dengan peningkatan produktivitas sektoral (ADB, 2024). Sementara Indonesia menggunakan Dewan Pengupahan Nasional untuk menetapkan upah minimum, meski efektivitasnya sering terhambat fragmentasi serikat pekerja dan ketidakpatuhan pengusaha (Caraway and Ford, 2017). Tantangan utama implementasi di kawasan ini adalah tingginya sektor informal (35-70% tenaga kerja) yang sulit terjangkau kebijakan terstruktur, serta ketergantungan pada kebijakan reaktif (*firefighting*) ketimbang pencegahan konflik distribusi jangka panjang (Ohnsorge and Yu, 2022).

Pengalaman global menunjukkan *incomes policies* paling berhasil ketika:

1. Terintegrasi dengan investasi peningkatan produktivitas,
2. Didukung institusi tripartit yang kredibel,
3. Memiliki mekanisme penyesuaian fleksibel untuk guncangan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB (2022) *Southeast Asia Rising from the Pandemic*. March. Manila, Philippines.
- ADB (2024) *Quality Jobs and the Future of Work in Asia and the Pacific*. September. Manila, Philippines.
- Bank Indonesia (2023) *Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2023*. December. Jakarta. Available at: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/TKM-Desember-2023.aspx> (accessed 11 July 2025).
- Caraway TL and Ford M (2017) Institutions and collective action in divided labour movements: Evidence from Indonesia. *Journal of Industrial Relations* 59(4): 444–464.
- Flanagan RJ (1983) Unionism, economic stabilization, and incomes policies: European experience. *Journal of Macroeconomics* 5(3): 378.
- Friedman M (1968) *The Role of Monetary Policy*.
- ILO (2017) Ratifications for Thailand. Available at: www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::no:11200:p11200_country_id:102843 (accessed 11 July 2025).
- ILO (2018) *Global Wage Report 2018/19: What Lies behind Gender Pay Gaps*. Geneva: International Labour Office.
- Jahan S (2012) *Inflation Targeting: Holding the Line*.
- Kalecki M (1971) *Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933–1970*. Cambridge University Press.
- Keynes JM (1936) *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. New York: New York : Harcourt, Brace, and company.
- Keynes JM (1940) *How to Pay for the War: A Radical Plan for the Chancellor of the Exchequer*. London: MacMilan.
- Lerner AP (1951) *Economics of Employment*. McGraw-Hill.
- Lucas RE (1972) Expectations and the neutrality of money. *Journal of Economic Theory* 4(2): 103–124.
- Mitchell W, Wray LR and Watts M (2019) *Macroeconomics*. London: RED GLOBE PRESS.
- Ohnsorge F and Yu S (2022) *The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies*. The World Bank.

- Phillips AW (1958) *The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957*. Economica. Available at: <https://www.jstor.org/stable/2550759> (accessed 9 July 2025).
- Sumarto S, Suryahadi A and Bazzi S (2008) Indonesia's Social Protection during and after the Crisis. In: Barrientos Armando and Hulme D (ed.) *Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics*. London: Palgrave Macmillan UK, pp. 121–145. Available at: https://doi.org/10.1057/978-0-230-58309-2_6.
- Sundaram JK (2006) *Growth with Equity in East Asia?* DESA working paper, September. New York. Available at: <http://www.un.org/esa/desa/http://www.un.org/esa/desa/papers>.
- Suttawet C and Bamber GJ (2018) International labour standards and decent work: a critical analysis of Thailand's experiences, with suggestions for theory, policy, practice and research. *Asia Pacific Journal of Human Resources* 56(4): 539–565.
- World Bank (2021) *Philippines Economic Update, June 2021*. World Bank, Washington, DC.

BIODATA PENULIS



Saut Maruli Tua Pandiangan, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Bisnis
Politeknik Unggulan Cipta Mandiri

Penulis lahir di Kota Bengkulu tanggal 18 Juli 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Unggulan Cipta Mandiri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, keduanya dari Universitas Sumatera Utara. Penulis menekuni bidang menulis, beberapa karya yang dihasilkan adalah *Statistika Ekonomi*, *Pengantar Ekonomika*, dan *Pengantar Bisnis Digital*.

BIODATA PENULIS



Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 November 1992. Penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 pada Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo. Penulis memulai karir sebagai dosen pada tahun 2016 di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo hingga pertengahan tahun 2019. Setelah itu penulis menjadi dosen tetap pada Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sembilanbelas November Kolaka (USN Kolaka) hingga saat ini. Penulis memiliki ketertarikan terhadap ekonomi kerakyatan. Beberapa tulisan penulis terkait ekonomi kerakyatan terkhusus perkoperasian telah dimuat di media online dan juga artikel ilmiah telah termuat di jurnal nasional. Penulis juga merupakan penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemendikbudristek. Selain meneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku terkait dengan bidang yang ditekuni baik berupa monograf maupun book chapter. Penulis berharap dapat terus berkarya melalui tulisan sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap penyebaran ilmu pengetahuan.

Email Penulis: muhammadsyaifuul@gmail.com

BIODATA PENULIS



Eranus Yoga Kundhani, SE, MSi

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

Penulis menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1999. Selanjutnya penulis direkrut menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis melanjutkan studi S2 pada Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, di tahun 2015. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi S3 pada Program Studi Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Publik dan Kebijakan Fiskal. Sebagai dosen profesional, penulis tidak hanya melakukan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, namun juga aktif melakukan penelitian dan publikasi dalam bidang yang ditekuni. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/ kota maupun provinsi, lembaga donor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta Kemenristek Dikti. Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. eranus.kundhani@uksw.edu

BIODATA PENULIS

Dr. Ir. Roosganda Elizabeth, M.Si., MS.PNLP



CP/WA; E-mail : Roosganda Elizabeth/087770881581; roosimanru@yahoo.com
Google Scholar : [roosimanru@yahoo.com](https://scholar.google.com/citations?user=eS1tftQAAAAJ&hl=id) ; roosimanru@gmail.com
Url : <https://scholar.google.co.id/citations?user=eS1tftQAAAAJ&hl=id>
Orcid : 0000-0003-4937-9739
SCOPUS ID : 57218892768
SINTA ID : 6671403

Roosganda Elizabeth kelahiran September 29, berkariier sebagai seorang peneliti fungsional ASN – di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bidang Inovasi dan Pemberdayaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, UMKM, Ilmu Manajemen, Sosiologi Pedesaan dan Pembangunan, Sosial Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Agribisnis, Ekonomi Khusus, Ekonomi Terapan, Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif, Pengabdian Masyarakat, Founder Start Up, Dewan Komisaris Perkebunan Swasta Nasional, Mitra Bestari, Reviewer, dan Editor anggota Tim Dewan Redaksi dan Editorial Board beberapa jurnal terakreditasi nasional dan publikasi lainnya. Ber-orientasi sektor publik dengan menyelaraskan keberpihakan dan pendampingan. Berkarya nyata sebagai fungsionalis ASN dan pengurus aktif di beberapa organisasi dan profesi ilmiah. **Penulis** aktif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) dan populer internasional dan nasional, lebih 400-an jurnal dan buku serta HKI. Pembimbing Mahasiswa agar mampu menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi berkualitas, dan berdayaguna serta mendiseminasikan dalam KTI dan memanfaatkan keilmuannya di masyarakat dan lingkungan luas dengan kompetensi, qualified, bernilai jual tinggi, bertanggungjawab dan ber-ahlak, ber-attitude, menjunjung tinggi dan komit dalam melaksanakan etika, norma empati dan toleransi dalam bermasyarakat yang majemuk dan beragam.

BIODATA PENULIS



Unang Atmaja, Ir. M.Sc
Prodi Agribisnis
Universitas Siliwangi

Penulis lahir di Kota Tasikmalaya. Ia meraih gelar sarjana di bidang Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Agriculture Development Universiteit Gent, Belgium. Beberapa Short Course di Wageningen University and Research-WUR The Netherland. Sejak berkarir sebagai Dosen di Program Studi Agribisnis, Universitas Siliwangi 1996 penulis aktif dalam penelitian dan pengembangan di bidang Agribisnis, dengan fokus utama Pembangunan Agribisnis, dan telah mengajar berbagai mata kuliah diantaranya Ekonomi Makro, Perencanaan Wilayah Pertanian, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Penulis memiliki sejumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terkemuka dan telah menjadi pembicara pada berbagai konferensi internasional di bidang Pembangunan Pertanian Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, penulis berharap dapat berbagi wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat dengan pembaca buku ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: uatmaja@gmail.com

BIODATA PENULIS



Muhammad Hatta, SE.,M.Si

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Penulis lahir di Parepare, 5 Oktober 1965, Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Menyelesaikan Program S1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Hasanuddin Tahun 1992, kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan pada Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin dan lulus 2015. Sekarang merupakan Dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Wiljan Attentia Kotngoran, S.E., M.Si.

Memiliki orang tua yang berprofesi sebagai seorang guru merupakan sebuah inspirasi bagi penulis dalam menekuni dunia pendidikan. Penulis yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Akuntansi Ketika lulus dalam penerimaan mahasiswa di program sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura diterima pada

program studi Ekonomi Pembangunan tidak membuat penulis menyerah, bahkan dalam proses perkuliahan seiring jalannya waktu ada begitu banyak hal yang mempengaruhi sehingga membuat penulis tertarik untuk melanjutkan ke pendidikan lagi ke program magister. Pada akhirnya setelah melewati begitu banyak tantangan, penulis dapat menyelesaikan pendidikan magister pada program studi Ilmu Ekonomi membawa penulis masuk dalam dunia pendidikan sebagai seorang akademisi yang harus menjalani karir dengan profesional selain itu ada juga Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dijalani bukan hanya lewat pengajaran saja tetapi juga bagaimana melakukan penelitian dan memberikan kontribusi lewat karya ilmiah sebuah buku dengan harapan hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara.

BIODATA PENULIS



Febrian, S.E., M.Ec.

Dosen Program Studi Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Penulis lahir di Jambi pada 11 Februari 1989, merupakan dosen tetap Program Studi Ekonomi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di STIE Muhammadiyah Jambi (Ekonomi Pembangunan) dan magister di Ritsumeikan University, Jepang (*Master Program of Economic Development*). Selama studi di Jepang, penulis aktif sebagai Ketua Divisi Humas dan Media PPI Jepang Korda Shiga, mengelola komunikasi strategis dan jejaring akademik.

Sebelum berkarier di akademisi, penulis mengumpulkan pengalaman profesional 9 tahun di sektor perbankan—mulai dari front office hingga divisi SDM. Pengalaman multidisiplin ini memberinya perspektif unik dalam mengintegrasikan dinamika kebijakan makro, pasar tenaga kerja, dan efisiensi kelembagaan ke dalam penelitian serta pengajarannya tentang ekonomi pembangunan.